



**DPUPRP**  
KAB. TANAH LAUT

**KERJA KITA, PRESTASI BANGSA**



## **LAPORAN KINERJA**

**( LKj )**

**TAHUN 2023**

**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**PENATAAN RUANG DAN  
PERTANAHAN**

## KATA PENGANTAR

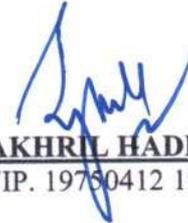
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 22 Januari 2024

Kepala Dinas,



**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor - sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menetapkan **12 Program, 21 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan** dengan anggaran sebesar Rp. **533.645.003.555,-** dengan realisasi Rp. **485.393.041.704,-** atau sebesar **90,96%** dan **Realisasi pendapatan Rp. 381.895.000,-** dari target Rp. **500.000.000,-** atau sebesar **76,38%**. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 22 Januari 2024

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	3
D. Cascading Kinerja .....	3
E. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	4
F. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Petanahan Kabupaten Tanah Laut .....	15
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	17
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya .....	24
I. Sistematika Penyajian.....	27
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.....	28
B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.....	30
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	32
D. Indikator Kinerja Utama .....	37
E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 2023 .....	40
F. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 .....	42
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>47</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	47
1. Sasaran RPJMD .....	47
2. Eselon II.....	63
3. Eselon III dan Eselon IV.....	81
B. Akuntabilitas Keuangan .....	149
1. Anggaran dan Realisasi 2023.....	149

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	150
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023.....	152
4. Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis.....	163
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>166</b>
A. Simpulan.....	166
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	166
 <b>LAMPIRAN</b>	
1. IKU	
2. Pernyataan Hasil Review	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
4. Cascading/Pohon Kinerja	
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)	
6. Monev Renstra	
7. Matriks Keselarasan	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (pemerintahan yang baik). Agar “ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “ alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LKj) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

## B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan (LKj) mengacu pada upaya dokumentasi dan evaluasi hasil kerja suatu lembaga atau unit pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa maksud atau tujuan dari penyusunan (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut :

1. Akuntabilitas: Laporan kinerja membantu menciptakan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Dengan menyajikan informasi terperinci tentang pencapaian tujuan, instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi: Laporan kinerja dirancang untuk memberikan transparansi terhadap aktivitas dan pencapaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Ini memungkinkan masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan lembaga pengawas untuk memahami bagaimana sumber daya publik digunakan.
3. Evaluasi Kinerja: Laporan ini memberikan landasan untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Dengan menilai kinerja, instansi dapat mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan.
4. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Data yang terdapat dalam laporan kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan masa depan dan pengambilan keputusan. Informasi tersebut membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
5. Pemantauan Program dan Proyek: Laporan kinerja juga berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap program dan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Dengan melacak pencapaian target, instansi dapat memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana.

6. Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan: Laporan kinerja memberikan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dan pihak berkepentingan lainnya, gambaran yang jelas tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Ini membantu membangun kepercayaan dan mendukung hubungan positif antara instansi dan pemangku kepentingan.

Dengan merinci pencapaian, tantangan, dan langkah-langkah perbaikan yang diambil, laporan kinerja membantu menciptakan lingkungan di mana pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan akuntabel.

### C. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan (LKj), yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### D. Cascading Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan cascading kinerja untuk membantu menciptakan hubungan yang jelas antara strategi organisasi dan tindakan harian individu atau unit. Hal ini dapat

meningkatkan fokus, pengukuran kinerja yang terarah, dan akhirnya membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif.

Cading dalam bentuk Pohon Kinerja dimuat dalam Lampiran dari Lkj ini.

#### **E. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan:
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Tata Ruang terdiri;
- g. Bidang Pertanahan;
- h. UPT Dinas yaitu UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberika kepada daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan

- bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPTD dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut seperti uraian dibawah ini.

Uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;

- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian perizinan, non perizinan / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;

- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- i. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- m. melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- n. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah di bidang sumber daya air serta pemanfaatan dan sumber daya air, pengelolaan data dan pemeliharaan proyek-proyek dibidang air baku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penelitian /survey, Inventarisasi, penyusunan perencanaan teknis dan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan pembangunan bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan, operasi serta pemeliharaan, pengamanan pengairan dan Daerah aliran sungai;

- g. menyusun program dan melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan perizinan, pengamanan pemanfaatan air pada alur sungai dan garis sepadan pantai;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan teknologi perairan sedang dan kecil, sistem informasi dan monitoring jaringan Irigasi, pengembangan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dan pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat Swasta, BUMN/ BUMD, pemerintah daerah dalam bidang lainnya;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta mengadakan pengembangan daerah rawa, sungai, danau, dan bangunan pelengkap;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan dan pembinaan masyarakat serta mengatur pekerjaan pemakaian dan pemanfaatan jaringan irigasi serta sumber – sumber air termasuk bendungan sedang atau kecil maupun danau – danau alam atau buatan, rawa dan pantai;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Bina Marga sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang bina marga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program kegiatan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan teknik, penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pemanfaatan kebinamargaan;

- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan ;
- f. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;
- g. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- h. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
- c. bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/ rekomendasi Izin mendirikan bangunan(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Tata Ruang sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan rencana tata ruang daerah;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang tata ruang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana, perencanaan tata ruang serta penilaian atas pelaksanaannya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program penataan ruang;
- e. mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan rencana pembangunan bidang tata ruang;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyajian data serta informasi Geografi Daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Daerah dan pengembangan kemitraan dalam mengelola tata ruang Daerah;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan pola dasar, propeda, repetada bidang tata rang serta melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan tata ruang;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan RTRKSK;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan RDTR Kabupaten;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kabupaten;
- m. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Kabupaten;
- o. mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan Pemberianizin pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- r. bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi Izin mendirikan bangunan(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Pertanahan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pertanahan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subjek dan objek pengaduan atas permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengurusan hak – hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subyek dan obyek ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan inventarisasi tanah kosong;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pemanfaatan tanah kosong;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan proses penerbitan perizinan/ non perizinan / rekomendasi izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- p. perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan toponimi;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sedang UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana uraian dibawah ini.

Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi terdiri atas :

- a. UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Peralatan dan Pengujian Material konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan peralatan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan peralatan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan peralatan;
- e. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi;
- f. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu Konstruksi;
- h. pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan Konstruksi;
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Sedangkan uraian tugas UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;
- b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang peralatan dan pengujian material konstruksi sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan;
- f. menghimpun dan mengolah data serta informasi
- g. yang berhubungan dengan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan pengujian material konstruksi dan informasi konstruksi;
- k. menyusun jadwal pemakaian peralatan untuk ketertiban operasionalnya;
- l. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan pemakaian peralatan;
- m. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pemakaian peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;
- n. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana peralatan dan Laboratorium Pengujian Material Konstruksi pada wilayah UPTD;
- o. melaksanakan pembinaan teknis dan melaksanakan fasilitasi penggunaan teknologi dalam pemeriksaan laboratoris;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu konstruksi;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/ perbaikan konstruksi;
- r. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- s. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- t. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- u. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa sewa ataupun peminjaman peralatan dan jasa perbengkelan;
- v. melaksanakan kerja sama peralatan maupun perbengkelan dalam optimalisasi pelayanan masyarakat; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## F. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2018-2023, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan barang belum optimal
- Masih kurangnya pengelola kegiatan dan Adminstrasi yang bersertifikat.
- Belum Optimalnya data dan Informasi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
- Belum seluruh jalan dan Jembatan dalam kondisi baik sesuai kapasitas jalan dan jembatan kabupaten.
- Terdapat defisit imbalan air pada sebagian Daerah Irigasi (DI).
- Belum optimalnya penyediaan dan pengolahan air baku.
- Ruang lingkup penanganan yang kompleks.
- Belum maksimalnya koordinasi lintas SKPD terkait bidang SDA.
- Berkurangnya areal pertanian/tanaman pangan.
- Kurangnya infrastruktur air baku.
- Belum sinkronnya mapping antar sektor (one map).
- Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap air minum yang layak.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah.
- Belum sepenuhnya RTRW menjadi acuan Program Pembangunan dan panduan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- Masih adanya permasalahan dan konflik kepemilikan dan hak atas tanah.
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat khususnya terkait fungsi lahan produktif untuk kepentingan lainnya.

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
4. Meningkatkan kemantapan jalankabupaten;
5. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
7. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman;
8. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
9. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Meningkatkan implementasi SPIP;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

## G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

### 1. Dukungan SDM

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2023, pegawai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 160 orang, yang terdiri dari 65 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 79 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan 16 orang TTK (Tenaga Teknis Kontrak).

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 65 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi kualifikasi pendidikan, golongan, jenis kelamin dan status jabatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Jabatan	Pendidikan						
		SMP	SLTA	D II	D III	D IV	S I	S II
1	Kepala Dinas						1	
2	Sekretaris Dinas						1	
3	Kepala Bidang					1	1	3

4	Kasi/Kasubbag							3	2
5	JFU	2	14	1	13	1		12	2
6	JFT							4	4
Jumlah		2	14	1	13	2		22	10
		65							

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang kualifikasi pendidikan S II sebanyak 10 orang, S I sebanyak 22 orang, D IV sebanyak 2 orang, D III sebanyak 13 orang, D II sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 14 orang dan SMP sebanyak 2 orang.

Diharapkan yang mereka yang berpendidikan D3 dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka melalui ijin belajar maupun tugas belajar. Begitu juga yang berpendidikan dibawah D3 memungkinkan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.  
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan												JLH		
		I		II				III				IV			9	
		d	a	b	c	d	A	b	C	d	a	b	c			
1	Kepala Dinas											1			1	
2	Sekretaris Dinas											1			1	
3	Keppala Bidang							1	2	1					5	
4	Kasi/Kasubbag							1	3	1					5	
5	JFU		1	2	1	10	16	10	3	1	1				45	
6	JFT								4	3					7	
7	PPPK													1	1	
Jumlah			1	2	1	10	16	10	9	9	3	2		1	65	
			14				44				6			1	65	

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 yang memiliki Golongan IV

sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 44 orang, Golongan II sebanyak 14 orang dan Golongan IX atau PPPK sebanyak 1 orang.

Sedangkan menurut jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3.**  
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Kepala Bidang	5	-
4	Kasi/Kasubbag	2	3
5	JFU	35	11
6	JFT	6	1
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>15</b>
		<b>65</b>	

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang.

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, selain dari Pegawai Negeri Sipil juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap yaitu sebanyak 79 orang dan Tenaga Teknis Kontrak sebanyak 16 orang. Keadaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

**Tabel 1.4.**  
Jumlah PTT dan TTK Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SLTA	DIII	DIV	SI	
1	PTT	4	5	32	12	1	25	79
2	TTK			5	3		8	16
	<b>Total seluruhnya</b>	<b>95</b>						

Dari tabel di atas dapatlah dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan lebih banyak berpendidikan SLTA sebanyak 37 orang, yang berpendidikan S1 sebanyak 33 orang, yang berpendidikan DIV sebanyak 1 orang, yang berpendidikan DIII sebanyak 15 orang dan sisanya berpendidikan SD dan SMP masing-masing sebanyak 9 orang.

Sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5.  
Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		LK	PR
1	PTT	60	19
2	TTK	11	5
	<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	

## 2. Sarana Prasarana

Jumlah dukungan sarana dan prasarana berupa 2 unit gedung kantor, 35 kendaraan dinas operasional (sepeda motor), 7 buah mobil dinas operasional dan 1 buah mobil jabatan.

## 3. Anggaran

Dukungan Anggaran dapat dilihat pada Anggaran Tahun 2023.

Pada Anggaran Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdapat **12 Program, 21 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan** dengan anggaran kegiatan sebelum perubahan sebesar **Rp. 451,705,927,786,-** (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), setelah perubahan anggaran menjadi **Rp. 533.645.003.555,-** (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ribu Lima Ratus Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau bertambah sebesar **Rp. 81.939.075.769,-** (Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terbagi dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masing – masing unit kerja (bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis) yang bisa dapat pada tabel berikut :

**Tabel 1.11**  
**Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**  
**Kabupaten Tanah Laut**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	
A	<b>SEKRETARIAT</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>43,942,846.00</b>
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43,942,846.00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,999,264.00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,943,582.00
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,619,510,336.00</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,559,845,999.00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59,665,336.00
3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,521,400,995.00</b>
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,995,782.00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	732,168,493.00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,236,720.00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00
10	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708,000,000.00
5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,766,124,514.00</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439,048,274.00
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,327,076,240.00
6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231,848,000.00</b>
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,016,000.00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,832,000.00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0

<b>B</b>	<b>BIDANG BINA MARGA</b>	<b>215,893,836,106.00</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>215,893,836,106.00</b>
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>215,893,836,106.00</b>
18	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,415,900,000.00
19	Pembangunan Jalan	34,702,240,543.00
20	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1,514,067,409.00
21	Rekonstruksi Jalan	73,666,378,107.00
22	Rehabilitasi Jalan	60,799,093,655.00
23	Pemeliharaan Rutin Jalan	12,559,874,736.00
24	Pembangunan Jembatan	7,643,828,035.00
25	Penggantian Jembatan	12,708,118,397.00
26	Rehabilitasi Jembatan	475,092,000.00
27	Pemeliharaan Rutin Jembatan	8,683,237,224.00
<b>C</b>	<b>BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI</b>	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>34,682,341,902.00</b>
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34,682,341,902.00</b>
28	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	381,818,182.00
29	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,148,454,547.00
30	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	28,152,069,173.00
31	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
32	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>25,752,469,834.00</b>
<b>10</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,752,469,834.00</b>
33	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	25,752,469,834.00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>126,142,920,841.00</b>
<b>11</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>126,142,920,841.00</b>
34	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	126,142,920,841.00
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>415,000,000.00</b>

13	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>415,000,000.00</b>
35	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	415,000,000.00
<b>D</b>	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>88,539,525,514.00</b>
<b>14</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51,462,796,406.00</b>
36	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,518,693,289.00
37	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,348,196,560.00
38	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13,216,088,484.00
39	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25,649,938,530.00
40	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,134,898,385.00
41	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2,524,926,101.00
42	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	70,055,057.00
<b>15</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37,076,729,108.00</b>
43	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	499,098,380.00
44	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4,949,264,752.00
45	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	18,998,173,634.00
46	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11,454,516,810.00
47	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1,175,675,523.00
<b>E</b>	<b>BIDANG TATA RUANG</b>	<b>3,661,738,637.00</b>
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3,661,738,637.00</b>
<b>16</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>3,517,340,828.00</b>
48	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	604,660,621.00
49	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,912,680,207.00
<b>17</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144,397,809.00</b>
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	144,397,809.00
<b>F</b>	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>3,078,604,760.00</b>
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>1,170,848,401.00</b>

<b>18</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,170,848,401.00</b>
51	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,956,000.00
52	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	820,892,401.00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>1,907,756,359.00</b>
<b>19</b>	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,907,756,359.00</b>
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1,907,756,359.00
<b>G</b>	<b>UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN LAB KONSTRUKSI</b>	<b>560,888,562.00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>560,888,562.00</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105,222,000.00</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105,222,000.00
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>14,985,039.00</b>
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,987,310.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,997,729.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>60,000,000.00</b>
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16,167,200.00</b>
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,167,200.00
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>364,514,323.00</b>
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136,774,200.00
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	227,740,123.00

#### H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi Sakip tahun sebelum nya telah ditindaklanjuti dan diunggah dalam website Sakuntala sebagaimana matrik/ tabel berikut :

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
A.	<p><b>Perencanaan Kinerja</b> Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun diunggah/ dipublikasikan pada website unit kerja</p> <p>Agar melakukan koordinasi dengan Bappeda atas IKU terkait Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang belum terakomodir dalam RPJMD</p>	<p>Dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun akan diunggah/ dipublikasikan pada website unit kerja</p> <p>Akan dilakukan koordinasi dengan Bappeda atas IKU terkait Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang belum terakomodir dalam RPJMD</p>	<p>Website DPUPRP</p> <p>Dokumen Renstra</p>	<p>Dalam Progres Pembuatan Sistem Informasi Smart Office DPUPRP</p> <p>Telah dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut atas Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertanahan yang belum terakomodir dalam RPJMD dan hasilnya di untuk Tahun 2023 tidak dimungkinkan lagi, dan untuk Renstra Tahun 2024-2026 sesuai Desk dan Verifikasi Renstra diputuskan IKU Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertanahan menempati IKU Eselon III.</p>
B.	<p><b>Pengukuran Kinerja</b> Agar dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan</p> <p>Agar memperhatikan ketepatan penyajian data kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan</p> <p>Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja</p>	<p>Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan</p> <p>Data kinerja disajikan sesuai dengan indikator yang ditetapkan</p> <p>Menunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja untuk menjamin keandalan data kinerja</p>	<p>Dokumen SOP</p> <p>Dokumen Lkj</p> <p>SK Petugas Pengumpulan Data Kinerja</p>	<p>Telah disusun SOP tentang pengumpulan data kinerja</p> <p>Data kinerja yang tersaji dalam Lkj telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan</p> <p>Telah ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja</p>

<p><b>C. Pelaporan Kinerja</b></p>	<p>Agar hasil pengukuran data kinerja secara berkala dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja</p> <p>Agar memperhatikan ketepatan penulisan data kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj)</p> <p>Agar menyajikan informasi terkait aktivitas/ kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dan hambatan/ kendala apabila target kinerja tidak tercapai</p>	<p>Hasil pengukuran data kinerja secara berkala dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja</p> <p>Penulisan data kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) akan lebih cermat</p> <p>Menyajikan informasi terkait aktivitas/ kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dan hambatan/ kendala apabila target kinerja tidak tercapai</p>	<p>Monev dan Tindak Lanjut per Triwulan</p> <p>Dokumen Lkj</p> <p>Monev dan Tindak Lanjut per Triwulan</p>	<p>Telah dilaksanakan</p> <p>Penulisan data kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) telah tepat</p> <p>Telah disajikan informasi terkait aktivitas/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dan hambatan/kendala apabila target kinerja tidak tercapai</p>
<p><b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b></p>	<p>Agar menjadikan laporan kinerja berkala sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai target kinerja</p> <p>Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>Agar melakukan peningkatan kompetensi terkait SAKIP kepada pegawai yang membidangi/ bertugas</p>	<p>Menjadikan laporan kinerja berkala sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai target kinerja</p> <p>Dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>meningkatkan kompetensi terkait SAKIP kepada pegawai yang membidangi/ bertugas</p>	<p>Monev dan Tindak Lanjut per Triwulan</p> <p>Monev dan Tindak Lanjut per Triwulan</p> <p>ASN yang menangani SAKIP</p>	<p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai</p> <p>Pegawai yang membidangi/ bertugas telah mengikuti peningkatan kompetensi terkait SAKIP</p>

	Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang	Menindaklanjuti hasil evaluasi APIP sesegera mungkin, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang	SAKIP secara menyeluruh	Telah dilaksanakan
--	--	---	-------------------------	--------------------

## I. Sistematika Penyajian

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran, tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya serta sistematika penyajian.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan visi RPJMD, misi RPJMD, tujuan dan sasaran sasaran strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja serta program dan kegiatan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan akuntabilitas kinerja organisasi yang berisi sasaran RPJMD, capaian indikator kinerja utama/eselon 2, capaian kinerja Eselon 3, capaian kinerja Eselon 4 pada Sekretariat dan UPT serta akuntabilitas keuangan yang berisi anggaran dan realisasi APBD, anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program, perbandingan program dan kegiatan dengan tahun sebelumnya.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja.

## LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**BERKARYA** : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

**INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego

bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

## **B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

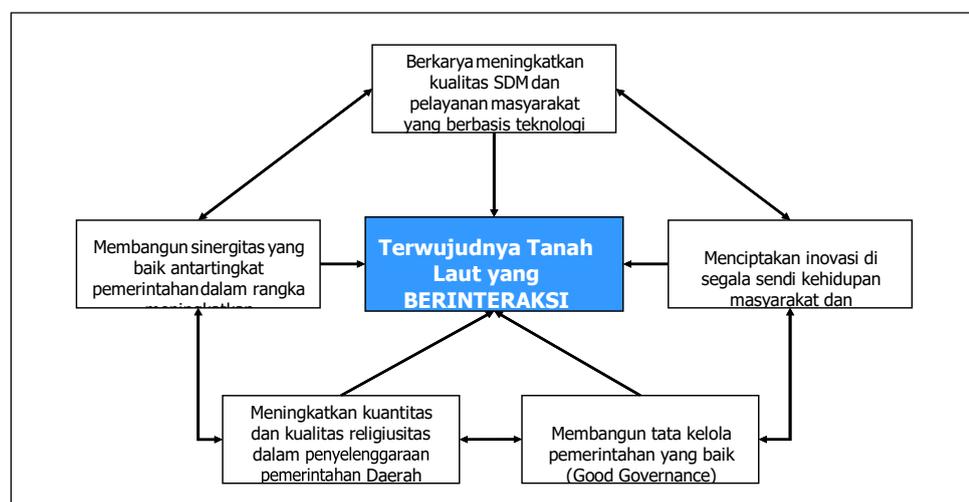
Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023**



Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial da budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tatakelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun yang tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2018-2023 dengan 2 (dua) tujuan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Yang Diampu Dinas PUPRP Pada RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023**

MISI 5				
Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkunganp Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka kemudian dikembangkan dan menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pembangunan infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
				Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat
			Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	

2.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya pelaksanaan dan implementasi penataan ruang kabupaten	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten
3.	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kab. Tanah Laut	Meningkatnya kepatuhan hukum kepemilikan tanah di Kab. Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan
			Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut

Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Eselon 2</b>								
1	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	38%	59,61%	64%	78%	85%	<b>Kepala Dinas</b>
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	3,13%	31,7%	51,96%	62,68%	70%	
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	67%	67,01%	69,17%	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	32,59%	38,55%	41,53%	44,43%	47,39%	
			Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	51,70%	51,90%	52,29%	53,49%	54,69%	
2.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70%	78%	87%	92%	98%	

3	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Eselon 3</b>									
1	Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRP	Nilai saki dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	BB	BB	BB (70)	A (80,01)	A (80,05)	Sekretariat
		Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	35,63%	59,61%	64%	78%	85%	Bidang Bina Marga
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	26,83%	31,7%	51,96%	62,68%	70%	
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	1,80%	1,77%	2,30%	2,83%	3,36%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
			Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	22,23%	29,70%	31,23%	32,76%	34,29%	
			Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	1,80%	1,77%	2,30%	2,83%	3,36%	
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses	Persentase peningkatan rumah tangga yang	0,30%	0,20%	52,60%	53,49%	54,38%	

		sanitasi	mendapat akses sanitasi yang layak						
		Meningkatnya saluran drainase yang terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase	3,50%	3,99%	4,58%	4,86%	5,16%	
		Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%	21,25%	16,90%	16,90%	16,90%	
			Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	20%	50%	45%	45%	100%	
		Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	8,70%	17,38%	3,22%	34,74%	43,49%	
		Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	67%	67,01%	69,17%	
			Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	89%	89%	89,84%	91,05%	
			Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	30%	30%	14,72%	15,74%	15,75%	
3	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	-	84%	28%	28%	55%	
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70%	78%	87%	92%	98%	<b>Bidang Tata Ruang</b>
4	Meningkatkan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	<b>Bidang Pertanahan</b>

### D. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)}}{\text{Total panjang jalan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jembatan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas irigasi di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum sehat}}{\text{Total penduduk di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak}}{\text{Total rumah tangga di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohonkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan}}{\text{Total sengketa/konflik pertanahan yang masuk ke tingkat kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah konsolidasi tanah yang diselesaikan}}{\text{Total konsolidasi tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	

Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut :

**Tabel 2.6**  
**Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	Sekretariat
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	
4	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	
5	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	
6	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	
7	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	
8	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	
		Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	
9	Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	
10	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	
11	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Bidang Tata Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	
12	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Bidang Pertanahan
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	
		Persentase hasil kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab. Tanah Laut	

Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.7**  
**Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	
2	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	Sub bagian Keuangan
5	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	
6	Meningkatnya retribusi jasa sewa alat pengujian material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
		Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	
7	Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Material Konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Sub Bagian TU UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
10	Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
11	Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	
12	Melakukan fasilitas peningkatan SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	

## E. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.8**  
Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	70%	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,17%	Bidang Sumber Daya Air
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	47,39%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	54,69%	
3.	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	98%	Bidang Tata Ruang
4.	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	Bidang Pertanahan
5.	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	

Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 2.9**  
Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	80,05 (A)	Sekretariat
2.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	
4.	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	73%	Bidang Bina Marga
5.	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	2,83%	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	22,25%	
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses air minum sehat	1,80%	

6.	Meningkatnyarumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%	
7.	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,88%	
8.	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%	
		Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	20%	
		Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	8,70%	
9.	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67,01%	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,84%	
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74%	
10.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	54,5%	Bidang Tata Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	98%	
11.	Meningkatnya pengelolaan Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	Bidang Pertanahan
		Persentase terkonsolidasi tanah Kabupaten Tanah Laut	100%	

Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.10**  
**Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7Dokumen	Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Laporan	
2	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta adminitrasi SDM SKPD	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 buah Mobil Dinas Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT, 16 Orang TTK	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	
5	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 Dokumen	Sub bagian Keuangan
6	Meningkatkan retribusi jasa sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 95.000.000,-	Kepala UPT Laboratorium
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 405.000.000,-	

8	Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Material Konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah	Sub Bagian TU UPT Peralatan
9	Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	
10	Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	165 Pelayanan	
	Melakukan fasilitas peningkatan SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	10 orang	

**F. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

Pada tahun anggaran 2023 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 19 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 program dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>43,942,846.00</b>
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43,942,846.00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,999,264.00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,943,582.00
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,619,510,336.00</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,559,845,999.00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59,665,336.00

<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,521,400,995.00</b>
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,995,782.00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	732,168,493.00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,236,720.00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00
10	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708,000,000.00
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,766,124,514.00</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439,048,274.00
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,327,076,240.00
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231,848,000.00</b>
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,016,000.00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,832,000.00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
<b>B</b>	<b>BIDANG BINA MARGA</b>	<b>215,893,836,106.00</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>215,893,836,106.00</b>
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>215,893,836,106.00</b>
18	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,415,900,000.00
19	Pembangunan Jalan	34,702,240,543.00
20	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1,514,067,409.00
21	Rekonstruksi Jalan	73,666,378,107.00
22	Rehabilitasi Jalan	60,799,093,655.00
23	Pemeliharaan Rutin Jalan	12,559,874,736.00
24	Pembangunan Jembatan	7,643,828,035.00
25	Penggantian Jembatan	12,708,118,397.00
26	Rehabilitasi Jembatan	475,092,000.00
27	Pemeliharaan Rutin Jembatan	8,683,237,224.00

<b>C</b>	<b>BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI</b>	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>34,682,341,902.00</b>
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34,682,341,902.00</b>
28	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	381,818,182.00
29	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,148,454,547.00
30	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	28,152,069,173.00
31	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
32	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>25,752,469,834.00</b>
<b>10</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,752,469,834.00</b>
33	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	25,752,469,834.00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>126,142,920,841.00</b>
<b>11</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>126,142,920,841.00</b>
34	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	126,142,920,841.00
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>415,000,000.00</b>
<b>13</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>415,000,000.00</b>
35	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	415,000,000.00
<b>D</b>	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>88,539,525,514.00</b>
<b>14</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51,462,796,406.00</b>
36	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,518,693,289.00
37	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,348,196,560.00
38	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13,216,088,484.00
39	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25,649,938,530.00
40	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,134,898,385.00
41	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2,524,926,101.00

42	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	70,055,057.00
<b>15</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37,076,729,108.00</b>
43	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	499,098,380.00
44	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4,949,264,752.00
45	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	18,998,173,634.00
46	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11,454,516,810.00
47	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1,175,675,523.00
<b>E</b>	<b>BIDANG TATA RUANG</b>	<b>3,661,738,637.00</b>
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3,661,738,637.00</b>
<b>16</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>3,517,340,828.00</b>
48	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	604,660,621.00
49	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,912,680,207.00
<b>17</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144,397,809.00</b>
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	144,397,809.00
<b>F</b>	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>3,078,604,760.00</b>
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>1,170,848,401.00</b>
<b>18</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,170,848,401.00</b>
51	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,956,000.00
52	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	820,892,401.00
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>1,907,756,359.00</b>
<b>19</b>	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,907,756,359.00</b>
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1,907,756,359.00
<b>G</b>	<b>UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN LAB KONSTRUKSI</b>	<b>560,888,562.00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>560,888,562.00</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105,222,000.00</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105,222,000.00
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>14,985,039.00</b>

2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,987,310.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,997,729.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>60,000,000.00</b>
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16,167,200.00</b>
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,167,200.00
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>364,514,323.00</b>
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136,774,200.00
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	227,740,123.00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### A. AKUNTABILITAS KINERJA

##### 1. Sasaran RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Misi V yaitu Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yaitu pada sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dimana target dan realisasi sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Bupati Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD 2019-2023 yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Strategis RPJMD Yang Diampu Dinas PUPRP**

VISI ke 5	Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	
Sasaran Strategis	Meningkat infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

### Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Yang Berkualitas.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, dimana realisasi dan capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 Pada Dinas PUPRP**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik	Km	1,400,693	975,97	64,67%
2	Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1,826.63	1.342,15	73,48%
3	Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter)	Meter	513,259.92	513,259.92	100.00
4	Jumlah Panjang Irigasi (meter)	Meter	753,940.13	753,940.13	100.00
5	Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar)	Hektar	17,503	17,503	100.00
6	Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter)	Hektar	25,685.98	17,503	68,14

7	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	95,349.00	95,569.20	100.23
8	Jumlah Panjang Drainase	Meter	21.247	21.247	100%
9	Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun)	Liter	7.459.432.000	7.480.339.200	100,28%
10	Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun)	Liter	10.114.062.400	10.114.062.400	100%
11	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	KK	65.455	65.455	100%
12	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah	KK	69.020	69.020	100%
13	Panjang Jalan Di Perkotaan	Km	345,18	251,23	72,78
14	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Buah	496	496	100.00
15	Jumlah Gedung Kantor	Buah	503	503	100.00

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

##### a. Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik.

Pada tahun 2023 indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 1.400,69 km dan telah terealisasi sepanjang 908,81 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik adalah sebesar 64,88%.

##### b. Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan.

Pada tahun 2023 indikator jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan Kabupaten Tahun 2015 sepanjang 1826,63 km, namun pada tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah panjang jalan, maka jumlah panjang jalan keseluruhan adalah tetap yaitu sepanjang 1826,63 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang jalan keseluruhan adalah sebesar 100%. Dengan kondisi jalan mantap sebesar 69,64%.

##### c. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter).

Pada tahun 2023 indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 521.500,389 meter dan telah teralisasi sepanjang 521.500,389 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 100%.

d. Jumlah Panjang Irigasi.

Pada tahun 2023 indikator jumlah panjang irigasi ditargetkan sepanjang 753.940,132 meter dan telah teralisasi sepanjang 753.940,132 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi adalah sebesar 100%.

e. Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar).

Pada tahun 2023 indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi ditargetkan seluas 17.503 hektar dan telah terealisasi seluas 17.503 hektar, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi adalah sebesar 100%.

f. Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter).

Pada 2023 indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi ditargetkan seluas 17.503 meter dan telah terealisasi seluas 17.503 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi adalah sebesar 100%.

g. Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik.

Pada indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 target panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 95.349,00 meter dan telah terealisasi sepanjang 95.569,20 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik adalah sebesar 100,23%.

h. Jumlah Panjang Drainase.

Pada indikator jumlah panjang drainase pada tahun 2023 target panjang drainase sepanjang 21.247 meter dan telah terealisasi sepanjang 21.247 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang drainase adalah 100%.

i. Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun).

Pada indikator kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2023 target kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sebanyak 7.459.432.000 liter/tahun dan telah terealisasi sebanyak 7.459.432.000 liter/tahun, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani adalah 100%.

j. Jumlah Kebutuhan Air Baku (liter/tahun).

Pada indikator jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2023 target kebutuhan air baku sebanyak 10.114.062.400 liter/tahun dan telah terealisasi sebanyak 10.114.062.400 liter/tahun, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kebutuhan air baku adalah 100%.

k. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih pada tahun 2023 target rumah tangga berakses air bersih sebanyak 65.455 KK dan telah terealisasi sebanyak 65.455 KK, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih adalah 100%.

l. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah.

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah pada tahun 2023 target rumah tangga berakses air limbah sebanyak 69.020 KK dan telah terealisasi sebanyak 69.020 KK, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah adalah 100%.

m. Panjang Jalan Di Perkotaan.

Untuk tahun 2023 panjang jalan di perkotaan ditargetkan sepanjang 409,706 km dan telah terealisasi sepanjang 283,95 km, sehingga dapat dilihat capaian indikator panjang jalan diperkotaan adalah sebesar 82.26%.

n. Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.

Pada indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik pada tahun 2023 target gedung kantor dalam kondisi baik adalah sebanyak 428 buah dan telah direalisasikan sebanyak 462 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik adalah 107,94%.

o. Jumlah Gedung Kantor.

Pada indikator jumlah gedung kantor pada tahun 2023 target gedung kantor dalam kondisi baik adalah sebanyak 503 buah dan telah direalisasikan sebanyak 503 buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah gedung kantor adalah 100%.

Sedangkan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2018 - 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

### a. Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik.

Jalan lokal primer dalam kondisi baik, target pembangunan jalan yang ditetapkan yaitu sepanjang 1.400,69 km, dimana untuk tahun 2018 mampu terealisasi sepanjang 576,311 km atau sebesar 41,66%, tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 565,014 km atau sebesar 40,36%, tahun 2020 mampu terealisasi sepanjang 831,915 km atau sebesar 45,54%, tahun 2021 mampu terealisasi sepanjang 931,07 km atau sebesar 66,52%, tahun 2022 terealisasi sepanjang 975,17 km atau sebesar 69,67%, kemudian tahun 2023 terealisasi sepanjang 908,81 km atau sebesar 64,88% dari target yang telah ditetapkan sehingga realisasi kinerja untuk tahun 2023 mengalami penurunan.

### b. Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan.

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 1826,63 km, tahun 2023 tidak ada perubahan pada SK Jalan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1826,63 km. Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi pada tahun 2018 kondisi jalan mantap sepanjang 928,29 km atau sebesar 50,82%, tahun 2019 sepanjang 969,02 km atau sebesar 53,05%, 2020 sepanjang 1077,71 km atau sebesar 59%, tahun 2021 sepanjang 1180,19 km atau sebesar 64,61%, tahun 2022 sepanjang 1342,15 km atau sebesar 73,48%, kemudian pada tahun 2023 sepanjang 1272,07 Km atau sebesar 69,64% dari target yang telah ditetapkan. Jadi realisasi kinerja untuk tahun 2023 menurun sepanjang 70,08 km dan capaian kinerja untuk tahun 2023 menurun sebesar 3,84% dari tahun lalu.

### c. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter).

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan realisasi panjang irigasi dalam kondisi baik, sampai dengan tahun 2022 kenaikannya sepanjang 8.734,161meter, kemudian pada

tahun 2023 ada peningkatan terhadap jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik yaitu sepanjang 8.240,468 meter, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi sepanjang 521.500,389 meter.

d. Jumlah Panjang Irigasi.

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada kenaikan target panjang irigasi, dikarenakan adanya inventarisasi bidang SDA sehingga pada tahun 2023 panjang irigasi sampai adalah 753.940,132 meter.

e. Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar).

Untuk indikator jumlah luas areal yang dilayani irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 target luas areal yang dilayani irigasi tetap yaitu seluas 17.503 hektar, dikarenakan pada tahun 2023 tidak peningkatan terhadap jumlah realisasi luas areal yang dilayani irigasi 17.503 hektar, sehingga sampai dengan tahun 2023 luas areal yang dilayani irigasi tidak ada perubahan.

f. Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter).

Untuk indikator jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi dari tahun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 target luas areal yang harus dilayani irigasi adalah tetap, yang mana dari target tersebut mampu terealisasi seluruhnya, sehingga sampai dengan tahun 2023 luas areal yang harus dilayani irigasi adalah tetap.

g. Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik.

Untuk indikator jumlah panjang drainase dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ada kenaikan, pada tahun 2023 ada kenaikan sepanjang 21.247 meter, sehingga panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 adalah menjadi 118.141 meter.

h. Jumlah Panjang Drainase.

Untuk indikator jumlah panjang drainase dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ada kenaikan, dimana tahun 2023 kenaikannya sepanjang 21.247 meter yang mana kenaikan tersebut mampu menambah jumlah panjang drainase di Kabupaten Tanah Laut, sehingga panjang drainase sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi 118.141 meter.

i. Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun).

Untuk indikator jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ada kenaikan, dimana tahun 2023 kenaikannya sebanyak 188.048.000 liter/tahun yang mana kenaikan tersebut mampu menambah kebutuhan air baku yang dapat dilayani, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi 7.459.432.000 liter/tahun.

j. Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun).

Untuk untuk indikator jumlah kebutuhan air baku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sama dengan tahun 2022 adalah 10.114.062.400 liter/tahun.

k. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih.

Untuk indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ada kenaikan, dimana tahun 2023 kenaikannya sebanyak 3200 KK yang mana kenaikan tersebut mampu terlayani seluruhnya, sehingga rumah tangga berakses air bersih sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi sebanyak 65.455 KK.

l. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah.

Untuk indikator jumlah rumah tangga berakses air limbah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ada kenaikan, dimana tahun 2023 kenaikannya sebanyak 5.438 KK yang mana kenaikan tersebut mampu terlayani seluruhnya, sehingga rumah tangga berakses air limbah sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi sebanyak 69.020 KK.

m. Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ada kenaikan, dimana tahun 2023 kenaikannya sebanyak 43 konstruksi, yang mana kenaikan tersebut mampu terbangun seluruhnya, sehingga jumlah gedung kantor dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi sebanyak 503 buah.

n. Jumlah Gedung Kantor.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan, dimana tahun 2023 kenaikannya sebanyak 7 konstruksi, yang mana kenaikan tersebut mampu terbangun seluruhnya, sehingga jumlah gedung kantor sampai dengan tahun 2023 adalah meningkat menjadi sebanyak 503 buah.

o. Panjang Jalan Di Perkotaan.

Untuk panjang jalan di perkotaan dari target pembangunan jalan yang ditetapkan yaitu sepanjang 345,18 km, Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi di tahun 2018 kondisi jalan mantap di perkotaan sepanjang 234,015 km atau sebesar 67,80%, tahun 2019 sepanjang 257,781 km atau sebesar 74,68%, tahun 2020 sepanjang 258,9 atau sebesar 75,05%. Pada tahun 2021 sepanjang 261,31 km atau sebesar 75,70% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 sepanjang 283.95 km atau sebesar 82,26% dari target yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2023 sepanjang 251,23 km atau sebesar 72,78% dari target yang telah ditetapkan. Jadi realisasi kinerja untuk tahun 2023 menurun sepanjang 32,72 km dan capaian kinerja untuk tahun 2023 menurun sebesar 9,48% dari tahun lalu.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Pada indikator jalan lokal primer dalam kondisi baik, jumlah panjang jalan keseluruhan dan panjang jalan diperkotaan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,79% untuk jalan lokal primer dalam kondisi baik, penurunan ini dikarenakan perubahan kondisi jalan dari kondisi rusak ke kondisi baik.
- b. Pada indikator jumlah panjang jalan keseluruhan pada tahun 2023 tidak mengalami penurunan/peningkatan dikarenakan sesuai dengan SK jalan Kabupaten yaitu 1826,633 Km.
- c. Pada indikator panjang jalan diperkotaan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,48% hal ini terjadi karena penurunan kondisi jalan dari kondisi baik ke kondisi rusak lebih banyak dari pada pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di perkotaan sehingga terjadi penurunan kondisi panjang jalan mantap diperkotaan.

## d. Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sepanjang 8.734,161 meter, Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sepanjang 8.240,468 meter, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dilaksanakannya rehabilitasi jaringan irigasi dengan kondisi rusak menjadi kondisi baik, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 adalah menurun menjadi sepanjang 521.500,389 meter.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{P \text{ baik}}{P \text{ irigasi}}$$

Dimana:

P baik = Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

P irigasi = Panjang Irigasi

Semakin tinggi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi menyebabkan peningkatan perbaikan irigasi pada saluran primer, sekunder, tersier, suplesi dan pembuang untuk meningkatkan nilai panjang irigasi dalam kondisi baik.

## e. Jumlah Panjang Irigasi.

Jumlah panjang irigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sama, yang mana sampai dengan tahun 2022 tidak terjadi peningkatan/penurunan, dan pada tahun 2023 tidak terjadi penurunan target sesuai dengan data inventarisasi bidang SDA, sehingga panjang irigasi sampai dengan tahun 2022 adalah tetap menjadi 753.940,132 meter.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{P}{P \text{ irigasi}}$$

Dimana:

P = Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

P irigasi = Panjang Irigasi

Tidak adanya pengembangan irigasi menyebabkan Panjang saluran irigasi (primer, sekunder, tersier, suplesi dan pembuang tidak mengalami perubahan.

- f. Jumlah luas areal yang telah dilayani irigasi pada tahun 2023 sekitar 100% dari seluruh area yang harus dilayani yaitu sekitar 17.503 Ha.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$L = \frac{L \text{ fungsional}}{L \text{ potensial}}$$

Dimana:

L fungsional = Luas Areal yang Dilayani Irigasi

L potensial = Luas potensial Irigasi

- g. Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 mengalami peningkatan sepanjang 21.247 meter atau sebesar 6,47 %.
- h. Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7.459.432.000 liter/tahun, sehingga kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2023 sebesar 10.144.062.400 liter.
- i. Jumlah rumah tangga berakses air bersih sudah mengalami peningkatan sekitar 3200 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu sekitar 65.455 rumah tangga.
- j. Jumlah rumah tangga berakses air limbah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sekitar 5.438 rumah tangga. Dimana pada tahun 2023 jumlah rumah tangga berakses air limbah yang terealisasi adalah 5.438 rumah tangga sehingga jumlah seluruh rumah tangga berakses air limbah yang terealisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 69.020.

### Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Adapun realisasi

dan target sasaran RPJMD tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Target, Realisasi dan Sasaran Yang Diampu Oleh DPUPRP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	97%	98	94,79	96,94

1) Perbandingan Realisasi dengan Target.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 94,79% dari target 98% sehingga capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 96,94%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Luas permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pada tahun 2023 terealisasi sebesar 94,79% dari yang ditargetkan juga sebesar 98%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah 96,94% lebih rendah dari capaian Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80% dari target 81%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 94,79%, sedangkan tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 97%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah menurun sebesar 2,21%.

### 3) Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut memiliki luas 363.135 hektar yang terbagi dalam beberapa indikasi pola ruang. Adapun indikasi pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kawasan lindung terdiri dari:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan pantai;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan sungai;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan danau dan waduk;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan mata air;
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sepadan irigasi;
- i. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
- j. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
- k. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
- l. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
- m. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan wisata alam;
- n. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- o. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- p. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- q. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- r. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

#### 2. Kawasan budidaya terdiri dari:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perindustrian;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasanbperuntukan lainnya.

Berdasarkan indikasi pola uang diatas, yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting terindikasi seluas  $\pm 3\%$  dari luas permohonan pemanfaatan ruang yang di mohonkan atau seluas  $\pm 927,64$  Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang yang telah berkesesuaian dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR mencapai  $\pm 97\%$  atau seluas  $\pm 30.938,02$  Ha.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036 dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan proses legalisasi revisi Peraturan Daerah tersebut. Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan 3 Peraturan Bupati yaitu:

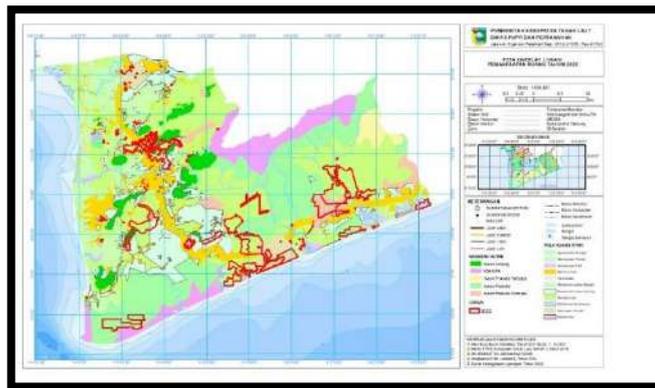
- 1). Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042
- 2). Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042
- 3). Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022.
- 4) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jorong.
- 5) Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Detail di Sekitar awasan Industri Jorong.

Dengan dasar Perda dan Perbub tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

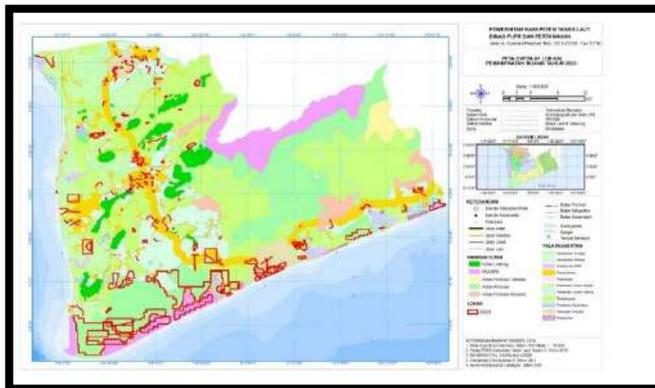
- 1). Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2). mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib melakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.

- 3). Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4). Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

**Gambar 3.1**  
**Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022**



**Gambar 3.2**  
**Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2023**



## 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 195 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan infrastruktur ke pu an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%	69,64%	81,93
		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68	67,62	107,89
		3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,17%	69,17%	100
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	31,74%	31,74%	100%
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	75,02%	75,02%	100%
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	98	94,79	96,94
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100	100	100
5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	100	100	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Target**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	64,61	73,48	85%	69,64%	81,93
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	51,96	63,09	62,68	67,62	107,89
3	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	67	68,077	68,01%	69,17%	100
4	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	14,46	28,44	31,74%	31,74%	100%
5	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	53,28	73,45	75,02%	75,02%	100%

6	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase	87	92	98	94,79	96,94
7	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100	100	100	100	100
8	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100%	100	100	100

### 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Capaian Dinas PUPR Provinsi Kalsel

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	DPUPRP Kab. Tanah Laut Tahun 2023			DPUPR Prov. Kalsel Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	85	69,64	81,93	80	81,63	102,03
2	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67,01	68,077	101,49	54,03	53,95	99,85
3	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persen	31,74	31,74	100	88,68	88,68	100
4	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persen	75,02	75,02	100	90	88,28	98,09
5	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persen	92	92	100	81	80	98,76
6	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	100	100	100	108,43	108,43

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

#### SASARAN 1 : Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an.

Sasaran meningkatkan infrastruktur ke PU an diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP**

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	85%	69,64%	81,93
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	62,68%	67,62%	107,89
3	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	69,17%	69,17%	100

### 1. Perbandingan Realisasi dan Target.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pencapaian indikator kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2023 terealisasi sebesar 69,64% dari panjang jalan 1826,633 km atau terealisasi sepanjang 1272,07 km, dari yang ditargetkan sebesar 85% atau sepanjang 1.552,63 km, sehingga dapat dilihat capaian kinerja jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 81,93%.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023 terealisasi sebesar 63,09% atau terealisasi sebanyak 9 Unit dari seluruh jembatan 114 Unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 107,89%.

c. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2023 terealisasi sebesar 69,17% dari yang ditargetkan juga sebesar 67,01%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 101,49%. Lebih tinggi dari Capaian Provinsi Kalimantan Selatan dengan Indikator persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik dengan target pada tahun 2022 direncanakan sebesar 54,03% dan dalam pelaksanaannya realisasinya mencapai 53,95%, dapat disimpulkan bahwa realisasi belum mencapai target dengan capaian kinerja 99,85%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	64,61	73,48	85	69,64	81,93
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	51,96	63,09	62,68	67,62	107,89
3	Persentase Irigasi kabupatne dalam kondisi baik	Persentase	67	68,077	69,17%	69,17%	100

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

### a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)

Realisasi kinerja indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 73,48% dibandingkan tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 69,64% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah menurun sebesar 3,84%

### b. Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Realisasi indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, dimana tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 67,62%, sedangkan tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 63,09% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah meningkat sebesar 4,53%

### c. Realisasi Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2023 terealisasi sebesar 69,17% dari yang ditargetkan sebesar 69,17%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah 100%.

Program kegiatan dan sub yang menjadi headline sasaran indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) dan Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap diatas adalah Program Penyelenggaraan Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota di Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Sub Kegiatan

Rekonstruksi Jalan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan. Sedangkan Program kegiatan dan sub yang menjadi headline sasaran pada indikator Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik diatas adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Kondisi Jalan kabupaten banyak mengalami kerusakan.
2. Jalan rusak sebelum umur layannya tercapai, dikarenakan Faktor Eksternal Seperti Bencana Alam, serta Muatan melebihi batas maksomial (tonase) pada kendaraan besar yang melewati Jalan Kabupaten menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.
3. Kurang maksimalnya pelaksanaan pemeliharaan Jalan karena beberapa pekerjaan tidak dapat tuntas dikerjakan seperti desain full perencanaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya:

1. Memaksimalkan anggaran yang ada, menyelesaikan seluruh pekerjaan yang sudah ditargetkan dan direncanakan.
2. Memaksimalkan Pengawasan Pekerjaan Baik Melalui Konsultan Pengawas dan Tim Teknis Pekerjaan serta Pendampingan dan lain lain.
3. memaksimalkan pelaksanaan pemeliharaan rutin agar lebih tepat sasaran.

## **SASARAN 2 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Yang Mencakup Air Minum Dan Sanitasi.**

Sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum dan sanitasi diukur melalui 2 (dua) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 IKU DPUPRP**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	31,74%	31,74%	100%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	75,02	75,02	100%

## 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

## a. Persentase penduduk berakses air minum layak.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum layak tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 75,19 % sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar 73,71% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 75,19%. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2023 sebesar 65.455 KK dan teralisasi sebesar 65.455 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.569 KK. sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang baik adalah meningkat sebesar 75,19%. Dan untuk capaian air minum sehat pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 31,74% sesuai dengan target sebesar 31,74%. Untuk total semua capaian masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dengan target indikator cakupan pelayanan air minum yang layak pada tahun 2023 terealisasi sebesar 88,68% dari target 88,68%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%

## b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik tahun 2023 terealisasi sebesar 75,02% dari yang ditargetkan sebesar 75,02%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah 100%. Sebagai Perbandingan pada capaian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 realisasi indikator cakupan pelayanan air limbah yang layak terealisasi sebesar 88,28% dari target 90,00% atau besar capaian kinerja sebesar 98,09%73,38%

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	14,46	28,44	31,74%	31,74%	100%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	53,28	73,38	75,02%	75,02	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

### a. Persentase penduduk berakses air minum sehat.

Indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum layak tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,71% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 42,18% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 75,19%. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2023 sebesar 65.455 KK dan teralisasi sebesar 65.455 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.569 KK. Dan untuk capaian air minum sehat pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 31,74% sesuai dengan target sebesar 31,74%. Sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang baik adalah meningkat sebesar 75,19%.

### b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,38% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 53,28% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah meningkat sebesar 75,02%.

## 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

### a. Persentase penduduk yang berakses air minum layak.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk yang berakses air minum sehat, tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan bahwa adanya program batuan SPAM berbasis masyarakat serta adanya hibah air minum perdesaan dari Kementerian PUPR. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM Perdesaan dan Perkotaan.

### b. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi baik, tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan karena adanya kegiatan DAK Sanitasi. Dengan adanya anggaran

dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik baik menggunakan dana APBD maupun dana hibah dari pusat/DAK.

Program kegiatan dan sub yang menjadi headline sasaran indikator Persentase penduduk berakses air minum sehat diatas adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota di Sub Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sedangkan yang menjadi headline sasaran indikator Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik diatas adalah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Sub Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan sanitasi yang baik.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki baik secara jumlah ataupun kemampuan keilmuan secara teknis, sehingga kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan sanitasi yang baik.
2. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur jadwal pengawasan serta lebih memaksimalkan PTT yang dimiliki.

### SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW.

Sasaran meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW diukur dengan 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	Persentase	98	94,79	96,94

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 94,79% dari target awal 98% sehingga capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 96,94%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Luas permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2023 terealisasi sebesar 94,79% dari yang ditargetkan sebesar 98%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten adalah sebesar 96,94%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	Persentase	87	105	98%	94,79%	96,94

### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2023 realisasinya mengalami peningpenurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 97%, sedangkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 87% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten mengalami penurunan sebesar 2,21%.

### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Realisasi yang dicapai tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya berupaya meningkatkan

persentase kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten dari target yang ada.

Program kegiatan dan sub yang menjadi headline sasaran diatas adalah Program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kegiatan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ryang (RRTR) Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

- 1). Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2). mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib melakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3). Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4). Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

#### **SASARAN 4 : Meningkatkan Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut.**

Sasaran meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100%	100%	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah sebesar 100%, sebagai perbandingan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan Untuk realisasi kinerja pada tahun 2023 ini tetap dari realisasi kinerja tahun 2022 karena realisasi pada tahun 2022 sebesar 100% sedangkan pada 2023 ini realisasinya sebesar 100%.

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana :

a = Jumlah sengketa Tanah Yang ditangani

b = Jumlah pengadua tanah sengketa garapan

Dari % data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dimana untuk target jumlah pengaduan sengketa tanah ada sebanyak 3 Dokumen dan untuk Realisasi penyelesaian sengketa tanag yang di tangani adalah sebanyak 3 dengan capaian persentase realisasi sebesar 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 IKU DPUPRP**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan adalah tetap sebesar 100%.

## 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya tidak mengalami peningkatan/penurunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan Permasalahan Lahan Pemerintah Daerah RSUD Hadji Boejasin dengan PT. PEREMBE di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

1. Permasalahan Permasalahan Lahan Pemerintah Daerah RSUD Hadji Boejasin dengan PT. PEREMBE di Kecamatan Pelaihari.
2. Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kecamatan Bati-Bati.
3. Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kecamatan Tambang Ulang.

Program kegiatan dan sub yang menjadi headline sasaran diatas adalah Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, di Sub Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas diantaranya :

1. Tumpang tindih alas hak/sertifikat.
2. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
3. Pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban memelihara tanda-tanda batas tanah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan data secara akurat dan komprehensif.

2. Perlu ditelusuri status tanah tersebut melalui data yang dimiliki oleh BPN atau kelurahan/Desa. Melakukan pengukuran dan pencantuman titik koordinat batas-batas tanah.

**SASARAN 5 : Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut.**

Sasaran meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 100%.

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana :

a = Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan

b = Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab. Tanah Laut

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dimana untuk target dokumen Konsolidasi tanah adalah 2 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen Konsolidasi tanah yang dilaksanakan adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Kurau dan Dokumen PTSL 2023 dengan capaian persentase sebesar 100%

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17**  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 realisasinya adalah sama dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu 100% dari yang masing-masing ditargetkan. Kegiatan pada indikator ini adalah terkait Inventarisasi data asset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana pada tahun 2023 dengan target 2 dokumen yaitu 1 Dokumen inventarisasi Asset Pemda pada Kecamatan Kurau telah terelaisasi 100% dan 1 Dokumen Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut telah terealisasi 100%, dan pada tahun 2022 dengan target 2 dokumen pada 1 dokumen untuk Inventarisasi asset di Kecamatan Tambang Ulang dan 1 Dokumen Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut telah terealisasi 100%.

Program kegiatan dan sub yang menjadi headline sasaran diatas adalah Program Program Penatagunaan Tanah di Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, di Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya adalah :

1. Kurangnya personil tenaga ukur dilapangan
2. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya adalah :

1. Menambah waktu pengukuran dilapangan.

2. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut.

### 3. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, didukung dengan 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 3.078.604.760,- dan terealisasi sebesar Rp.2.843.461.627,- atau 92,36%.

Adapun realisasi program dan kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Jumlah SDM DPUPRP**

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6		
A	<b>SEKRETARIAT</b>				11	17	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>43,942,846</b>					
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43,942,846</b>					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,999,264	19,059,800	86.64			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,943,582	10,168,250	46.34			
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,589,257,336</b>					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,559,845,999	8,496,567,682	88.88			
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29,412,336	26,497,600	90.09			
3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>					
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0					
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,651343,995</b>					
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,995,782	9,687,000	88.10			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	732,168,493	653,591,250	89.27			
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,236,720	51,020,000	89.14			
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-				
10	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	9,500,000				

11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840,943,000	810,015,582	96.32			
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,766,124,514</b>					
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439,048,274	417,886,050	95.18			
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0					
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,327,076,240	2,292,661,406	98.52			
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231,848,000</b>					
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,016,000	9,578,250	86.95			
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220,832,000	186,719,600	84.55			
		0					
<b>B</b>	<b>BIDANG BINA MARGA</b>				<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>216,167,830,106</b>					
<b>1</b>	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,415,900,000	3,238,407,000	94.80			
1	Pembangunan Jalan	34,702,240,543	14,098,791,993	40.63			
2	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1,514,067,409	1,471,255,000	97.17			
2	Rekonstruksi Jalan	73,666,378,107	70,994,487,231	96.37			
3	Rehabilitasi Jalan	60,799,093,655	57,482,789,652	94.55			
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	12,559,874,736	12,372,646,760	98.51			
3	Pembangunan Jembatan	7,643,828,035	7,171,476,992	93.82			
5	Penggantian Jembatan	12,708,118,397	11,789,780,978	92.77			
4	Rehabilitasi Jembatan	475,092,000	373,496,080	78.62			
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	8,683,237,224	8,276,400,574	95.31			
	Total	<b>216,167,830,106</b>	<b>187,269,532,260</b>				
<b>C</b>	<b>BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>50,309,587,356</b>			<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50,309,587,356</b>					
1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	381,818,182	361,937,600	94.79			

2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,148,454,547	5,591,096,500	90.93			
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	28,779,314,627	26,490,842,100	92.05			
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15,000,000,000	14,210,119,841	94.73			
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>4,637,200,000</b>					
3	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,637,200,000</b>					
5	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4,637,200,000	4,623,000,000	99.69			
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>25,752,469,834</b>					
6	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,752,469,834</b>					
9	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	25,752,469,834	23,645,378,100	91.82			
10	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>126,142,920,841</b>					
11	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>126,142,920,841</b>					
5	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	126,142,920,841	120,295,629,182	95.36			
6	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>415,000,000</b>					
15	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>415,000,000</b>					
16	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	415,000,000	361,505,685	87.11			
	Total	<b>207,257,178,031</b>	<b>195,579,509,008</b>				
<b>D</b>	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>						
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>88,539,525,514</b>			<b>10</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51,462,796,407</b>					
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,518,693,289	1,304,931,513	85.92			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,348,196,560	2,233,313,000	95.11			
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13,216,088,484	12,823,187,000	97.03			
2	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25,649,938,531	23,501,660,900	91.62			
3	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,134,898,385	5,664,646,000	92.33			

4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2,524,926,101	2,484,732,950	98.41			
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	70,055,057	41,947,500	59.88			
5	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37,076,729,099</b>					
4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	499,098,380	484,026,000	96.98			
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4,949,264,752	4,625,286,000	94.00			
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	18,998,173,634	18,048,079,000	95.00			
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11,454,516,810	10,737,595,244	93.74			
9	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1,175,675,523	1,044,254,771	88.82			
	Total	<b>88,593,525,506</b>	<b>83,020,659,878</b>				
<b>E</b>	<b>BIDANG TATA RUANG</b>						
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3,661,738,637</b>			<b>11</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>3,517,340,828</b>					
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	604,660,621	442,139,438	73.12			
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,912,680,207	2,608,538,964	89.56			
2	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144,397,809</b>					
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	144,397,809	97,101,250	67.25			
	Total	<b>3,661,738,637</b>	<b>3,147,779,652</b>				
<b>F</b>	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>						
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>1,170,848,401</b>			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,170,848,401</b>					
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,956,000	274,360,147		78.40		
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	820,892,401	684,495,280		83.38		
2	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>1,907,756,359</b>					
2	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,907,756,359</b>					

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1,907,756,359	1,884,606,200		98.79		
	Total	<b>3,078,604,76</b>	<b>2,843,461,627</b>				
<b>G</b>	<b>UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI</b>					<b>8</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>91,092,000</b>					
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>91,092,000</b>					
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,092,000	66,810,000	73.34			
2	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74,985,041</b>					
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,987,312	6,862,000	68.71			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,997,729	2,985,500	59.74			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000	57,985,359	96.64			
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16,167,200</b>					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,167,200	11,802,000	73.00			
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>475,365,583</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,432,100	84,377,950	62.77			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	227,740,123	205,972,000	90.44			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113,193,360	102,352,000	90.42			
	Total						

#### 4. Indikator Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

##### ❖ SEKRETARIAT

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 pada Sekretariat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.19**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Sekeratriat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	<b>SEKRETARIS</b>				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPUPRP	Nilai SAKIP DPUPRP	80,05	76,6	95,69
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100
3	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100
	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>				
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	100
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	100
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100
	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>				
1	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan</b>				
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja disusun tepat waktu dan sesuai	5 Laporan	5 Laporan	100

### ❖ Sekretaris

#### Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.

Pada sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.20**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023
----	-------------------	------------

		Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	80,05	76,6	95,69

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUPRP tahun 2022 mampu memperoleh penilaian untuk SAKIP yaitu dengan nilai 76,6 mengalami peningkatan dari nilai yang ditargetkan yaitu dengan nilai 80,05, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP adalah 95,69%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.21**  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	72,07	74,6	80,05	76,6	95,69

### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 76,6 sedangkan tahun 2022 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 74,6, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan sebesar 2%.

### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan dimana penilaian pada Laporan Kinerja yang disampaikan ada komponen yang menjadi penilaiannya yaitu pada komponen pencapaian kinerja nilainya masih rendah berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kab. Tanah Laut, akan tetapi secara garis besar seluruh komponen yang menjadi penilaian pada Reviu SAKIP nilai yang diperoleh sudah bagus. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman dan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah penyusunan dokumen kinerja, dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah serta laporan SPM.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Sarana Dan Prasarana Dan Administrasi Perkantoran.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3,22**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP DPUPRP	72,07	74,6	80,05	76,6	95,69

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD tahun 2023 terealisasi 100% dari yang ditargetkan 100%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD adalah 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Sekretaris**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	72,07	78,1	100%	100%	100%

### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022, yaitu masing-masing

100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD adalah tetap.

### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD realisasi yang dicapai tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di SKPD, segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang segala pelaksanaan administrasi perkantoran baik terkait peralatan dan perlengkapan kerja maupun kenyamanan ruangan atau pun gedung kantor telah dapat terpenuhi, dimana kegiatan pengecatan gedung kantor dan pengecatan pagar mampu terealisasi dan terselesaikan seluruhnya. Untuk peralatan dan perlengkapan kerja juga mampu terpenuhi secara keseluruhan, seperti meja kerja, kursi rapat, mesin scanner, mesin fotocopi, laptop, hardisk portable, dispenser, kompor gas dan alat tulis kantor, sehingga dapat menunjang kinerja para Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kerja, pengecatan kantor dan pagar kantor, terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan administrasi keuangan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.24**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%	100%	100

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%,

sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target adalah 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.25**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Sekretaris**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100

## 2. Perbandingan Realiasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi inikator kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022, yaitu masing-masing 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target adalah tetap.

## 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase keuangan yang disusun dapat dikatakan bahwa tahun 2023 seluruh dokumen keuangan yang ditargetkan mampu disusun dan diselesaikan seluruhnya. Walaupun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yaitu sering terlambatnya data yang disampaikan ke sub bagian keuangan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut sub bagian keuangan lebih sering mengingatkan kepada bidang dan UPTD untuk segera menyampaikan permintaan data dimaksud sehingga penyusunan laporan dokumen keuangan dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan yang ditargetkan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu penyusunan dokumen laporan keuangan, baik yang triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan kinerja barang/jasa.

❖ **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.****Sasaran 1 : Merencanakan Dan Melaksanakan Pemenuhan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Serta Administrasi SDM SKPD**

Pada sasaran merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.26**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Umpeg**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 buah Mobil Dinas Jabatan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 buah Mobil Dinas Jabatan	100
2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT, 16 Orang TKK	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT, 16 Orang TKK	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani tahun 2023 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya sebanyak 35 Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Buah Jenis dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya yaitu sebanyak 65 orang PNS, 79 Pegawai Tidak Tetap dan 16 orang Tenaga Teknis Kontrak dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.27**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Umpeg**

No	Indikator Kinerja	Realiasi		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	100%
2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT	67 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	65 Orang PNS dan 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan pada tahun 2022, hal ini dimana sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani tidak mengalami penambahan/berkurang, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tetap.

- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pada indikator jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 ada yang mengalami penurunan dan peningkatan yaitu pada jumlah PNS dan jumlah tenaga PTT, hal ini dimana tahun 2023 PNS yang terlayani dan terpenuhi adalah sebanyak 65 orang, kemudian tahun 2022 PNS adalah sebanyak 67 orang PNS sedangkan tahun 2021 sebanyak 71 orang, karena adanya PNS yang memasuki usia pensiun pada tahun 2021. Sedangkan untuk tenaga PTT tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 sebanyak 79 orang PTT serta ada penambahan 11 Orang TTK. Sedangkan tahun 2023 untuk tenaga PTT tidak mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yaitu

sebanyak 79 orang PTT sedangkan untuk Tenaga TTK di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 16 orang.

3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran.

Pada indikator jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran tahun 2023 mampu terealisasi seluruhnya, dimana terpenuhinya segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang segala pelaksanaan administrasi perkantoran, baik terkait peralatan dan perlengkapan kerja maupun kenyamanan/keindahan ruangan maupun gedung kantor.

Gambar 3.3



Peralatan Kerja (Printer)



Peralatan Kerja (TV LED)



Peralatan Kerja (SCANNER)



Peralatan Kerja (Lainnya)



- b. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Pada indikator jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 ada yang mengalami penurunan dan peningkatan yaitu pada jumlah PNS dan jumlah tenaga PTT, hal ini dimana tahun 2023 PNS yang terlayani dan terpenuhi adalah sebanyak 65 orang, kemudian tahun 2022 PNS adalah sebanyak 67 orang PNS sedangkan tahun 2021 sebanyak 71 orang, karena adanya PNS yang memasuki usia pensiun pada tahun 2021. Sedangkan untuk tenaga PTT tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 sebanyak 79 orang PTT serta ada penambahan 11 Orang TTK. Sedangkan tahun 2023 untuk tenaga PTT mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, dimana tahun 2023 sebanyak 79 orang PTT serta ada penambahan orang TTK menjadi 16 orang.

## Sasaran 2 : Melaksanakan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD.

Pada sasaran melaksanakan pemenuhan administrasi perkantoran SKPD diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.28**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 mampu terpenuhi dan terlayani seluruhnya sebanyak 2 jenis layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.29**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kasubbag Umpeg**

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan pada tahun 2022, hal ini dimana jenis layanan yang terpenuhi dan terlayani adalah sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 2 jenis layanan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pelayanan yang dilakukan yaitu sebanyak 2 jenis pelayanan, yaitu pertama pelayanan administrasi kepegawaian terkait surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan administrasi PNS, PTT maupun TTK dan yang pelayanan administrasi umum terkait surat-surat umum, baik surat masuk maupun surat keluar.

❖ **Kepala Sub Bagian Keuangan.**

**Sasaran : Menyusun Administrasi Keuangan SKPD.**

Pada sasaran menyusun administrasi keuangan SKPD diukur melalui 1 indikator yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.30**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	100

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2022 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 4 Dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 4 Dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.31**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kasubbag Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	19 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100

### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

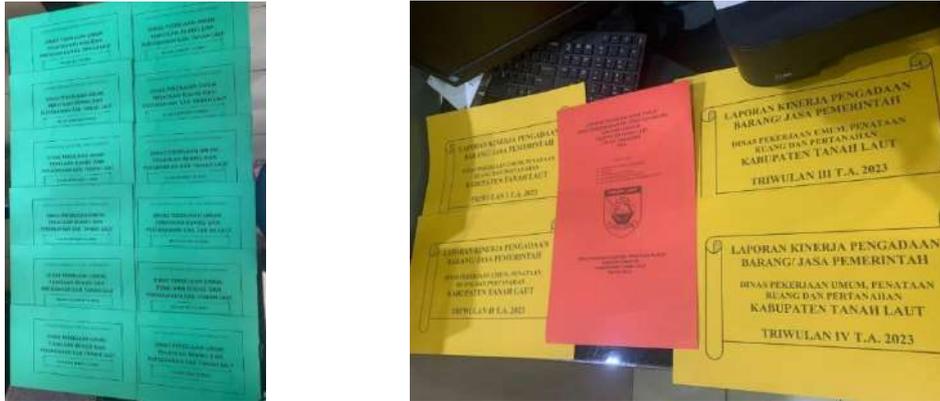
Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2023 tetap dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 203 dari dokumen yang disusun yaitu sebanyak 4 dokumen, sedangkan tahun 2022 dokumen yang disusun yaitu sebanyak 4 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah tetap menjadi 4 dokumen.

### 3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Dari uraian diatas bahwa realisasi pada kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah tetap, namun pada target 2023 mengalami penurunan dikarenakan dokumen-dokumen keuangan yang disusun pada tahun 2023 mengalami penyesuaian target, dimana pada tahun 2022 laporan realisasi fisik dan keuangan yang awalnya berjumlah 12 setelah penyesuaian target pada 2022 berubah menjadi 1 laporan, pada tahun 2021 laporan triwulan yang awalnya berjumlah 4 laporan setelah penyesuaian target pada tahun 2022 berubah menjadi 1 laporan, pada tahun 2022 laporan semester yang awalnya 2 laporan setelah penyesuaian target pada tahun 2023 berubah menjadi 1 laporan, sedangkan untuk

laporan keuangan akhir tahun tetap 1 laporan. Untuk tahun 2023 jumlah dokumen laporan keuangan sama dengan tahun 2022. Dokumen-dokumen yang disusun yaitu dokumen Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari – Desember, Laporan Triwulan I – IV, Laporan Semester dan II, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

**Gambar 3.5**  
**Dokumen Laporan Keuangan Tahunan, Semester, Triwulan dan Bulanan**



❖ **Kepala Sub Bagian Perencanaan.**

**Sasaran : Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD.**

Pada sasaran menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.32**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Laporan	5 Laporan	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2023 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 7

dokumen dari yang ditargetkan juga sebanyak 7 dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%.

- b. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2023 mampu terealisasi seluruhnya sebanyak 5 kegiatan dari yang ditargetkan juga sebanyak 5 kegiatan dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.33**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kasubbag Perencanaan**

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	9 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100
2	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	0	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2023 sama dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi sebanyak 7 dokumen, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebanyak 7 dokumen dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan adalah tetap sebanyak 7 dokumen.

- b. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Realisasi indikator kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan tahun 2023 terealisasi sebagaimana yang ditargetkan yaitu sebanyak 5 Dokumen.

### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencapaian kinerja di Tahun 2023 sebanyak 7 Dokumen, terlihat menurun dibanding Tahun 2022 yaitu sebanyak 7 dokumen, namun dapat dijelaskan bahwa indikator target di tahun 2022 penyusunan laporan kinerja dilaksanakan pada sub kegiatan yang berbeda sehingga ada penyesuaian target dibanding tahun 2022. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2023 adalah tetap dibanding tahun sebelumnya.

- b. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan penyusunan Dokumen Lapoan Kinerja dapat dilaksanakan dengan baik dengan tersusunnya 5 Dokumen Laporan Kinerja.

**Gambar 3.6**  
Beberapa Dokumen Yang Disusun



### 4. Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Sekretariat, didukung dengan 1 program, 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 14,282,516,691,- dan terealisasi sebesar Rp. 12,992,952,470,- atau 85,89%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.34  
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Sekretariat

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	6	4
A	<b>SEKRETARIAT</b>				11	17	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	14,282,516,691	12,992,952,470	90,97			
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	43,942,846.00	29,228,050	66,51			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,999,264.00	19,059,800.00	86.64			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,943,582.00	10,168,250.00	46.34			
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	9,589,257,336.00	8,523,065,282	88,88			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,559,845,999.00	8,496,567,682.00	88.88			
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29,412,336.00	26,497,600.00	90.09			
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1,651,343,995.00	1,533,813,832	92,88			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,995,782.00	9,687,000.00	88.10			
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	732,168,493.00	653,591,250.00	89.27			
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	57,236,720.00	51,020,000.00	89.14			
8	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00	9,500,000.00				
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840,943,000.00	810,015,582.00	96.32			
5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2,766,124,514.00	2,710,547,456	97,99			
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439,048,274.00	417,886,050.00	95.18			
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,327,076,240.00	2,292,661,406.00	98.52			
6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	231,848,000.00	196,297,850	84,67			
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,016,000.00	9,578,250.00	86.95			
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,832,000.00	186,719,600.00	84.55			
	TOTAL						

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Sekretariat diantaranya :

1. Kurang SDM yang dimiliki khusus yang berstatus PNS, baik pada Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan maupun pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
2. Keterlambatan data yang disampaikan oleh bidang dan UPTD baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam penyusunan laporan kinerja, dokumen penganggaran serta data – data lainnya.
3. Data yang disampaikan seringkali berubah – rubah, sehingga menghambat dalam proses penyusunan laporan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memaksimalkan PNS, tenaga PTT dan tenaga TTK yang dimiliki pada sekretariat. .
2. Permintaan data lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan dan lebih sering berkoordinasi kepada bidang dan UPTD terkait data yang diminta.
3. Data yang disampaikan dilakukan penyimpanan baik dalam bentuk file maupun hardcopynya.

#### ❖ BIDANG BINA MARGA

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Bina Marga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.35**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Bina Marga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
	<b>Kepala Bidang Bina Marga</b>				
1	Meningkatnyai infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%	69,64%	81,93
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68	67,62	107,89

#### ❖ Kepala Bidang Bina Marga

**Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Terintegrasi dan Berkualitas Untuk Mendukung Pergerakan Orang, Barang dan Jasa.**

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.36**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%	69,64	81,93
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	62,68	67,62	107,89

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pencapaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 69,64% dari yang ditargetkan sebesar 85%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 81,93%.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 67,62% dari yang ditargetkan juga sebesar 62,68%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 107,89%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.37**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga**

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Target	Tahun 2023	
		2021	2022		Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	64,61%	73,48%	85%	69,64	81,93
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	51,96%	63,09%	62,68	67,62	107,89

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap).

Pencapaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,48% atau terealisasi sepanjang 1342,21 km sedangkan

tahun 2023 hanya terealisasi 69,64% atau teralisasi sepanjang 1272,07 km, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah menurun sebesar 3,84% atau telah berkurang kondisi mantap sepanjang 70,14 km.

b. Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap.

Pencapaian indikator kinerja jembatan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 63,09% sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 67,62%, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap adalah meningkat sebesar 4,53%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap).

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menurun sebesar 3,84%, atau sepanjang 70,14 km dari panjang Jalan Kabupaten 1826,63 km. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan tapi jalan yang mengalami kerusakan lebih banyak.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa jembatan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,92% atau sebanyak 4 Unit sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,13% atau sebanyak 12 Unit. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,53% atau sebanyak 9 Unit. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan penggantian jembatan yang mengalami kerusakan dan seluruh kegiatan yang sudah ditargetkan dan dianggarkan mampu terealisasi seluruhnya.

1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Bina Marga, didukung dengan 1 program, 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan

dengan pagu sebesar Rp. 156,636,096,471,- dan terealisasi sebesar Rp. 150,051,466,661,- atau 95,80%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.38**  
**Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Bina Marga**

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PTT	TTK	
1	2	3	4	5	6			
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>							
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>216,167,830,106</b>			<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>216,167,830,106</b>						
<b>1</b>	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,415,900,000	3,238,407,000	94.80				
1	Pembangunan Jalan	34,702,240,543	14,098,791,993	40.63				
2	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1,514,067,409	1,471,255,000	97.17				
2	Rekonstruksi Jalan	73,666,378,107	70,994,487,231	96.37				
3	Rehabilitasi Jalan	60,799,093,655	57,482,789,652	94.55				
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	12,559,874,736	12,372,646,760	98.51				
3	Pembangunan Jembatan	7,643,828,035	7,171,476,992	93.82				
5	Penggantian Jembatan	12,708,118,397	11,789,780,978	92.77				
4	Rehabilitasi Jembatan	475,092,000	373,496,080	78.62				
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	8,683,237,224	8,276,400,574	95.31				
	Total	<b>216,167,830,106</b>	<b>187,269,532,260</b>					

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Bina Marga diantaranya :

1. Pekerjaan Fisik tertunda karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pada saat pelaksanaan memerlukan adanya Review Design
2. Beberapa pekerjaan yang merupakan hasil musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD tidak termasuk dalam ruas SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.

3. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengakomodir program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Dokumen perencanaan yang masih menjadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) agar dapat segera dikerjakan
2. Prosedur penentuan paket-paket pekerjaan yang disetujui dalam anggaran seharusnya mengakomodir paket pekerjaan yang merupakan ruas jalan dalam SK Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan.
3. Perlu tersedianya anggaran yang mencukupi untuk bidang Bina Marga agar terakomodirnya Program dan Kegiatan bidang Bina Marga.

#### ❖ BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.39**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
	<b>Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi</b>				
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	65.455	65.455	100
		Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	13.553	13.553	100
		Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	31,74	31,74	100
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	75,02	75,02	100
3	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	6,47	6,47	100
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	0,100939329	0,139739791	138,4%

		Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	-	-	-
5	Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	1,61%	0,71%	44%

### ❖ Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Air Bersih.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.40**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid CKJK**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	75,19	75,19	100
2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	46,08	46,08	100
3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	31,74	31,74	100

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

##### a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak pada tahun 2023 terealisasi sebesar 75,19 % dari yang ditargetkan sebesar 75,19%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak adalah 100 %.

##### b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 46,08% dari yang ditargetkan juga sebesar 46,08%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah 100%.

## c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat pada tahun 2023 terealisasi sebesar 31,74% dari yang ditargetkan juga sebesar 31,74%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.41**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kabid CKJK**

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	48,02%	73,71%	75,19	75,19	100
2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	23,70%	43,46%	46,08	46,08	100
3	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	14,46%	28,44%	31,74	31,74	100

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

## a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi kenaikan sebesar 75,19% sedangkan tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 75,19 % dari yang masing-masing ditargetkan.

## b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yaitu mampu terealisasi sebesar 46,08%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah meningkat sebesar 46,08%.

- c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air minum sehat tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 31,74% sedangkan tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 31,74%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dimana kegiatan yang mampu terselesaikan dengan baik, dan adanya dukungan dana dari pusat melalui dana DAK.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah yang pertama pembangunan SPAM dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau sebanyak 2 desa, Kecamatan Takisung sebanyak 2 desa. Dan yang kedua Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan pada 10 kecamatan

- b. Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan program adanya program DAK bidang air minum.

**Gambar 3.6**  
**Pemasangan Sambungan Rumah Desa Raden**



- c. Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan sambungan rumah. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM IKK Takisung dan pembangunan sumur bor. Pada kegiatan pembangunan SPAM yaitu pada Kecamatan Kurau dan Kecamatan Takisung sebanyak 4 desa.

### Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.42**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	75,02	75,02	100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2023 terealisasi sebesar 75,02% dari yang ditargetkan sebesar 75,02%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak adalah 100 %.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.43**  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realiasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	63,79%	73,45%	75,02	75,02	100

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 73,45% sedangkan tahun 2023 terealisasi 75,02 % dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak yaitu sebesar 75,02%.

## 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kegiatan DAK Sanitasi dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik dengan menggunakan anggaran APBD sebanyak 37 unit yaitu pada Desa Martadah, Handil Labuan Amas dan desa Handil Birayang Bawah, Sedangkan pembangunan tangki septik menggunakan anggaran dari dana DAK yaitu pada desa Bingkulu, Desa Liang Anggang, Desa Maluka Baulin, Desa Raden, Desa Riam Adungan, Desa Sungai Rasau, Desa Tambak Karya, Desa Tambak Sarinah, Desa Tampang.

**Gambar 3.7**  
**Sanitasi Perdesaan (Desa Raden dan Desa Bingkulu)**



### Sasaran 3 : Meningkatnya Saluran Drainase Yang Terbangun.

Pada sasaran meningkatnya saluran drainase yang terbangun diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.44**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	6,47	6,47	100

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.45**  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	4,56%	5,23%	6,47	6,47	100

#### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 yaitu mampu terealisasi sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut adalah meningkat sebesar 6,47 %.

#### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal

ini dikarenakan beberapa usulan musrenbang dan pokok pikiran anggota DPRPD Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakomodir pada anggaran perubahan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan drainase dengan menggunakan anggaran APBD murni di 10 kecamatan.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan, pemasangan dan peningkatan drainase lingkungan.

**Gambar 3.8**  
**Pembangunan Drainase (Desa Gunung Makmur dan Desa Bajuin)**



#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.**

Pada sasaran meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.46**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	0,100939329	0,139739791	138,4%
2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	-	-	-

##### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0.031076812% dari yang ditargetkan juga sebesar 0.031076812%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan adalah 0.448896823%.

- b. Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Pencapaian indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota pada tahun 2022 terealisasi sebesar 45% dari yang ditargetkan juga sebesar 45%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.47**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	16,90%	0.11439069 6%	0,10093932 9	0,13973979 1	138,4%
2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	45%	-	-	-

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tahun 2022 sebesar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2021 terealisasi sebesar 16,90% sedangkan tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 0.031076812%, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat realisasi kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tercapai sebesar 0.448896823%.

- b. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota tahun 2022 sebesar 45% tetap dibandingkan dengan tahun 2021, dimana tahun 2022 tetap terealisasi sebesar 45% sama seperti tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 45%, dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat realisasi kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan.

Pada indikator kinerja persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan konstruksi merupakan pendukung dari pekerjaan konstruksi lainnya yang seharusnya dibangun pada tahun 2023 karena beberapa bangunan gedung utama ditangguhkan maka konstruksi pendukung yang seharusnya dibangun tahun 2022 ditunda untuk pelaksanaannya,

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya sebanyak 7 paket gedung/bangunan/fasilitas lainnya, yang terdiri dari beberapa kantor instansi pemerintah (SKPD), beberapa hibah pembangunan sarana pendukung kantor instansi vertikal/lainnya, puskesmas dan beberapa sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

Pada indikator kinerja persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dalam hal pengumpulan data terkait penataan bangunan dan lingkungan dilakukan pada seluruh kecamatan kecuali kecamatan pelaihari.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat, mensosialisasikan perda terkait kota kumuh serta

melakukan pengumpulan data terkait indikator kota/wilayah kumuh di desa sesuai dengan SK Bupati Tanah Laut.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman adalah perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman ditetapkan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat dengan menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**Gambar 3.9**  
**Sosialisasi/Pendampingan Pada Program KOTAKU**



**Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi.**

Pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.48**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	1,61%	0,71%	44%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2023 terealisasi sebesar 0,71% dari yang ditargetkan sebesar 1,61%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah 44%..

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.49**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Kabid CKJK**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	0	0	1,61%	0,71%	44

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi pada indikator persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021/2022, dimana tahun 2023 tidak terealisasi, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah meningkat sebesar 44%.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan sasaran peserta pelatihan

3. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, didukung dengan 6 program, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 86.516.904.811 dan terealisasi sebesar Rp. 79.857.678.472,- atau 92,30%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.50**  
**Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang CKJK**

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM
----	--------------------	------	-----------	-----------	-----

					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6		
A	<b>BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI</b>						
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>50,309,587,356.00</b>			<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50,309,587,356.00</b>					
1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	381,818,182.00	361,937,600.00	94.79			
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,148,454,547.00	5,591,096,500.00	90.93			
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	28,779,314,627.00	26,490,842,100.00	92.05			
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15,000,000,000.00	14,210,119,841.00	94.73			
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>4,637,200,000.00</b>					
3	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,637,200,000.00</b>					
5	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4,637,200,000.00	4,623,000,000	99.69			
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>25,752,469,834.00</b>					
6	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,752,469,834.00</b>					
9	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	25,752,469,834.00	23,645,378,100	91.82			
10	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>126,142,920,841.00</b>					
11	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>126,142,920,841.00</b>					
5	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	126,142,920,841.00	120,295,629,182.00	95.36			
6	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>415,000,000.00</b>					
15	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>415,000,000.00</b>					
16	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	415,000,000.00	361,505,685.00	87.11			
	Total	<b>207,257,178,031.00</b>	<b>195,579,509,008.00</b>				

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi diantaranya :

1. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang luas dan pemukimannya tersebar dalam beberapa wilayah pelayanan pada 11 Kecamatan, sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan.
2. Kurangnya sumber air baku yang tersedia pada Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Panyipatan.
3. Luasnya wilayah pelayanan IKK Pelaihari dan IKK Bajuin, sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, salah satunya kondisi infrastruktur produksi dan distribusi IKK Bajuin yang telah melewati umur ekonomis.
4. Sedang dilakukannya review Perjanjian Kerja Sama / Nota Kesepakatan SPAM Regional Banjarbakula yang harus diperbaharui, dimana saat ini yang beroperasi hanya di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur sedangkan Kecamatan Takisung sedang dalam tahap usulan untuk cakupan layanan.
5. Sedang dalam tahap serah terima asset IPLT Kabupaten Tanah Laut dengan BPPW Kalimantan Selatan yang pendanaannya bersumber dari APBN.

Solusi atau langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain.

1. Mengupayakan tambahan anggaran selain yang bersumber dari APBD, yaitu dari APBN dan atau APBD Provinsi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, CSR, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perbaikan Kinerja PDAM melalui Program NUWSP (National Urban Water Supply) dari World Bank, serta penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah air minum.
2. Melakukan studi kelayakan potensi air baku pada kecamatan yang kekurangan sumber air baku, agar didapatkan alternatifnya.
3. Melakukan fasilitasi serah terima asset pekerjaan NUWSP dengan Kementerian PUPR, agar dapat maksimal dalam melakukan pelayanan akses air minum bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
4. Menekan kepada pihak Pemerintah Provinsi agar segera mencari solusi kesepakatan, agar SPAM Regional Banjarbakula juga dapat melayani masyarakat Kecamatan Takisung.

❖ **BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Sumber Daya Air tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

❖ **Kepala Bidang Sumber Daya Air**

**Sasaran : Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air .**

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.52**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	69,17%	69,17%	100
2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	91 %	91 %	100
3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,94%	17,82%	100

## 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

## a. Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2023 terealisasi sebesar 69,17% dari yang ditargetkan sebesar 69,17%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah 100%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik

T = Nilai Target

Persentase irigasi dalam kondisi baik didasarkan pada peraturan Menteri PUPR mengenai Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang terdiri dari penilaian prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A.

b. Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik tahun 2023 terealisasi sebesar 91% dari yang ditargetkan sebesar 90,25%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah 100%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik

T = Nilai Target

Persentase sungai dalam kondisi baik terdiri dari penilaian jaringan sungai yaitu sungai induk, sekunder, tersier dan drainase perkotaan.

c. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Pencapaian Persentase sungai dalam kondisi baik terdiri dari penilaian jaringan sungai yaitu sungai induk, sekunder, tersier dan drainase perkotaan.

d. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Pencapaian indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air tahun 2023 terealisasi sebesar 17,82% dari yang ditargetkan sebesar 17,82%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah 100%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase luas kawasan

T = Nilai Target

Persentase luas kawasan terdiri dari wilayah terdampak banjir dan daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai di Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.53**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	67%	68,01%	69,17%	69,17%	100%
2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	90,25%	91 %	91 %	100%
3	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	26,49%	15,94%	17,82%	17,82%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

### a. Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 68,01% sedangkan tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah meningkat sebesar 1,16%.

### b. Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase panjang sungai dalam kondisi baik tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 91% sedangkan tahun 2021 mampu terealisasi sebesar 90,25%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah meningkat sebesar 0,75%.

### c. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Realisasi indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 17,82% sedangkan tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 15,94%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah menurun sebesar 1,88%.

## 2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa 3 indikator di atas tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, hal ini disebabkan adanya bencana banjir dan gelombang pasang pada tahun 2021 yang mengakibatkan:

1. Kerusakan pada bangunan irigasi.
2. Pendangkalan pada sungai-sungai.
3. Meluasnya kawasan pantai yang mengalami abrasi.
4. Keruntuhan lereng/tebing di sepanjang bantaran sungai akibat daya rusak air.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Irigasi Kabupaten Berfungsi Baik meliputi:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 8 dokumen;
2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sebanyak 6 dokumen;
3. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 6 paket pekerjaan;
4. Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 5 paket pekerjaan;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 16 paket kegiatan;
6. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 2 pekerjaan;
7. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 2 paket pekerjaan;
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 2 paket kegiatan;
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 4 paket kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Panjang Sungai Dalam Kondisi Baik adalah:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 14 dokumen;
2. Normalisasi/Restorasi Sungai sebanyak 28 paket pekerjaan;
3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sebanyak 4 paket kegiatan,

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi Akibat Daya Rusak Air adalah:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 14 dokumen;
2. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya sebanyak 2 paket kegiatan.
3. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 7 paket pekerjaan;

#### 1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Sumber Daya Air, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 34.375.119.354,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.606.413.916,- atau 96,10%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.54**  
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Sumber Daya Air

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6		
	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>						
A	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>88,539,525,514</b>			<b>10</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51,462,796,407</b>					
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,518,693,289	1,304,931,513	85.92			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,348,196,560.	2,233,313,000	95.11			
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13,216,088,484	12,823,187,000	97.03			
2	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25,649,938,531.00	23,501,660,900	91.62			
3	Normalisasi/Restorasi Sungai	6,134,898,385.00	5,664,646,000	92.33			

4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2,524,926,101.00	2,484,732,950	98.41			
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	70,055,057.00	41,947,500.00	59.88			
5	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37,076,729,099.00</b>					
4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	499,098,380.00	484,026,000.00	96.98			
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4,949,264,752.00	4,625,286,000.00	94.00			
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	18,998,173,634.00	18,048,079,000.00	95.00			
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11,454,516,810.00	10,737,595,244.00	93.74			
9	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1,175,675,523.00	1,044,254,771	88.82			
	Total	<b>88,593,525,506</b>	<b>83,020,659,878</b>				

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Eselon 3 Bidang Sumber Daya Air selama tahun 2023 yaitu :

1. Minimnya anggaran yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan ke-Sumber Daya Air-an di Kabupaten Tanah Laut.
2. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang cukup menyulitkan pelaksanaan pekerjaan.
3. Musim penghujan yang terjadi hampir sepanjang tahun sangat menghambat kelancaran pekerjaan.
4. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri
5. Kurangnya sumber daya manusia untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
6. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun pada jaringan irigasi terutama di musim kemarau
7. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi dan longsor mengalami peningkatan
8. Pemukiman warga yang merambah sempadan sungai dan pantai
9. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian PUPR untuk dapat memperoleh pendanaan di luar APBD Tanah Laut.
2. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait permasalahan ketersediaan lahan pada saat konstruksi dilaksanakan
3. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan
4. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal
5. Memastikan adanya hibah tanah sesuai kebutuhan perencanaan konstruksi
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasif ke aparat terkait dan kelompok tani
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air
8. Menata daerah hulu dengan cara berkoordinasi baik secara vertikal maupun sektoral
9. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana
10. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah
11. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS

#### ❖ BIDANG TATA RUANG

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Tata Ruang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.55**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	64	54,5	85,15%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	98	94,79	96,94%

## ❖ Kepala Bidang Tata Ruang

**Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang.**

Pasa sasaran meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.56**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	98	94,79	96,94%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target
  - a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten.

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2023 mampu tersealisasi sebesar 94,79%, dari yang ditargetkan juga sebesar 98%, sehingga dapat dilihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah 5%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.57**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	0%	28%	64	54,5	85,15%
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	78%	97%	98	94,79	96,94%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.
  - 1) Persentase Capaian Kecamatan Yang Sudah Memiliki RDTR.

Realisasi indikator kinerja persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 54,5% atau sebanyak 5 (lima) kecamatan

dari 11 kecamatan yang di targetkan, sedangkan tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 28% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR meningkat yaitu sebesar 26,5 %.

2) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 94,79%, sedangkan tahun 2022 mampu terealisasi sebesar 97%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW adalah menurun sebesar 2,21%..

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

1) Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR.

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator untuk tahun 2022 sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 maka persentasenya terjadi peningkatan realisasi, kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah proses legalisasi RDTR WP Jorong, legalisasi dan RDTR disekitar KI (Kawasan Industri) Jorong.

2) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi yang dicapai tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk dapat meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten. Saat ini masih terdapat 5,21% pemanfaatan tata ruang yang dimohonkan oleh pelaku usaha/masyarakat yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR dikarenakan pembangunan dilaksanakan sebelum Perda RTRW dan Perbub RDTR ditetapkan yaitu sebelum tahun 2016.

Pemerintah emerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2016- 2036 dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan proses legalisasi revisi Peraturan Daerah tersebut. Pada tahun 2022 juga telah ditetapkan 3 Peraturan Bupati yaitu:

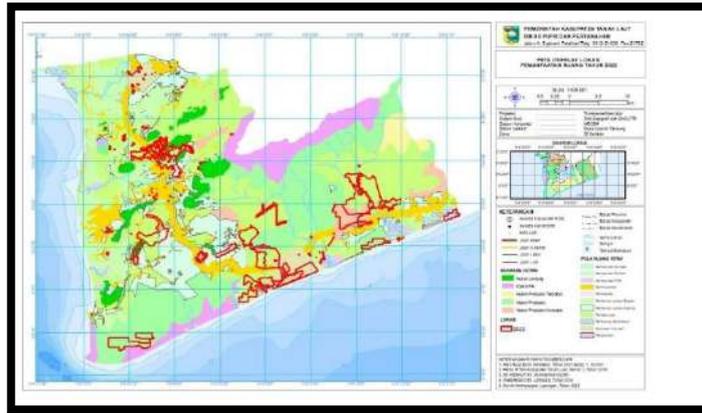
- 1). Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042.
- 2). Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbup No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042
- 3). Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022
- 4) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jorong.
- 5) Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Detail di Sekitar awasan Industri Jorong.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

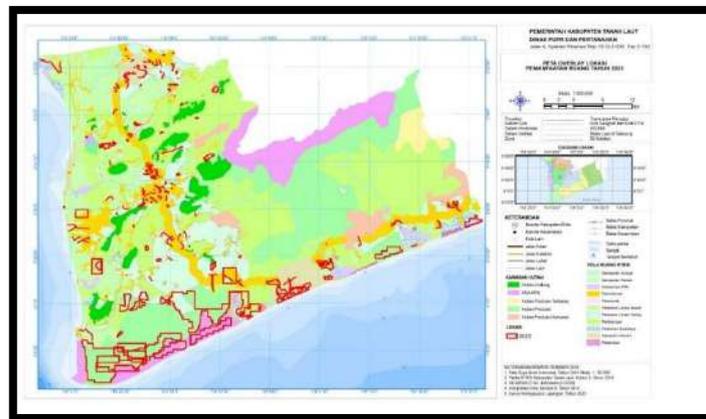
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

- 1). Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2). mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3). Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4). Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

**Gambar 3.10**  
**Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022**



Gambar 3.11  
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2023



1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan pejabat fungsional tertentu yang ada pada Bidang Tata Ruang, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.499.999.429,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.819.558.772,- atau 80,56%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.58  
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Tata Ruang

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BIDANG TATA RUANG</b>						
A	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	3,661,738,637.00			11	17	4
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata	3,517,340,828.00					

	Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	604,660,621.00	442,139,438	73.12		
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2,912,680,207.00	2,608,538,964.00	89.56		
2	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144,397,809.00</b>				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	144,397,809.00	97,101,250.00	67.25		
	Total	<b>3,661,738,637</b>	<b>3,147,779,652</b>			

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 Bidang Tata Ruang selama tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga teknis bidang tata ruang.
2. Kurangnya informasi data dalam penyusunan RTRW dan RDTR untuk perencanaan dari masing-masing SKPD terkait dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan yang ada sehingga kegiatan lainnya mampu terlaksana seluruhnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua skpd yang terjalin dengan baik dan lebih intens.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam kegiatan konsultasi publik terkait penyusunan dokumen terkait penyelenggaraan penataan ruang.
4. Memaksimalkan staf PNS dan tenaga PTT yang ada dalam melaksanakan kegiatan.
5. Memberikan pelatihan mengenai GIS dan ilmu ketataruangan agar dapat semakin meningkatkan kinerja PNS dan PTT yang ada.

❖ **BIDANG PERTANAHAN**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 dan 4 pada Bidang Pertanahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.59**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
	<b>Kepala Bidang Pertanahan</b>				
1	Meningkatnya pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa /konflik pertanahan	100%	100%	100
		Persentase konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100

❖ **Kepala Bidang Pertanahan**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan.**

a. Persentase Penyelesaian sengketa/konflik pertanahan Tahun 2023

$$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tana garapan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ Dokumen}}{3 \text{ Dokumen}} \times 100 \% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dimana untuk target jumlah pengaduan sengketa tanah 3 Dokumen dan untuk Realisasi penyelesaian sengketa tanah yang di tangani adalah 3 Dokumen dengan capaian persentase sebesar 100 %.

b. Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dimana untuk target dokumen Konsolidasi tanah adalah 2 Dokumen dan untuk

Realisasi dokumen Konsolidasi tanah yang dilaksanakan adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Kurau dan Dokumen PTSL 2023 dengan capaian persentase sebesar 100 %.

Pada sasaran meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikatornya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.60**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%	100%	100%
2	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.
  - a. Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah 100%.
  - b. Pencapaian indikator kinerja persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.61**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	100%	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dengan Raelisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan/penurunan. Jika dibandingkan pada tahun 2022, dimana tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan realisasi kinerjanya tidak mengalami peningkatan/penurunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan Permasalahan Lahan Pemerintah Daerah RSUD Hadji Boejasin dengan PT. PEREMBE di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

permasalahan Permasalahan Lahan Pemerintah Daerah RSUD Hadji Boejasin dengan PT. PEREMBE di Kecamatan Pelaihari.

Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kecamatan Bati-Bati.

Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kecamatan Tambang Ulang.

**Gambar 3.12**  
Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2023





## Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab.Tanah Laut}} \times 100\% = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dimana untuk target dokumen Konsolidasi tanah adalah 2 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen Konsolidasi tanah yang dilaksanakan adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Kurau dan Dokumen PTSL 2023 dengan capaian persentase sebesar 100 %.

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja kepala bidang pertanahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.62**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

#### a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Pencapaian indikator kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kabupaten Tanah Laut pada tahun tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.63**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanian**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Raelisasi Terkait.

Persentase indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan/penurunan. Jika dibandingkan pada tahun 2022, dimana tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah tetap.

## 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

### a. Persentase hasil konsolidasi tanah Kab. Tanah Laut.

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanian realisasi kinerjanya tidak mengalami peningkatan/penurunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan Permasalahan Lahan Pemerintah Daerah RSUD Hadji Boejasin dengan PT. PEREMBE di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

- 1) Permasalahan Permasalahan Lahan Pemerintah Daerah RSUD Hadji Boejasin dengan PT. PEREMBE di Kecamatan Pelaihari.
- 2) Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanian di Kecamatan Bati-Bati.
- 3) Terlaksananya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanian di Kecamatan Tambang Ulang.

**Gambar 3.13**  
**Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan**



**Gambar 3.14**  
**Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan**





#### 4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan eselon 4 yang ada pada Bidang Pertanahan, didukung dengan 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 3.243.130.102,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.806.240.949,- atau 84,53%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.64**  
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Pertanahan

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6		
	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>						
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>1,170,848,401.00</b>			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,170,848,401.00</b>					
<b>1</b>	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,956,000.00	274,360,147.00		78.40		
<b>1</b>	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	820,892,401.00	684,495,280.00		83.38		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>1,907,756,359.00</b>					
<b>2</b>	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,907,756,359.00</b>					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1,907,756,359.00	1,884,606,200.00		98.79		
	Total	<b>3,078,604,760.00</b>	<b>2,843,461,627.00</b>				

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 Bidang Pertanahan selama tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Tumpang tindih alas hak/sertifikat;
2. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
3. Pemilik tanah tidak melaksanakan kewajiban memelihara tanda-tanda batas tanah;
4. Kurangnya fasilitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan;
5. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki bidang pertanahan;
6. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah;
7. Kurangnya sarana penunjang kegiatan dilapangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan data secara akurat dan komprehensif
2. Perlu ditelusuri status tanah tersebut melalui data yang dimiliki oleh BPN atau kelurahan/desa;
3. Melakukan pengukuran dan pencantuman titik koordinat batas-batas tanah;
4. Meminjam fasilitas bidang lain atau menggunakan fasilitas pribadi;
5. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan kantor BPN kabupaten tanah laut;
6. Mengambil data dukung kelapangan dengang melakukan pengukuran melalui gps garmin montana 680 atau menggunakan drone pinjaman dari bidang lain atau informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa;
7. Memaksimalkan PNS, PTT dan TTK yang dimiliki.

### ❖ UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.65**  
Realisasi dan Indikator UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
	<b>Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi</b>				
1	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 95.000.000	Rp. 135.345.000	142,46
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 405.000.000	Rp. 247.550.000	60,87
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi dan alat berat	Jumlah alat berat yang dipenuhi	1	0	0
		Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi	3	3	100

### ❖ Kepala UPTD Peralatan Pengujian Material Konstruksi

**Sasaran : Meningkatkan Retribusi Sewa Alat Uji Material Konstruksi.**

Pada sasaran meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.66**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 95.000.000	Rp. 135.345.000	142,46
2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 405.000.000	Rp. 246.550.000	60,87

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2023 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 135.345.000,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 95.000.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi adalah 142,46% dari total pendapatan yang ditargetkan.
- b. Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat tahun 2023 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 246.550.000,- dari yang ditargetkan yaitu

sebesar Rp. 405.000.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi adalah 60,87% dari total pendapatan yang ditargetkan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.67**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2023		
		2020	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 162.000.000	Rp. 82.410.000	Rp. 95.000.000	Rp. 135.345.000	142,46
2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 178.575.000	Rp. 461.788.500	Rp. 405.000.000	Rp. 246.550.000	60,87

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2023 mampu terealisasi sebesar Rp. 135.345.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 95.000.000,-, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 82.410.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 100.750.000,- sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah meningkat dan melampaui target sebesar Rp. 40.345.000,- atau sebesar 42,46%.
- b. Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 mampu terealisasi sebesar Rp. 246.550.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 405.000.000,-, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 461.778.500,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 299.250.000,-, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah menurun, dan tidak mencapai target pendapat sebesar Rp. 158.450.000,- atau sebesar 39,13%.

### 3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari analisa diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan realisasi kinerja tahun 2023 adanya peningkatan retribusi daerah adalah adanya himbauan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, agar dalam melakukan uji material konstruksinya supaya dilakukan di UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi (PPMK) DPUPRP, dan Untuk tahun 2023 paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan juga melayani mereka yang diluar dari di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut seperti permohonan dari kabupaten lain, dan Dinas Perkim Kabupaten Tanah laut, Pelayanan Pengujian konstruksi dilakukan di UPTD PPMK DPUPRP, yang dilakukan standar pembiayaan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan, hal ini membuat tarif untuk biaya uji dibandingkan dengan daerah lain masih tergolong murah, direncanakan setelah terbit perda retribusi akan diusulkan perubahan tarif yang akan mampu lebih meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### ❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

#### Sasaran 1 : Melakukan Pemeliharaan Sarana Dan Prasanana Alat Uji Material Konstruksi

Pada sasaran melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.68**  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah	71 Buah	100
2	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	180 Layanan	198 Layanan	114
3	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat	10 Orang	9 Orang	90

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.
  - a. Pencapaian indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tahun 2023 terealisasi sebanyak 71 buah dari yang ditargetkan juga sebanyak 71 Buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah 100%.
  - b. Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi tahun 2023 terealisasi sebanyak 198 Layanan dari yang ditargetkan juga sebanyak 180 layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi adalah 114%.
  - c. Pencapaian indikator kinerja Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat tahun 2023 terealisasi sebanyak 9 orang dari yang ditargetkan juga sebanyak 10 orang, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari upaya peningkatan SDM UPTD PPMK DPUPRP, yang tercapai adalah 90%.

**Sasaran 2 : Melakukan Pelayanan Administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi**

Pada sasaran melakukan pelayanan administrasi **UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi** diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.69**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU**  
**UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	8 Jenis	71 Buah	71 Buah	71 Buah	100
2	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	60 Layanan	180 layanan	180 layanan	198 layanan	114
3	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat	0 orang	0 orang	10 orang	9 orang	90

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.
  - a. Realisasi indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 realisasi kinerjanya adalah meningkat sebanyak 71 Buah, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah tetap yaitu sebanyak 71 buah. (jumlah tahun 2022 dan 2023 sama tidak ada penambahan alat)
  - b. Realisasi indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi mulai tahun 2023 telah menargetkan 118 Layanan dan pada tahun 2023 ditingkatkan menjadi 180 Layanan, dan terealisasi sebanyak 198 layanan, sehingga realisasi kinerja yang meningkat tersebut bahkan melebihi target sebanyak 18 layanan.
  - c. Realisasi indikator kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat, ada yang telah bersertifikat sejak tahun 2016, dan dianggap kadaluarsa, karena tidak melakukan uji kompetitif sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh kemnaker, sehingga pada tahun 2022, indikator kinerja SDM UPTD dianggap 0, namun pada tahun 2023 diusulkan lagi untuk pembinaan operator sebanyak 10 orang dengan sertifikat Kemnaker, dan yang berhasil lulus sebanyak 9 orang operator alat berat. Sehingga hal ini menjadi indikator kinerja SDM UPTD PPMK kembali meningkat yaitu realisasi pada kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat sebanyak 9 orang.
2. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja
  - a. Pada indikator jumlah alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tetap sama dengan tahun sebelumnya, hal ini di karenakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penambahan/pembelian alat yang baru, sehingga pemeliharaan rutin dilaksanakan pada alat yang sudah ada, sehingga jumlah alat berat dan alat uji material konstruksi yang dimiliki UPTD PPMK yaitu tetap sebanyak 71 buah.

- b. Pada indikator jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sebanyak 198 layanan.
- c. Pada indikator kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat terjadi peningkatan dari tahun 2022 (pada tahun 2022 0 orang), karena pada tahun 2023 telah dilaksanakannya kegiatan pembinaan diklat dan sertifikasi operator alat berat di Balikpapan, dan 9 (sembilan) orang berhasil lulus. Sehingga SDM yang bersertifikat pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi, yaitu tetap sebanyak 9 orang

**Tabel 3.70**  
**Alat Uji UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
1	2	3	4
1	Diamond Core Bit 4"	2013	1 Pcs
2	Core Drilling Test	2013	1 Pcs
3	Sand Cone Test Set	2014	2 Set
4	Balance ( 0,01 gram sensitivity )	2014	2 Pcs
5	Balance ( 0,1 gram sensitivity )	2014	3 Pcs
6	Oven Laboratorium	2018	1 Pcs
7	Los Angeless Abrassion Machine	2018	1 Pcs
8	Copression Machine ASTM C-39	2018	1 Pcs
9	Dynamic Cone Penetrometer	2018	1 Pcs
10	Digital Balance ( Cap 30Kg x 1 gr )	2018	1 Pcs
11	Digital Balance ( Cap 10Kg x 0,1 gr )	2018	1 Pcs
12	Cetrifuge Extractor Test	2013	1 Pcs
13	Filter Paper Low Ash	2013	4 Pak
14	Marshall Test Set	2013	1 Set
15	Hydrometer Analysis Test Set	2013	2 Set
16	Motorised Laboratory CBR Test Set	2013	1 Set
17	Shrinkage Limit Test Set	2013	1 Set
18	Proving Ring Penetrometer	2013	1 Pcs
19	Termometer Metal	2013	2 Pcs
20	Specific Grafity and Absorption Of Coarse Agregat Test Set	2013	1 Set

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
21	Hand Operated Liquid Limit Test Set	2013	4 Set
22	Concrete Test Hummer	2013	1 Pcs
23	Absorption Of Fine Aggregate Test Set	2014	1 Set
24	Compaction Test Set	2014	2 Set
25	Wash Bottle	2014	2 Pcs
26	Bottle Roller	2014	2 Pcs
27	Stopwatch	2014	1 Pcs
28	Vernier Caliper	2014	4 Pcs
29	Plastic Limit Test Set	2014	1 Pcs
30	Concrete Cube Mold ( 15 X 15 X 15 cm )	2014	5 Pcs
31	Slump Test Set	2014	2 Pcs
32	Brass Round Sieve 3"	2014	1 Pcs
33	Brass Round Sieve 2 1/2"	2014	2 Pcs
34	Brass Round Sieve 2"	2014	2 Pcs
35	Brass Round Sieve 1 3/4"	2014	2 Pcs
36	Brass Round Sieve 1 1/4"	2014	2 Pcs
37	Brass Round Sieve 1"	2014	2 Pcs
38	Brass Round Sieve 3/4"	2014	2 Pcs
39	Brass Round Sieve 1/2"	2014	2 Pcs
40	Brass Round Sieve 3/8"	2014	2 Pcs
41	Brass Round Sieve 1/4"	2014	2 Pcs
42	Brass Round Sieve No.4"	2014	3 Pcs
43	Brass Round Sieve No 8"	2014	2 Pcs
44	Brass Round Sieve No.10"	2014	2 Pcs
45	Brass Round Sieve No.12"	2014	1 Pcs
46	Brass Round Sieve No.16"	2014	2 Pcs
47	Brass Round Sieve No.30"	2014	2 Pcs
48	Brass Round Sieve No.40"	2014	2 Pcs
49	Brass Round Sieve No.50"	2014	2 Pcs
50	Brass Round Sieve No.80"	2014	2 Pcs
51	Brass Round Sieve No.100"	2014	2 Pcs
52	Brass Round Sieve No.200"	2014	2 Pcs
53	Brass Round Sieve Pan and Cover	2014	2 Pcs
54	Piknometer Agregat Halus	2022	1 Pcs
55	Piknometer Filler (Semen)	2022	1 Pcs
56	Piknometer Tanah	2022	1 Pcs

Gambar 3.15

Kegiatan yang dilakukan pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi  
**PENGOPERASIAN ALAT BERAT MOTOR GRADER 330**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT VIBRATING ROLLER 10 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT THREE WHEEL ROLLER 8 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT TANDEM ROLLER 4,5 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT BABY ROLLER**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT RUMMER**



**PENGOPERASIAN FLAT BED RTUCK WITH CRANE**



**PENGOPERASIAN DUMP TRUCK**



**PENGUJIAN DESAIN MIX LPPA A**



**PENGUJIAN CORE DRILL**



**PENGUJIAN DESAIN MIX LPPA B**



**PENGUJIAN SAND CONE**



**4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.**

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan yang ada pada UPT Peralatan, didukung dengan 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 198.855.982,- dan terealisasi sebesar Rp. 168,631,070- atau 84,80%. Dan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan yang ada pada UPT Labotatorium, didukung dengan 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 280,237,713,- dan terealisasi sebesar Rp. 273,422,050- atau 97,55%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.71**  
**Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi**

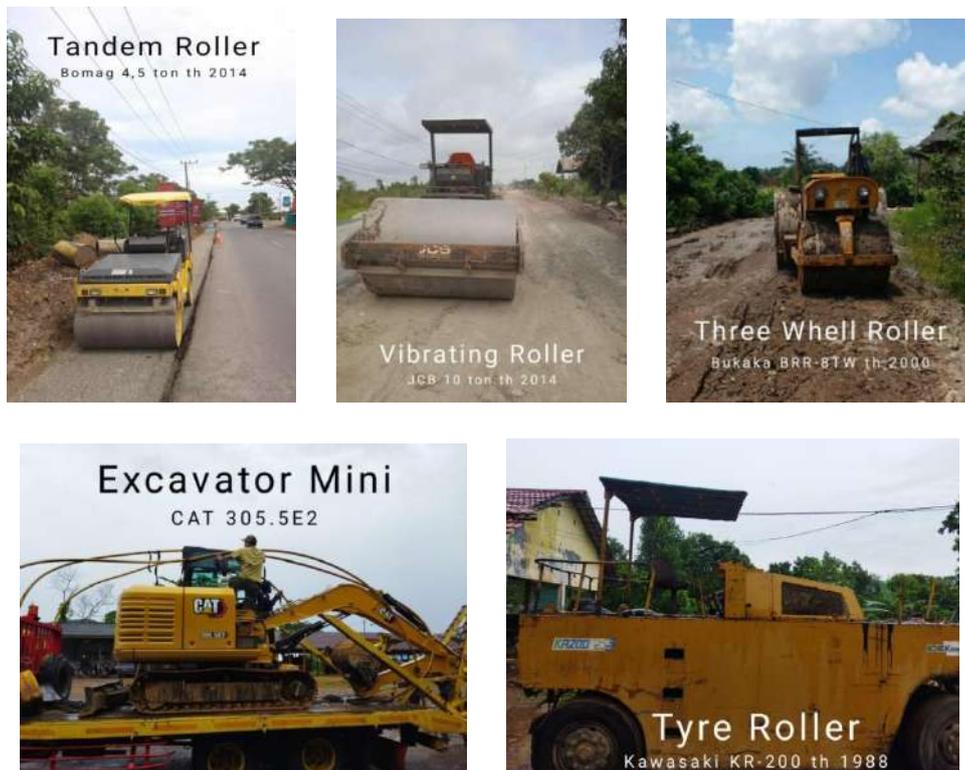
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(% )	Jumlah SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>657,609,824</b>	<b>527,344,809</b>	80	<b>8</b>	<b>12</b>	-
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>91,092,000</b>	<b>66,810,000</b>	<b>73.34</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,092,000	66,810,000	73.34			
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74,985,041</b>	<b>67,832,859</b>	90.46			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>9,987,312</b>	6,862,000	68.71			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>4,997,729</b>	2,985,500	59.74			
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>60,000,000</b>	57,985,359	96.64			
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16,167,200</b>	<b>11,802,000</b>	<b>73</b>			
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,167,200	11,802,000	73			
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>475,365,583</b>	<b>392,701,950</b>	82.61			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, ndan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,432,100	84,377,950	62.77			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	227,740,123	205,972,000	90.44			
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113,193,360	102,352,000	90.42			

Beberapa alat berat yang dimiliki UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sampai dengan tahun 2023, tidak ada penambahan pembelian yang baru pada anggaran perubahan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.72  
 Jenis Alat Berat dan Alat Lainnya Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Keterangan
1	2	3	
1	Truck Crane Toyota Diesel 3,4	1 Unit	1988
2	Tyre Roller KR 200	1 Unit	1988
3	Whell Loader	1 Unit	1991
4	Baby Roller Dynamic RS 600D	1 Unit	1995
5	Dump Truck RR Izuzu ELF 120 PS	1 Unit	1995
6	Motor Grader MG 230	1 Unit	1995
7	Baby Roller Meiwa MG-7	1 Unit	2000
8	Three Whell Roller Bukaka BRR-8TW	1 Unit	2000
9	Motor Grader MG 330	1 Unit	2014
10	Plate Compactor Tacom	1 Unit	2014
11	Rammer Tacom Tv 85DF	1 Unit	2014
12	Vibrating Roller TCB 10 Ton	1 Unit	2014
13	Tandem Roller Bomag 4,5 ton	1 Unit	2014
14	Excavator Mini CAT 305 5E2	1 Unit	Pembelian 2021
15	Genset ST IF 12000T3	1 Unit	Pembelian 2021

Gambar 3.16  
 Beberapa Alat Berat Pada UPT Peralatan



Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi UPT Peralatan diantaranya :

- 1) Target Pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan kondisi peralatan yang dimiliki UPTD sebagian besarnya rusak berat, dikarenakan tahun produksi alat yang cukup tua (1989,1995, dan 2014) terkadang untuk pemeliharaan kesulitan dalam mencari suku cadang di pasaran.
- 2) Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan jasa rental alat berat yang lebih maju, meskipun dengan harga bersaing .
- 3) Dari Perhitungan usia ekonomis dari 15 alat berat yang dimiliki UPTD, yang biasa digunakan oleh jasa rental swasta, Cuma 1 Alat yang memiliki kriteria sisi umur ekonomis yaitu Excavacator Mini (Trakindo CAT) tahun 2021, sehingga diperlukan penambahan jenis alat berat setiap tahunnya.
- 4) Sumber Daya Manusia (Operator) masih banyak belum memiliki sertifikat sebagai operator, dan keterampilan teknis pendukung lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan upaya pemeliharaan semaksimal mungkin, dan mengusulkan peningkatan biaya pemeliharaan dari Rp. 18.047.505,- menjadi Rp 57.440,950,- pada anggaran perubahan dengan menggeser pembiayaan yang lainnya.
- 2) Menjaring kerjasama pelayanan sampai luar kabupaten dan luar provinsi, sehingga 2 Alat Berat disewa secara kontinyu di salah satu perusahaan sawit di kabupaten Passer Kalimantan Timur.
- 3) Menyusun program peremajaan alat berat, dan terus mengusulkan ke Pemerintah daerah, untuk penambahan alat berat disetiap tahun anggaran.
- 4) Melakukan koordinasi dengan PUPR Regional Kalimantan Selatan yang ada di Banjarmasin, untuk dapat melaksanakan pelatihan bagi operator dan tenaga teknis lainnya.

Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi UPT Laboratorium diantaranya :

- 1) Sumber daya manusia (Personil laboratorium material konstruksi) yang tersedia sangat terbatas dan tidak bersertifikat dikarenakan kebijakan mutasi pegawai yang bersertifikat tidak ditugaskan lagi pada unit laboratorium.

- 2) Biaya pemeliharaan untuk alat uji yang dimiliki terbatas, dan sejak pengadaan tahun 2017 alat tersebut tidak validasi
- 3) Pemanfaatan alat uji terbatas, dikarenakan model alat versi lama, dan pemahaman pemakaian variasi alat uji rendah
- 4) Operasional pelayanan pengujian dilapangan terkendala dengan sarana dan prasarana operasional (mobil ) untuk keperluan pengujian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, dan meminjam tenaga teknis ahli khusus pengujian, sehingga kesetaraan hasil uji laboratorium valid,
- 2) Melakukan pemeliharaan pada beberapa alat uji laboratorium dengan bekerjasama dengan Badan Pengujian Sertifikasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemetrolgian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan.
- 3) Memaksimalkan pemanfaatan alat yang biasa digunakan, dan memotivasi SDM Laboratorium untuk selalu belajar secara mandiri terhadap penggunaan alat laboratorium dan menugaskan mereka mengikuti kegiatan penambahan wawasan pada unit laboratorium material konstruksi di kabupaten lain, dan luar provinsi ( PUPR Kota Palangkaraya)
- 4) Pengaturan jadwal operasional dilapangan yang lebih teratur, antara sub unit kerja peraltan dan sub unit kerja laboratorium dan memanfaatkan kendaraan operasional kepala UPTD, yang dipelihara dengan mengadakan perawatan kendaraan yang dimodifikasi agar dapat mencapai daerah-daerah pengujian yang strategis.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.533.645.003.555,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 485.393.041.704,-** atau **91,96%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

#### 1. Belanja Operasi.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 151.656.945.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.983.985.152,- atau 94,28% dengan rincian:

- 1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 9.559.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.496.567.682,- atau 88,88%.
- 2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp. 129.688.990.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.452.640.275,- atau 94,42%.
- 3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp. 12.407.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.914.036.300,- atau 87,96 %.

#### 2. Belanja Modal.

Belanja Modal terdiri dari belanja Modal Tanah, belanja Modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja modal Aset Tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.381.988.507.743,- Realisasi belanja modal sebesar Rp.345.529.797.447,- atau 89,93%. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah dengan pagu anggaran Rp. 21.487.524.700 dengan realisasi sebesar Rp.825.184.613,- atau 3,84%.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp.911.661.041,- dengan realisasi sebesar Rp.839.086.126,- atau 92,04%.
- 3) Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.649.990.899,- dengan realisasi sebesar Rp.115.930.044.300,- atau 96,85%.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 239.894.331.103,- dengan realisasi sebesar Rp.225.935.482.408,- atau 94,18%.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan pagu anggaran 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

**Tabel 3.73**  
Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
	<b>SEKRETARIAT</b>				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PUPRP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14,282,516,691	12,992,952,470	90,97
		<i>Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	43,942,846	29,228,050	66,51
		<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<b>9,589,257,336</b>	8,523,065,282	88,88
		<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	1,651,343,995	1,533,813,832	92,88
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2,766,124,514	2,710,547,456	97,99
		<i>Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	231,848,000	196,297,850	84,67
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>				
4	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegritasi dan berkualitas	Program penyelenggaraan jalan	216,167,830,106	187,269,532,260	86,63
		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	216,167,830,106	187,269,532,260	86,63
	<b>BIDANG CKJK</b>				
5	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	50,309,587,356	46,653,996,041	92,73
		<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota</i>	50,309,587,356	46,653,996,041	92,73
6	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,637,200,000	4,623,000,000	99,69
		<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota</i>	4,637,200,000	4,623,000,000	99,69

7	Meningkatnya saluran drainase terbangun	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	25,752,469,834	23,645,378,100	91,82
		<i>Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota</i>	25,752,469,834	23,645,378,100	91,82
8	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	Program penataan bangunan gedung	126,142,920,841.00	120,295,629,182	95,36
		<i>Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung</i>	126,142,920,841.00	120,295,629,182	95,36
9	Meningkatnya kualitas sdm jasa konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	415,000,000.00	361,505,685	87,11
		<i>Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi</i>	415,000,000.00	361,505,685	87,11
<b>BIDANG SDA</b>					
10	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	88,539,525,506	83,020,659,878	93,77
		<i>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	51,462,796,407	48,054,418,863	93,38
		<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	37,076,729,099	34,966,241,015	94,31
<b>BIDANG TATA RUANG</b>					
11	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	3,661,738,637	3,147,779,652	85,96
		<i>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	3,517,340,828	3,050,678,402	86,73
		<i>Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	144,397,809	97,101,250	67,25
<b>BIDANG PERTANAHAN</b>					
12	Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	1,170,848,401	958,855,427	81,89

		<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1,170,848,401	958,855,427	81,89
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi	Program penatagunaan tanah	1,907,756,359	1,884,606,200	98,79
		<i>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	1,907,756,359	1,884,606,200	98,79
<b>UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN LAB KONSTRUKSI</b>					
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PUPRP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	657,609,824	527,344,809	80
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	91,092,000	66,810,000	73,34
		<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	74,985,041	67,832,718	90,46
		<i>Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	16,167,200	11,802,000	73,00
		<i>Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	475,365,583	392,701,950	82,61

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 – 2023

Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Melaksanakan 15 program dengan 26 kegiatan dan 77 sub kegiatan, sedangkan Pada tahun anggaran 2023 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 21 kegiatan dan 58 sub kegiatan, sehingga di tahun 2023 ada sedikit pengurangan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan karena penyesuaian numenklatur Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 pemutakhiran.

#### A. Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 11 program dengan 17 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 program dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

## B. Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 program dengan 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 2 program, 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sedangkan UPT Peralatan berjumlah 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.74**  
**Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,**  
**Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**  
**Pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	
		2022	2023
		<b>SEKRETARIAT</b>	<b>SEKRETARIAT</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>a.</b>		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
4.		Koodrinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
5.		Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	-

6.		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
<b>b.</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-
4.		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-
5.		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	-
6.		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-
7.		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	
<b>c.</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
<b>d.</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1.		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
<b>d.</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.		Penyediaan Peralatan dan	Penyediaan Peralatan dan

		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>e.</b>		<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
5.		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
6.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>		
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		
<b>a.</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

2.		Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
3.		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar
4.		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan
5.		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan
6.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
7.		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
8.		Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan
9.		Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan
10.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	<b>BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI</b>		
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		
<b>a.</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2.		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
3.		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5.		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6.		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		
<b>a.</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>

1.		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		
<b>b.</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2.		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
3.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
4.		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	-
5.		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	-
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>c.</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>
1.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
<b>G.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		
<b>d.</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
<b>H.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		

e.		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>
1.		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2.		-	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
f.		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	-
1.		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kontruksi	-
g.		<b>Kegiatan Penertiban Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	-
1.		Kegiatan Pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	-
h.		<b>Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertb Pemanfaatan Jasa Kontruksi</b>	-
1.		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi	-
	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>		
i.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		
a.		<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
3.		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

4.		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
5.		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
6.		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
7.		Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
8.		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
9.		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
10.		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
b.		<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2.		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
3.		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
4.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan)
5.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
6.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
7.		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi
8.		Rehabilitasi Bendung Irigasi	-
9.		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-
10.		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	-
11.		-	Operasional Unit Pengelola Irigasi

12.		-	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa (DAK)
	<b>BIDANG TATA RUANG</b>		
J.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		
a.		<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>
1.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
2.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
b.		<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
2.		Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	-
	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>		
K.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>		
a.		<b>Kegiatan Pemberiaan Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	-
1.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberiaan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	-
L.	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>		
a.		<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)

		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota
2.		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>M.</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		
<b>a.</b>		<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
	<b>UPT PERALATAN</b>		
<b>N.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>a.</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-
1.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
2.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>b.</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	-
<b>c.</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
d.		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
4.		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya

Untuk Ringkasan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut

**Tabel 3.75**  
**Perbandingan APBD Tahun 2022 dan 2023**

No	2022		2023	
	1.	Belanja operasi	108.613.522.065	Belanja operasi
2.	Belanja modal	189.768.041.661	Belanja modal	381.988.507.743
	Total	298.381.563.726	Total	533.645.003.555

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya kenaikan anggaran pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, hal ini dimana tahun 2023 banyak kegiatan – kegiatan yang fokus pada lanjutan perbaikan infrastruktur, akibat adanya bencana banjir yang cukup besar melanda wilayah Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2021, yang mana banyaknya infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir tersebut, khususnya jalan, jembatan, irigasi, selain juga beberapa bangunan publik yang terkena dampak bencana banjir. Kemudian ditahun 2023 pada bidang pertanahan untuk mendukung salah satu program pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini BPN Kabupaten Tanah Laut yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu adanya konsolidasi tanah terkait Hibah Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 8273 persil atau bidang (sertifikat tanah) yang diberikan kepada warga/masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Pada Tahun 2023 juga merupakan tahun terakhir dari Renstra 2018-2023 sehingga banyak kegiatan dalam rangka pencapaian RPJMD maupun penuntasan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 - 2023.

#### 4. Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

##### 1. Sasaran 1 (Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an.)

Untuk sasaran 1 dari 3 indikator dan 2 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,79 % dan 6,77 %, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.76  
Efisiensi Anggaran Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	86,63 %	81,93 %	1,79 %
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap		94,91 %	
	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	93,77 %	99 %	6,77 %

##### 2. Sasaran 2 (Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Yang Mencakup Air Minum Dan Sanitasi)

Untuk sasaran 2 dari 2 indikator dan 2 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,27 % dan 0,31 %, menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada salah satu indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.77**  
**Efisiensi Anggaran Sasaran 2**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>	<b>Efisiensi</b>
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Yang Mencakup Air Minum Dan Sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	92,73 %	100 %	7,27 %
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	99,69 %	100 %	0,31 %

### 3. Sasaran 3 (Meningkatnya Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW)

Untuk sasaran 3 terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,98 % sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.78**  
**Efisiensi Anggaran Sasaran 3**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>	<b>Efisiensi</b>
Meningkatnya Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	85,96 %	96,94 %	10,98 %

### 4. Sasaran 4 (Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut)

Untuk sasaran 4 terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,11 % sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.79**  
**Efisiensi Anggaran Sasaran 4**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>	<b>Efisiensi</b>
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	81,89 %	100 %	18,11 %

#### **5. Sasaran 5 (Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut)**

Untuk sasaran 5 terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,21 % sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.80**  
**Efisiensi Anggaran Sasaran 5**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>	<b>Efisiensi</b>
Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	98,79 %	100 %	1,21 %

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **5 Sasaran dengan 8 Indikator** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**.

### B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam meningkatkan penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
3. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.

# LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)}}{\text{Total panjang jalan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jembatan di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas irigasi di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum sehat}}{\text{Total penduduk di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak}}{\text{Total rumah tangga di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohonkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik pertanahan yang dapat diselesaikan}}{\text{Total sengketa/konflik pertanahan yang masuk ke tingkat kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah konsolidasi tanah yang diselesaikan}}{\text{Total konsolidasi tanah di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19750412 199603 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.8/142/LHE AKIP– Insp/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut  
di-  
Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/231/Insp/2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implemmentasi SAKIP; ✓
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; ✓
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; ✓
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; ✓
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah:
  - a. Renstra SKPD
  - b. Renja SKPD
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
  - d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - e. Perjanjian Kinerja (PK)
  - f. Cascading/ Pohon Kinerja
  - g. Laporan Kinerja
  - h. Dokumen lain yang mendukung
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 76,60 dengan kategori BB (**Sangat Baik**), yaitu akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Memiliki sistem kinerja yang andal dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/koordinator.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. *Perencanaan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 23,70 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - b. *Pengukuran Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 21,30 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - c. *Pelaporan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 11,10 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - d. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal*

Diperoleh nilai sebesar 20,50 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25% dengan kategori **A (Memuaskan)**

5. **Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.**

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, dapat diperoleh nilai sebesar 100%.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

1. Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun diunggah/dipublikasikan pada *website* unit kerja;
2. Agar melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut atas Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertanahan yang belum terakomodir dalam RPJMD;

**b. Pengukuran Kinerja**

1. Agar dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja pada SKPD;
2. Agar memperhatikan ketepatan penyajian data kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
3. Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja;
4. Agar hasil pengukuran kinerja secara berkala dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

1. Agar memperhatikan ketepatan penulisan data kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj);
2. Agar menyajikan informasi terkait aktivitas/kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dan hambatan/kendala apabila target kinerja tidak tercapai;
3. Agar menjadikan laporan kinerja berkala sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai target kinerja;
4. Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

1. Agar melakukan peningkatan kompetensi terkait SAKIP kepada pegawai yang membidangi/bertugas;
2. Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

  
Inspektur  
Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
PERIODE EVALUASI TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	%-tase
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>23,70</b>	<b>79,00%</b>
<b>1.a</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	<b>6,00</b>	<b>A</b>	<b>5,40</b>	<b>90,00%</b>
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
<b>1.b</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	<b>9,00</b>	<b>B</b>	<b>6,30</b>	<b>70,00%</b>
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
<b>1.c</b>	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15,00</b>	<b>BB</b>	<b>12,00</b>	<b>80,00%</b>
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>21,30</b>	<b>71,00%</b>
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6,00</b>	<b>A</b>	<b>5,40</b>	<b>90,00%</b>
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	%-tase
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	CC	5,40	60,00%
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50	70,00%
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	15,00		11,10	74,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70	90,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15	70,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	%-tase
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25	70,00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>		<b>20,50</b>	<b>82,00%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50	90,00%
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00	80,00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	BB	10,00	80,00%
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>		<b>76,60</b>	<b>76,60%</b>

Pengendali Teknis,

  
Hj. Rusmiati, MM  
NIP. 19651028 198602 2 005

Evaluator,

  
Nanang Baihaki, ST., MM  
NIP. 19840102 201101 1 007

Mengetahui,

  
Riva Matrani, ST  
NIP. 19770223 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. SUKAMTA

Pihak Pertama,

SYAKHRIL HADRIANADI, S.T  
NIP. 19750412 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur ke P U an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%
		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	70%
		3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,71%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	47,39%
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	54,69%
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	97%
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,999,608
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,108,030,473
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,104,740,955

		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,372,261,864
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,968,000
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,362,858,939
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,279,821,001
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	50,148,457,820
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,637,200,000
5	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,199,995,820
6	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Memdirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	122,502,457,200
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	400,000,000



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

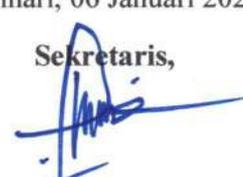
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

**Kepala Dinas,**

**Sekretaris,**

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	1	Nilai SAKIP DPUPRP	80,05 (A)
1	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	1	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%

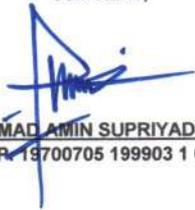
No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 18,999,608	APBD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,108,030,473	APBD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,104,740,955	APBD
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,372,261,864	APBD
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 222,968,000	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Sekretaris,

  
**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHDA FU'ADI, S.I.KOM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Pelaihari, 06 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian,**

**AHDA FU'ADI, S.I.KOM**  
NIP. 19821111 200604 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

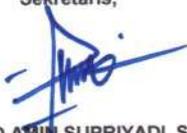
No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	1	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Jabatan
		2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	64 Orang PNS, 79 Orang PTT, dan 16 Orang TTK
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 526,436,315	APBD
		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 45,304,640	APBD
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 533,000,000	APBD
		4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 279,996,374	APBD
		5	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Rp 2,092,265,490	APBD
		6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 11,016,000	APBD
		7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp 9,914,258	APBD

Pelaihari, 06 Januari 2023

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

  
**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
 NIP. 19700705 199903 1 004

  
**AHDA FU'ADI, S.I.KOM**  
 NIP. 19821111 200604 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ARIEF YASIR

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Sekretaris,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Kepala Sub Bagian Perencanaan,

**M. ARIEF YASIR, S.Kom**  
NIP. 19830509 200604 1 004

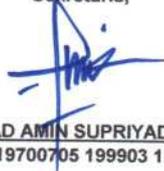
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen
		2	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Laporan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9,999,686	APBD
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8,999,922	APBD

Pelaihari, 9 januari 2023

Sekretaris,



**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Kepala Sub Bagian Perencanaan,



**M. ARIEF YASIR, S.Kom**  
NIP. 19830509 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANA MARTIANA, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

**NANA MARTIANA, ST**  
NIP. 19860318 200803 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	4 Dokumen

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,084,864,773	APBD
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 23,165,700	APBD

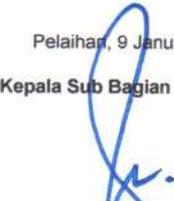
Sekretaris,



**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Pelaihan, 9 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,



**NANA MARTIANA, ST**  
NIP. 19860318 200803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI HARNANI  
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NANA MARTIANA, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Sub Bagian Keuangan,

  
NANA MARTIANA, ST  
NIP. 19860318 200803 2 003

Pelaihari, 3 Januari 2023

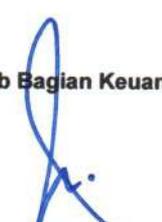
Pengadministrasi Keuangan,

  
SRI HARNANI  
NIP. 19650414 199603 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi keuangan masuk	1	Jumlah administrasi keuangan yang diterima, dicatat dan disortir	20 Dokumen
2	Membuat surat pengantar pada administrasi keuangan	1	Jumlah surat pengantar yang dibuat	20 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi keuangan menurut jenis dan sifatnya	1	Jumlah administrasi keuangan menurut jenis dan sifatnya yang dikelompokkan	10 Dokumen
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku	2	Jumlah hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	4 Dokumen
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah pimpinan baik tertulis maupun lisan	1	Jumlah tugas lainnya yang dilaksanakan	20 Dokumen

Kepala Sub Bagian Keuangan,

  
**NANA MARTIANA, ST**  
NIP. 19860318 200803 2 003

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengadministrasi Keuangan,

  
**SRI HARNANI**  
NIP. 19650414 199303 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DODY TRI HARTANTO, A.Md  
Jabatan : Bendahara Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

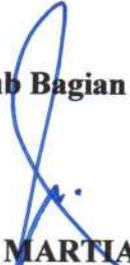
Nama : NANA MARTIANA, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Sub Bagian Keuangan,**

  
**NANA MARTIANA, ST**  
**NIP. 19860318 200803 2 003**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Bendahara,**

  
**DODY TRI HARTANTO, A.Md**  
**NIP. 19790126 201001 1 012**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Membuat Laporan Bulanan Keuangan	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang dibuat	12 dokumen
2	Menandatangani Mencatat Kwitansi Gu	1	Jumlah dokumen pembayaran melalui Ganti Uang (GU) yang diteliti, ditandatangani dan dicatat	650 Berkas
3	Menandatangani Spp	1	Jumlah Uang Persediaan (UP) melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	100 Berkas
			Jumlah Ganti Uang (GU) melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	
			Jumlah Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	
			Jumlah Pembayaran Belanja Langsung (LS) melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan	
4	Mengarsipkan Sp2d	1	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun sebelumnya yang diarsipkan	1647 Berkas
5	Melaksanakan Rekon	1	Jumlah Kesesuaian Data Data Keuangan	4 Kegiatan
6	Melaksanakan Rapat Keuangan	1	Jumlah rapat keuangan yang diikuti dan dilaksanakan	48 Kegiatan
7	Melaksanakan Tugas Lainnya	1	Jumlah tugas lainnya yang dilaksanakan	300 Kegiatan
8	Mengarsipkan Spj Gu	1	Jumlah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Ganti Uang (GU) yang diarsipkan	15 Berkas
9	Membuat Laporan Triwulan	1	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan yang dibuat	4 Dokumen
10	Membuat Laporan Semesteran	1	Jumlah Laporan Keuangan Semester yang dibuat	2 Dokumen

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Bendahara,

  
**NANA MARTIANA, ST**  
NIP. 19860318 200803 2 003

  
**DODY TRI HARTANTO, A.Md**  
NIP. 19790126 201001 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANSHARI  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AHDA FU'ADI, S.I.KOM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

**Pengadministrasi Umum,**

**MUHAMMAD ANSHARI**  
**NIP. 19911009 201101 1 001**

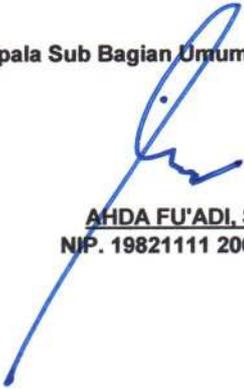
**Kepala Sub Bagian Umum**  
**dan Kepegawaian,**

**AHDA FU'ADI, S.I.KOM**  
**NIP. 19821111 200604 1 007**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menyusun dan Menata Arsip Kepegawaian	1	Jumlah surat masuk yang diterima dan dicatat	144 Berkas
2	Menerima dan Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar	1	Jumlah data arsip yang dikelompokkan dan disusun	150 Berkas
3	Menyusun dan Menata Kearsipan Dinas	1	Jumlah dokumen Surat Masuk dan Keluar yang Diterima	150 Berkas
4	Melaksanakan Tugas Lain yang diperintahkan Atasan	1	Jumlah dokumen pembayaran dan kontrak yang diperiksa	2000 Berkas

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

  
**AHDA FU'ADI, S.I.KOM**  
NIP. 19821111 200604 1 007

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pengadministrasi Umum,

  
**MUHAMMAD ANSHARI**  
NIP. 19911009 201101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Dinas,**

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luasan area yang dilayani irigasi	17.503 Hektar
		2	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	269.01 Hektar
		3	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	88.91 Hektar

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49,362,858,939	APBD
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30,279,821,001	APBD

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO SHIOLIHIN, ST

Jabatan : Teknik Pengairan Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
NIP. 740313 199903 1 005**

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Teknik Pengairan Muda,**

  
**RIDHO SHOLIHIN, ST  
NIP. 19820419 201001 1 014**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	4 Dokumen
2	Melakukan Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Bidang Sumber Daya Air dan Analisa Lainnya	2 Dokimen
3	Melaksanakan Proses Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Sumber Daya Air	3	Jumlah Dokumen Detail Engineering Desain Bidang Sumber Daya Air	8 Dokumen
4	Melaksanakan Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur	4	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah	2 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp 1,318,693,289	APBD
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp 1,648,196,560	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp 499,098,380	APBD

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

Kepala Seksi Perencanaan  
Sumber Daya Air,

  
ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
NIP. 19740313 199903 1 005

  
RIDHO SHOLIHIN, ST  
NIP. 19820419 201001 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURMINDA WIDIASARI, ST

Jabatan : Teknik Pengairan Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**Teknik Pengairan Muda,**

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 740313 199903 1 005**

  
**NURMINDA WIDIASARI, ST**  
**NIP. 19821203 201402 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	1.500 Meter
		2	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	900 Meter
2	Melaksanakan Normalisasi Saluran dan Sungai	1	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	24.000 Meter

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp 25,649,938,531	APBD
		2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 5,334,940,073	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 2,299,931,219	APBD

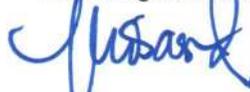
Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Teknik Pengairan Muda



**NURMUNDA WIDIASARI, ST**  
NIP. 19821203 201402 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST

Jabatan : Analis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
NIP. 740313 199903 1 005**

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Analis Sumber Daya Air,**

  
**MUHAMMAD GALIH SAPUTRA  
NIP. 19911020 201402 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	800 Meter
		2	Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	3.800 Meter
		3	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	2.500 Meter
		4	Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	14 Unit
2	Melaksanakan Pertemuan, Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Pengoperasian Irigasi, Petani Pemakai Air, Kelompok Tani/Masyarakat	1	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	1 Kali
		2	Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	20 Kali

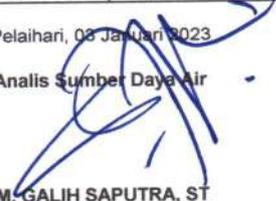
No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp 13,216,088,484	APBD
		2	Operasi Pemeliharaan Tanggul dan tebing Sungai	Rp 2,124,946,945	APBD
		3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 70,055,057	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rp 18,199,120,870	APBD
		5	Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan	Rp 8,445,598,339	APBD
		6	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rp 836,072,193	APBD

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
 NIP. 19740313 199903 1 005

Pelaihari, 08 Januari 2023

Analisis Sumber Daya Air

  
**M. GALIH SAPUTRA, ST**  
 NIP. 19911020 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAID YAHYA  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**Pengadministrasi Umum,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

**SAID YAHYA**  
**NIP. 19670104 200604 1 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mengumpulkan data - data / bahan - bahan kajian dan analisa komprehensif Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah Data - data Kajian, Survey Investigasi, studi identifikasi Desain Infrastruktur Sumber Daya Air	10 Dokumen
2	mengumpulkan bahan - bahan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur sumber daya air	1	Jumlah bahan - bahan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur sumber daya air	10 Dokumen
3	Mengumpulkan bahan - bahan proses perencanaan dan perancangan infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah bahan detail engineering desain infrastruktur Sumber Daya Air	8 Dokumen
4	Mengumpulkan data - data proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah data - data pengadaan tanah	2 Dokumen

Kepala Bidang Sumber Daya Air,



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Pelatihari, 03 Januari 2023

Pengadministrasi Umum,



**SAID YAHYA**  
NIP. 19670104 200604 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HUSNAN SURIADI  
Jabatan : Teknisi Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**Teknisi Air,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

**HUSNAN SURIADI**  
**NIP. 19730412 200701 1 023**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima dan Menginventarisasi Laporan Kerusakan Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan Pemeriksaan	1	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Kerusakan	30 Kali
2	Memeriksa Kerusakan Berdasarkan Laporan untuk Perbaikan	1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kerusakan Air	25 Kali
3	Memperbaiki yang rusak atau usang berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk diadakan Penggantian suku cadang atau perbaikan	1	Jumlah Kegiatan Perbaikan Air	15 Kali
4	Merawat secara khusus yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat Rusak	1	Jumlah Laporan Perawatan khusus yang masa Penggunaannya telah melampaui batas waktu	55 Kali
5	Melakukan Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan Evaluasi dan Pertanggungjawaban	1	Jumlah Laporan Perbaikan	10 Laporan
6	Melaksanakan tugas Kedianasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik seara tertulis maupun lisan	1	Jumlah Laporan Kedianasan Lain	55 Kali

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Teknisi Air,



**HUSNAN SURIADI**  
NIP. 19730412 200701 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WACHID PRAMONO S.Hut  
Jabatan : Pengawas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

**Pengawas Pengairan,**

**WACHID PRAMONO S.Hut**  
**NIP. 19801029 200003 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Melaksanakan survey harga satuan untuk membantu Penyusunan RAB HPS Tahun 2023	1	Jumlah hasil survey harga satuan dalam rangka membantu penyusunan RAB HPS Bidang Sumber Daya Air	20 Data
2	Melakukan Survey Perencanaan dan Pengukuran, Pemeriksaan pada Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi Sumber Daya Air Lainnya	1	Jumlah hasil survey perencanaan dan pengukuran, pemeriksaan pada Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi Sumber Daya Air Lainnya	120 Kali
3	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Bidang tugas dan Kewenangannya	1	Jumlah tugas kedinasan lain sesuai Bidang dan Kewenangannya	100 Kali
4	Mengawasi Pelaksanaan pembangunan jaringan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, saluran irigasi serta embung/waduk	1	Jumlah hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan jaringan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, saluran irigasi serta embung/waduk	200 Kali
5	Mengawasi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan jaringan irigasi Primer, Sekunder dan Tersier pada daerah irigasi Wilayah I	1	Jumlah hasil pengawasan penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan jaringan irigasi Primer, Sekunder dan Tersier pada daerah irigasi Wilayah I	30 Kali
6	Menghadiri rapat koordinasi Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah hadir dalam rapat koordinasi Bidang Sumber Daya Air	30 Kali
7	Menyampaikan Laporan Secara Berkala Kepada Atasan	1	Jumlah laporan kegiatan yang disampaikan	30 Laporan
8	Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait, Perangkat Desa dan P3A terkait kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan dan Jaringan Irigasi	1	Jumlah hasil koordinasi dengan Instansi terkait, Perangkat Desa dan P3A terkait Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan dan Jaringan Irigasi	60 Kali

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

Pengawas Pengairan,



**WACHID PRAMONO S.Hut**  
**NIP. 19801029 200003 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI MUNARYATI

Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199303 1 005**

**Pengadministrasi Umum,**

**SRI MUNARYATI**  
**NIP. 19650819 199002 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mencatat surat masuk di Bidang sumber Daya Air	1	Jumlah surat masuk yang dicatat	80 Berkas
2	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik tertulis maupun lisan	1	Jumlah SP2D Tahun Lalu Yang Tersusun	209 Berkas
		2	Jumlah dokumen pembayaran yang diperiksa	396 Dokumen

**Kepala Bidang Sumber Daya Air**



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengadministrasi Umum,**



**SRI MUNARYATI**  
NIP. 19650819 199002 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST

Jabatan : Analis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Analis Sumber Daya Air,**

**MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST**  
**NIP. 19911020 101402 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan Persiapan, Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait, Aparat Desa dan Kelompok Tani dalam Rangka Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Instansi terkait, Aparat Desa, Kepala Tani	30 Kegiatan
2	Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Evaluasi, Penyusunan Laporan dan Pendokumentasian Kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	1 Jumlah Rapat Kegiatan Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Bidang Sumber Daya Air	15 Kegiatan
3	Melakukan Inspeksi dan Investigasi Bangunan dan Jaringan Irigasi serta Bangunan Pengairan Lainnya	1 Jumlah Kegiatan Inspeksi dan Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air	60 Kegiatan
4	Melakukan Persiapan, Koordinasi, dan Penyusunan Laporan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	1 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	30 Kegiatan
5	Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data dan Perencanaan Kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	Jumlah Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data dan Perencanaan Kegiatan OP	30 Kegiatan
6	Menyelenggarakan, Melakukan Koordinasi, Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek Operasi dan Pemeliharaan	50 Kegiatan
7	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Program, Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Seksi OP	20 Kegiatan
8	Menyiapkan Bahan, Menyusun, Melakukan Koordinasi, Menyelenggarakan dan Mengevaluasi Pembinaan Organisasi O&P (Pengamat, Juru Pengairan, POB dan PPA)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi OP	30 Kegiatan
9	Menyusun Rencana Survey, Mengidentifikasi, Menganalisis, Mengolah dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Rehab Jaringan Irigasi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Rehabilitasi Infrastruktur SDA	30 Kegiatan
10	Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya	Jumlah Kegiatan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya	50 Kegiatan

Kepala Bidang Sumber Daya Air,



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Pelaihari, 3 Januari 2023

Analisis Sumber Daya Air,



**MUHAMAD GALIH SAPUTRA, ST**  
NIP. 19911020 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD KANI

Jabatan : Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

**AKHMAD KANI**  
**NIP. 19680712 200901 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima dan Menginventarisasi Laporan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan	1	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Laporan Kerusakan Pengelolaan Sumber Daya Air	24 Kali
2	Memeriksa Kerusakan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Laporan Perbaikan	1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kerusakan Pengelolaan Sumber Daya Air	20 Kali
3	Memperbaiki yang rusak atau using berdasarkan hasil Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk diadakan Pergantian Suku cadang atau Perbaikan	1	Jumlah Kegiatan Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Air	10 Kali
4	Merawat secara Khusus yang Penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak	1	Jumlah Kegiatan Perawatan Khusus Pengelolaan Sumber Daya Air yang masa Penggunaannya telah melampaui batas waktu	45 Kali
5	Melaporkan Kegiatan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan Evaluasi dan Pertanggung jawaban	1	Jumlah Laporan Kegiatan	5 Laporan
6	Melaksanakan Tugas kedinasan yang diperintahkan Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah Laporan tugas kedinasan lain	40 Kali

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air,**



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**



**AKHMAD KANI**  
**NIP. 19680712 200901 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT**  
NIP. 19861115 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses air bersih	1	Persentase peningkatan rumah tangga dengan air bersih layak	1,80%
		2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	22,23%
		3	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses air minum sehat	1,80%
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%
3	Meningkatnya saluran drainase terbangun	1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	3,50%
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%
		2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	20%
5	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	1	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	8,70%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50,148,457,820	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota	Rp 4,673,200,000	APBD
3	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,199,995,820	APBD
4	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banunan Gedung	Rp 122,502,457,200	APBD
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 400,000,000	APBD

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
 NIP. 19750412 199803 1 002

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi,

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT**  
 NIP. 19861115 201001 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYO, SST  
Jabatan : Pengawas Tata Bangunan & Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan**

**SETIYO, SST  
NIP. 19840916 200501 1 002**

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan, penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran tata bangunan	1	Jumlah RKA APBD Perubahan dan RKA APBD Tahun selanjutnya	2 Kali
2	Membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tata bangunan	1	Jumlah lapran dan data pelaksanaan kegiatan	12 Kali
3	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	Jumlah verifikasi persetujuan bangunan gedung	100 Kali
4	Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik bangunan gedung	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	11 Konstruksi
5	Membantu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan tata bangunan	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	12 Kali
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	100 Kali

<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR TATA BANGUNAN</b>				
1	Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	Jumlah bangunan gedung/rumah negara	22 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penataan Bangunan Gedung/ Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp 122.502.457,200	APBD

  
 Kepala Bidang Cipta Karya  
 dan Jasa Konstruksi

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT**  
 NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 03 Januari 2023

Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,



**SETIYO, SST**  
 NIP. 19840916 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUDDIN ALWI, S.T

Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006**

**Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda**

**ZAINUDDIN ALWI, S.T  
NIP. 19850926 201402 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	50 orang

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 400,000,000	APBD

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT**  
NIP. 19861115 201001 1 006

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda,

**ZAINUDDIN ALWI, ST**  
NIP. 19850926 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD HAFANI, ST

Jabatan : Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,

Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006

ACHMAD HAFANI, ST  
NIP. 19841104 200501 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	1	Jumlah data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis objek kerja	30 Kali
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	1	Jumlah mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	6 Kali
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	1	Jumlah penelitian berdasarkan permasalahan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	6 Kali
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	1	Jumlah laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	120 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	1	Jumlah saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	12 Kali
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	240 Kali
<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR AIR BERSIH DAN SANITASI</b>				
1	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	37 Rumah Tangga 450 Rumah Tangga (DAK)
2	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	1	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	13002,68 Meter
		2	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	4 Buku
3	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	578 SR
		2	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	1000 SR (DAK)
		3	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	6.312 Jiwa

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervis Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Rp 372.727.237	APBD
		2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 6.148.454.547	APBD
		3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 28.627.276.000	APBD
		4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 15.000.000.000	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 4.637.200.000	APBD

	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase /				
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 13,199,995,820	APBD

Pelatihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006

Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana,

ACHMAD HAFANI, ST  
NIP. 19841104 200501 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYO, SST

Jabatan : Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
**NIP. 19861115 201001 1 006**

**Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,**

  
**SETIYO, SST**  
**NIP. 19840916 200501 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tata Bangunan	1	Jumlah RKA APBD P 2022 dan RKA APBD 2023	2 Kali
2	membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tata bangunan	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	12 kali
3	menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	Jumlah verifikasi Persetujuan Bangunan Gedung	120 Kali
4	membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik bangunan gedung	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	60 Kali
5	membantu melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Bangunan	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	12 Kali
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	60 Kali

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi,

Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19861115 201004 1 006

  
**SETIYO, SST**  
NIP. 19840916 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR HANISAH, ST  
Jabatan : Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT**  
**NIP.19861115 201001 1 006**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Analis Pengembangan  
Sarana dan Prasarana,**

**NOORHANISAH, ST**  
**NIP. 19781209 201001 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengumpulkan bahan - bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	1 Jumlah data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek kerja	60 Berkas
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	1 Jumlah yang dilaporkan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	60 Kegiatan
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	1 Jumlah objek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	15 Kegiatan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaah dapat bermanfaat	1 Jumlah obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan masuk	25 berkas
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperinatkan oleh atasan yang baik secara tertulis maupun lisan	1 Jumlah yang dilaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	50 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi**

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19861115 201001 1 006

**Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana,**

  
**NOORHANISAH, ST**  
NIP. 19781209 201001 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL ANNISA, ST  
Jabatan : Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT**  
**NIP.19861115 201001 1 006**

**Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,**

**NURUL ANNISA, ST**  
**NIP. 19960827 202203 2 009**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu pelaksanaan pengawasan di bidang tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan	1 Jumlah pengawasan Tata Bangunan dan Perumahan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan	6 kali
2	Membantu menyiapkan data di bidang tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan	1 Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	12 kali
3	Membantu pelaksanaan evaluasi permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan	1 Jumlah disposisi kepada kepala seksi yang bersangkutan	60 kali
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1 Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	70 Kali

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi,

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,

  
**NURUL ANNISA, ST**  
NIP. 19960827 202203 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. HUSDAH CAHAYA INDAH  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengadministrasi Umum,**

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT**  
**NIP.19861115 201001 1 006**

**Hj. HUSDAH CAHAYA INDAH**  
**NIP. 19791230 201101 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima , mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	1	Jumlah surat masuk dan keluar pada bidang	20 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	1	Jumlah berkas, surat masuk dan keluar pada bidang	20 berkas
3	Mengelompokan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	1	Jumlah surat sesuai dengan seksinya masing-masing	20 berkas
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	1	Jumlah berkas, surat masuk dan keluar pada bidang	20Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	20 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	600 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi,

Pengadministrasi Umum,

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19661115 201001 1 006

  
**HI. HUSDAH CAHAYA INDAH**  
NIP. 19690203 199603 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHYUDI, A.Md

Jabatan : Pengelola Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT  
NIP. 19861115 201001 1 006**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengelola Jasa Konstruksi,**

**MAHYUDI, A.Md  
NIP. 19791230 201101 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

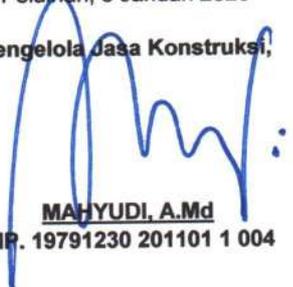
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mengumpulkan Bahan dan Melaksanakan Penyusunan Program, Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Bina Jasa Konstruksi	1	Jumlah RKA APBD P 2020 dan RKA APBD 2021	2 Kali
2	Membantu Menyiapkan Bahan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil)	1	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	70 Rekomendasi
3	Membantu Menyiapkan Bahan dan Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bina Jasa Konstruksi	1	Jumlah Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bina Jasa Konstruksi	1 Kali
4	Mengumpulkan Bahan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Bina Jasa Konstruksi	1	Jumlah Bahan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Bina Jasa Konstruksi	6 Kali
5	Menyiapkan Bahan dan Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Penyelenggaraan Rapat, Bimtek, dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi	1	Jumlah Bahan dan Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Penyelenggaraan Rapat, Bimtek, dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi	4 Kali
6	Menyiapkan Bahan dan Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	Jumlah Bahan dan Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Kali
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	100 Kali

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi,

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19861115 201001 1 006

Pelahari, 3 Januari 2023

Pengelola Jasa Konstruksi,

  
**MAHYUDI, A.Md**  
NIP. 19791230 201101 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SUTARJO  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT**  
**NIP. 19861115 201001 1 006**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengadministrasi Umum,**

**MUHAMMAD SUTARJO**  
**NIP. 19751014 200604 1 014**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima , mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	1	Jumlah surat masuk dan keluar pada bidang	20 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	1	Jumlah berkas, surat masuk dan keluar pada bidang	20 Berkas
3	Mengelompokan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	1	Jumlah surat sesuai dengan seksinya masing-masing	20 Berkas
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	1	Jumlah berkas, surat masuk dan keluar pada bidang	20 Berkas
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	20 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	50 Kali

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi,

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengadministrasi Umum,

**MUHAMMAD SUTARJO**  
NIP. 19751014 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIE NORMALIA, ST

Jabatan : Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT  
NIP. 19861115 201001 1 006**

**Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,**

**JULIE NORMALIA, ST  
NIP. 19830707 201502 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tata bangunan	1	Jumlah data tata bangunan	12 Data
2	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tata bangunan	1	Jumlah laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tata bangunan	12 Berkas
3	Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik bangunan gedung	1	Jumlah bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik bangunan gedung	12 Berkas
4	Mengawasi Tata Bangunan dan Perumahan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan	1	Jumlah pengawasan Tata Bangunan dan Perumahan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan	5 Kegiatan
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	60 kali

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi,

Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,

  
**GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST**  
NIP. 19861115 201001 1 006

  
**JULIE NORMALIA, ST**  
NIP. 19830707 201502 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
**NIP. 19750412 199603 1 002**

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Bina Marga,

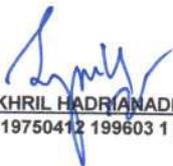
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 160,893,644,936	APBD

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
 NIP. 19750412 199603 1 002

Pelaihari, 06 Januari 2022

Kepala Bidang Bina Marga

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
 NIP. 19740517 200604 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARID RAHMAN, ST

Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Bina Marga,

  
DWI HADI PUTRA, ST, MT  
NIP. 19740517300604 1 002

Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan,

  
FARID RAHMAN, ST, MT  
NIP. 19831230 201402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan kabupaten	1	Jumlah panjang jalan yang direhab	52,378 km

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Jalan	Rp 52,304,126,081	APBD
		2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 1,999,918,698	APBD
		3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 1,514,067,409	APBD
		4	Rekonstruksi Jalan	Rp 63,947,030,187	APBD
		5	Rehabilitasi Jembatan	Rp 475,092,000	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,

  
DWI HADI PUTRA, ST, MT  
 NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 03 Januari 2022

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

  
FARID RAHMAN, ST, MT  
 NIP. 19831230 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG PADMARAGA, ST

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Bidang Bina Marga,

  
DWI HADI PUTRA, ST, MT  
NIP. 19740517200604 1 002

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga,

  
BAMBANG PADMARAGA, ST  
NIP. 19811106 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	26 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Rp 2,615,900,000	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
 NIP. 19730517 200604 1 002

Pelaihari, 03 Januari 2022

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

  
**BAMBANG PADMARAGA, ST**  
 NIP. 19811106 201001 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRFAN ANSHARI, ST

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

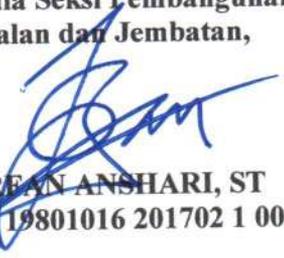
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 januari 2023

Kepala Bidang Bina Marga,

  
DWI HADI PUTRA, ST, MT  
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Pembangunan  
Jalan dan Jembatan,

  
IRFAN ANSHARI, ST  
NIP. 19801016 201702 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	1	Jumlah jembatan yang terbangun	332,6 m
		2	Jumlah Panjang Jalan yang terbangun	58,193 km

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Jalan	Rp 15,102,315,837	APBD
		2	Pembangunan Jembatan	Rp 7,243,828,035	APBD
		3	Penggantian Jembatan	Rp 12,108,118,379	APBD
		4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 3,583,248,292	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 03 Januari 2022

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

  
**IRPAN ANSHARI, ST**  
NIP. 19801016 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVIDA RIYANI, A. Md  
Jabatan : Pengelola Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**Pengelolaan Pemeliharaan Jalan,**

**EVIDA RIYANI, A.Md**  
**NIP. 19961204 201903 2 007**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menyusun Program Kerja bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Pemeliharaan jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1	Jumlah Penyusunan Program Kerja ,bahan dan alat Perlengkapan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan	50 Kegiatan
2	Memantau Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan Bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	520 Kegiatan
3	Mengevaluasi dan Menyusun Laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan Penyusunan program berikutnya	1	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pekerjaan Bidang Bina Marga	20 Laporan
4	Terlaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah Pemeliharaan komponen gaji dan pembayaran TPP PNS DPUPRP	12 Bulan

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI PUTRA, ST. MT**  
 NIP.19740517 200604 1 002

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengelola Pemeliharaan Jalan

  
**EVIDA RIYANI, A. Md**  
 NIP.19961204 201903 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOTA MAIMUN HARTINI, ST  
Jabatan : Pengawas Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**Pengawas Jalan dan Jembatan,**

**YOTA MAIMUN HARTINI, ST**  
**NIP. 19910508 202203 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima dan Menginventarisasi data jalan dan jembatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut	1	Jumlah Inventarisasi data jalan dan jembatan Bidang Bina Marga	380 Data
2	Melaksanakan Pengawasan jalan dan jembatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan	1	Jumlah Pengawasan jalan dan jembatan Bidang Bina Marga	100 Kegiatan
3	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan Evaluasi dan Pertanggungjawaban	1	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Bina Marga	32 Laporan
4	Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah Kegiatan Terlaksananya tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik tertulis maupun lisan	100 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Bina Marga,



**DWI HADI PUTRA, ST. MT**  
NIP. 19740517 200604 1 002

Pengawas Jalan dan Jembatan,



**YOTA MAIMUN HARTINI, ST**  
NIP. 19910508 202203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAPIQ ZAUDANI, A. Md, Kom  
Jabatan : Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan,**

  
**RAPIQ ZAUDANI, A.Md, Kom**  
**NIP. 19840302 200901 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Program, Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Bina Marga	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Program, Rencana Kegiatan Bidang Bina Marga	140 Kegiatan
2	Terlaksananya Penerimaan dan Pemeriksaan dalam serta terbentuknya pelaksanaan penyusunan program rencana kegiatan Bidang Bina Marga	1 Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Pemeriksaan bahan serta terbentuknya Pelaksanaan Penyusunan Program, Rencana Kegiatan Bidang Bina Marga	140 Kegiatan
3	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan kegiatan survey dan perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	1 Jumlah Kegiatan Terlaksananya penyusunan program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan kegiatan survey dan perencanaan sesuai dengan prosedur dan Ketentuan yang berlaku	92 Kegiatan
4	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	1 Jumlah Kegiatan Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	12 Kegiatan

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI PUTRA, ST. MT**  
NIP.19740517 200604 1 002

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan,

  
**RAPIQ ZAUDANI, A.Md. Kom**  
NIP.19840302 200901 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. IKHSAN SADALIA, A. Md  
Jabatan : Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**Pengelola Pembangunan  
dan Peningkatan Jalan,**

**IKHSAN SADALIA, A. Md**  
**NIP. 19760101 201001 1020**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan standar Bina Marga	1 Jumlah pembangunandan Peningkatan jalan yang akan dibangun pada tahun berjalan	5030 M'

Kepala Bidang Bina Marga,



**DWI HADI PUTRA, ST. MT**  
NIP.19740517 200604 1 002

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan,



**M. IKHSAN SADALIA, A.Md**  
NIP.19760101 201001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORMILA, S.Ak  
Jabatan : Penyusun Rencana Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**Penyusun Rencana Pengawasan,**

**NORMILA, S.Ak**  
**NIP. 19900620 201502 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Membantu Penyusunan Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Bina Marga	1	Jumlah Penyusunan Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Bina Marga	60 Kegiatan
2	Membantu Penyusunan Rencana Pengawasan Kegiatan Bina Marga	1	Jumlah Perencanaan Pengawasan Kegiatan Bina Marga	40 Kegiatan
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah Pembayaran Surat Pertanggung Jawaban Bidang Bina Marga	380 Kegiatan

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI PUTRA, ST. MT**  
NIP.19740517 200604 1 002

Pelaihari, 3 Januari 2023

Penyusun Rencana Pengawasan,

  
**NORMILA, S. Ak**  
NIP.19900620 201502 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. MULYADIANSYAH, A.Md  
Jabatan : Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

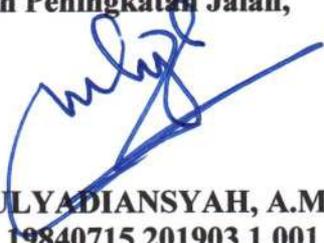
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

**Pengelola Pembangunan  
dan Peningkatan Jalan,**

  
**M. MULYADIANSYAH, A.Md**  
**NIP. 19840715 201903 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1 Jumlah Penyusunan program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	15 Dokumen
2	Memantau Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam Pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	1 Jumlah Kegiatan Pengawasan jalan dan jembatan Bidang Bina Marga	250 Laporan
3	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka Pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	1 Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain	185 Kegiatan
4	Mengevaluasi dan Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	1 Jumlah Laporan yang disusun dan dievaluasi secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	20 Laporan
5	Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	1 Jumlah Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	30 Kegiatan

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI RUTRA, ST. MT**  
NIP.19740517 200604 1 002

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan,

  
**M. MULYADIANSYAH, A.Md**  
NIP. 19840715 201903 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUZAKKIR AFLAHA, A.Md  
Jabatan : Pengelola Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Bina Marga,**

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
**NIP. 19740517 200604 1 002**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengelolaan Pemeliharaan Jalan,**

  
**MUZAKKIR AFLAHA, A.Md**  
**NIP. 19871225 201502 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Program Kerja, Bahan dan Alat perlengkapan pengelolaan Pemeliharaan Jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan Pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1 Jumlah Penyusunan Program Kerja, Bahan dan Alat Perlengkapan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan	10 Dokumen
2	Memantau Pembangunan dan Peningkatan jalan sesuai dengan Bidang tugasnya, agar dalam Pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga	250 Laporan
3	Mengendalikan Program Kerja sesuai dengan prosedur dan Ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi Penyimpangan dalam Pelaksanaan	1 Jumlah Program Kerja yang Dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan	180 Kegiatan
4	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka Pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang Optimal	1 Jumlah Kegiatan yang Dikoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain	170 Kegiatan
5	Mengevaluasi dan Menyusun Laporan secara Berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	1 Jumlah Laporan yang disusun dan dievaluasi secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	20 Laporan
6	Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	1 Jumlah Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	40 Kegiatan

**Kepala Bidang Bina Marga,**

**DWI HADI PUTRA, ST. MT**  
NIP.19740517 200604 1 002

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengelola Pemeliharaan Jalan**

**MUZAKKIR AFLAHA, A. Md**  
NIP.19871225 201502 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, S.T  
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	98%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 3,455,597,176	APBD
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144,397,809	APBD

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, ST  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
ULIL AMRI BAKTIAR, ST, M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T  
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Ahli Muda,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP  
NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T  
NIP. 19790825 200604 1 015**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	1	Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat	80 Dokumen
2	Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim FPR	1	Jumlah koordinasi FPR yang di fasilitasi	15 Kali

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp 144,397,809	APBD

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
ULIL AMRI BAHTIAR, ST. M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011

Pelaihari, 03 Januari 2023

Penata Ruang Ahli Muda

  
SAIDUL FITRI S.Tr. M.T  
NIP. 19790825 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHYIE MULIAWAN, ST  
Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Ahli Pertama,**

**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

**MUHYIE MULIAWAN, ST**  
**NIP. 19890314 201903 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	14 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Rp 404,668,621	APBD
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Rp 3,050,928,555	APBD

Kepala Bidang Tata Ruang,

**ULIL AMRI BAH TJAR, ST, M.T**  
NIP. 19791213 200604 1 011

Pelaihari, 03 Januari 2023

Penata Ruang Ahli Pertama

**MUHYIE MULIAWAN, ST**  
NIP. 19890314 201903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIDUL FITRI, S. Tr. M.T  
Jabatan : Penata Ruang Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Muda,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**SAIDUL FITRI, S. Tr. M.T**  
**NIP. 19790825 200604 1 015**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	1	Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat	60 Dokumen
2	Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Forum Penataan Ruang (FPR)	1	Jumlah Koordinasi FPR yang difasilitasi	10 Kali

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP  
NIP. 19791213 200604 1 011

Pelaihari, 3 Januari 2023

Penata Ruang Ahli Muda,

  
SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T  
NIP. 19790825 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. FERRY JUNIANSYAH, S.T, M,T  
Jabatan : Pengawas Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Pengawas Tata Ruang,**

  
ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP  
NIP. 19791213 200604 1 011

  
Dr. Ir. H. FERRY JUNIANSYAH, S.T, M.T  
NIP. 19720627 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

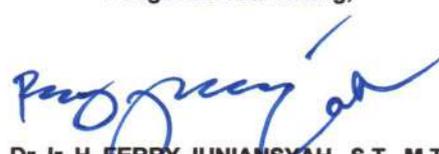
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mempelajari data tata ruang sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan	1	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan tata ruang	35 Dokumen
2	Mengidentifikasi data tata ruang sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan	1	Jumlah kegiatan pemantauan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya	30 Kegiatan
3	Mengawasi data tata ruang sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan	1	Jumlah pelaksanaan Kegiatan yang dikoordinasikan	35 Kegiatan
4	Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan	1	Jumlah laporan berkala yang disusun	12 Laporan
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	40 Laporan

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Tata Ruang,

Pengawas Tata Ruang,

  
ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP  
NIP. 19791213 200604 1 011

  
Dr. Ir. H. FERRY JUNIANSYAH, S.T., M.T.  
NIP. 19720627 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHYIE MULIAWAN, ST  
Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Ahli Pertama,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**MUHYIE MULIAWAN, ST**  
**NIP. 19890314 201903 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Pemanfaatan Ruang	1 Jumlah pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Pemanfaatan Ruang	20 Data
2	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Perencanaan Ruang	1 Jumlah data perencanaan tata ruang lingkup kawasan dan wilayah	15 Data
3	Menyusun Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perencanaan Ruang	1 Jumlah Konsep Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perencanaan Ruang	13 Konsep
4	Mengidentifikasi kelengkapan dokumen Rencana Tata Ruang dalam rangka persetujuan substansi	1 Jumlah identifikasi kelengkapan dokumen Rencana Tata Ruang dalam rangka persetujuan substansi	3 Laporan Identifikasi
5	Menyiapkan Bahan Materi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang	1 Jumlah Bahan Materi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang	6 Bahan Matek
6	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Penataan Ruang	1 Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Penataan Ruang	12 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Ahli Pertama,**

**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
NIP. 19791213 200604 1 011

**MUHYIE MULIAWAN, ST**  
NIP. 19890314 201903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHYIE MULIAWAN, ST  
Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Ahli Pertama,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**MUHYIE MULIAWAN, ST**  
**NIP. 19890314 201903 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARYADI

Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Pengadministrasi Umum,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**KARYADI**  
**NIP. 19671109 200701 1 028**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima ,mencatat dan menyortir Administrasi Umum sersuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.	1	Jumlah Administrasi Umum yang di Sortir.	334 Kegiatan
2	Memberi lembar pengantar pada Administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.	1	Jumlah Administrasi Umum di beri Lembar Pengantar	120 Kegiatan
3	Mengelompokan Administrasi Umum atau Dokumen menurut Jenis dan Sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian.	1	Jumlah Administrasi Umum yang di kelompokan	53 Kegiatan
4	Mendokumentasikan Administrasi Umum sesuai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib Administrasi.	1	Jumlah Administrasi Umum yang di Dokumentasikan.	12 Kegiatan
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan Evaluasi dan pertanggung jawaban .	1	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Tugas.	30 Kegiatan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	1	Jumlah Laporan Kegiatan Tugas Kedinasan.	100 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Pengadministrasi Umum,**

**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
NIP. 19791213 200604 1 011

  
**KARYADI**  
NIP. 19671109 200701 1 028



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD YOGI INDRA RUKMANA, A. MD  
Jabatan : Pengelola Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Pengelola Tata Ruang,**

  
**MUHAMAD YOGI INDRA RUKMANA, A. Md**  
**NIP. 19960301 201903 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Tata Ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1 Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan tata ruang	60 Dokumen
2	Memantau Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	1 Jumlah kegiatan pemantauan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya	60 Kegiatan
3	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	1 Jumlah pelaksanaan Kegiatan yang dikoordinasikan	10 Kegiatan
4	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	1 Jumlah laporan berkala yang disusun	12 Laporan
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	1 Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	25 Laporan

Kepala Bidang Tata Ruang,

**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
NIP. 19791213 200604 1 011

Pelaihari, 3 Januari 2023

Pengelola Tata Ruang,

**MUHAMAD YOGI INDRA RUKMANA, A.Md**  
NIP. 19960301 201903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERAWATY AGUSTINA, A.Md  
Jabatan : Pengelola Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Pengelola Tata Ruang,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**FERAWATY AGUSTINA, A.Md**  
**NIP. 19880828 201903 2 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Tata Ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan tata ruang	80 Dokumen
2	Menyiapkan dan mengendalikan program kerja tata ruang	1	Jumlah dokumen persiapan program tata ruang	80 Dokumen
3	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	1	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain	25 Kegiatan
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lain	25 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Tata Ruang,

Pengelola Tata Ruang,

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST. MP**  
 NIP. 19791213 200604 1 011

  
**FERAWATY AGUSTINA, A.Md**  
 NIP. 19880828 201903 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Bidang Pertanahan,

**RIDHO RIFANI, ST**  
NIP. 19850601 201001 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Melakukan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%
		1	Persentase terkonsolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,007,848,844	APBD
2	Program Penatagunaan Tanah	2	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,282,730,132	APBD

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Pertanahan,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
 NIP. 19750412 199603 1 002

  
**RIDHO RIFANI, ST**  
 NIP. 19850601 201001 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURJUM ASALIA DJAFAR, SE

Jabatan : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pada Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Pertanahan,**

**RIDHO RIFANI, ST**  
**NIP. 19850601 201001 1 016**

**Analis Survei**  
**Pengukuran dan Pemetaan,**

**NURJUM ASALIA DJAFAR, SE**  
**NIP. 19781215 200312 2 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dengan obyek kerja dalam bidang agar memperlancar kerja	1	Jumlah mengumpulkan bahan-bahan kerja	100 Kegiatan
2	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	1	Jumlah Mengumpulkan bahan-bahan kerja	100 Kegiatan
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	1	Jumlah mengumpulkan bahan-bahan kerja	100 Kegiatan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pemimpin	1	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	50 Kegiatan
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah melaksanakan tugas lain	50 Kegiatan
6	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	1	Jumlah hasil pelaksanaan kegiatan	50 Kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Pertanahan,**



**RIDHO RIFANI, ST**  
**NIP. 19850601 201001 1 016**

**Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan,**



**NURJUM ASALIA DJAFAR, SE**  
**NIP. 19781215 200312 2 006**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRUDIN, A.Md  
Jabatan : Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RIDHO RIFANI, ST  
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 4 Januari 2023

**Kepala Bidang Pertanahan,**

**RIDHO RIFANI, ST**  
**NIP. 19850601 201001 1 016**

**Pengelola Adiministrasi**  
**Pertanahan Desa atau Kelurahan,**

**SYAFRUDIN, A.Md**  
**NIP. 19730402 199303 1 005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menyusun Program Kerja, Bahan dan Alat Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan sesuai dengan Prosedur	1	Jumlah Mengumpulkan Bahan-Bahan Kerja	40 Kegiatan
2	Memantau Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan sesuai Bidang agar dalam Pelaksanaan Terdapat Kesesuaian	1	Jumlah Mengumpulkan Bahan-Bahan Kerja	100 Kegiatan
3	Mengendalikan Program Kerja Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku agar tidak terjadi Penyimpangan	1	Jumlah Mengumpulkan Bahan-Bahan Kerja	100 Kegiatan
4	Mengkoordinasikan dengan Unit-Unit terkait atau Instansi Lain Dalam Rangka Pelaksanaannya Program	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	200 Kegiatan
5	Mengevaluasi dan Menyusun Laporan Secara Berkala Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku	1	Jumlah Melaksanakan Tugas Lain	200 Kegiatan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Atasan Baik secara Tertulis maupun Lisan	1	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan	50 Kegiatan

Pelaihari, 4 Januari 2023

Kepala Bidang Pertanahan,



**RIDHO RIFANI, ST**  
NIP. 19850601 201001 1 016

Pengelola Administrasi  
Pertanahan Desa atau Kelurahan,



**SYAFRUDIN, A.Md**  
NIP. 19730402 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSANTO

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 4 Januari 2023

**Kepala Bidang Pertanahan,**

**RIDHO RIFANI, ST**  
**NIP. 19850601 201001 1 016**

**Pengadministrasi Pertanahan,**

**SUSANTO**  
**NIP. 19740617 200701 1 016**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menerima, Mencatat, dan Menyortir Administrasi Pertanahan Sesuai Dengan Prosedur dan Ketentuan Yang Berlaku	1	Jumlah Mengumpulkan Bahan-Bahan Kerja	100 Kegiatan
2	Memberi Lembar Pengantar Pada Administrasi Pertanahan Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Yang Berlaku	1	Jumlah Mengumpulkan Bahan-Bahan Kerja	50 Kegiatan
3	Mengelompokkan Administrasi Pertanahan atau Dokumen Menurut Jenis dan Sifatnya, Sesuai dengan Prosedur	1	Jumlah Mengumpulkan Bahan-Bahan Kerja	50 Kegiatan
4	Mendokumentasikan Administrasi Pertanahan Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku Agar Tertib	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100 Kegiatan
5	Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sesuai dengan Prosedur yang Berlaku sebagai Bahan Evaluasi dan Tanggung Jawaban	1	Jumlah Melaksanakan Tugas Lain	100 Kegiatan
6	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diperintahkan oleh Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan	1	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan	100 kegiatan

Pelaihari, 4 Januari 2023

Kepala Bidang Pertanahan,



**RIDHO RIFANI, ST**  
NIP. 19850601 201001 1 016

Pengadministrasi Pertanahan,



**SUSANTO**  
NIP. 19740617 200701 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMANSYAH, ST

Jabatan : Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 3 Januari 2023

**Kepala Bidang Pertanahan,**

**RIDHO RIFANI, ST**  
**NIP. 19850601 201001 1 016**

**Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan,**

**HERMANSYAH, ST**  
**NIP. 19880808 201903 1 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dengan obyek kerja dalam bidang agar memperlancar kerja	1	Jumlah mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan	65 Kegiatan
2	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	1	Jumlah Mengumpulkan bahan-bahan kerja	50 Kegiatan
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	1	Jumlah mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan	50 kegiatan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pemimpin	1	Jumlah membuat laporan berdasarkan hasil kerja	40 Dokumen
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah melaksanakan tugas lain	80 Kegiatan
6	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	1	Jumlah memberikan saran berdasarkan pelaksanaan kerja	30 kegiatan

Pelaihari, 3 Januari 2023

Kepala Bidang Pertanahan,



**RIDHO RIFANI, ST**  
NIP. 19850601 201001 1 016

Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan,



**HERMANSYAH, ST**  
NIP. 19880808 201903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si  
Jabatan : Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas  
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

Kepala UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, ST  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si  
NIP. 19751001 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan retribusi jasa sewa alat berat dan sewa alat pengujian material konstruksi	1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp 650,000,000
		2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp 150,000,000
2	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana UPTD Peralatan Dan Pengujian Material Kontruksi	1	Jumlah alat berat yang dipenuhi	-
		2	Jumlah alat material kontruksi yang dipenuhi	-

No.	Program	No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 37,980,000	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 24,985,041	APBD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 85,668,480	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusabn Pemerintahan Daerah	Rp 415,283,688	APBD

Pelatihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas,

Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi

  
SYAKHRIL HADEIANADI, ST  
 NIP. 19750412 199603 1 002

  
RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si  
 NIP. 19751001 200903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si

Jabatan : Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

**RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si**  
NIP. 19751001 200903 1 004

Pelaihari, 03 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi Melakukan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah
		2	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
2	Melakukan pelayanan administrasi UPTD Peralatan	1	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	180 Pelayanan
3	Melakukan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	1	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	10 Orang

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 37,980,000	APBD
		2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9,987,312	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4,997,729	APBD
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 10,000,000	APBD
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 69,440,000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Rp 16,228,480	APBD
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 133,200,000	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 168,890,328	APBD
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 113,193,360	APBD

Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian  
Material Kontruksi

**RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si**  
NIP. 19751001 200903 1 004

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Kontruksi

**IMELDA, S.Pd M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAZIR LATIF

Jabatan : JFU Operator Alat Berat Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPTD Peralatan dan**  
**Pengujian Material Konstruksi,**

  
**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19710815 199702 2 007**

**Operator Alat Berat,**

  
**WAZIR LATIF**  
**NIP. 19710315 200701 1 015**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pemeliharaan ringan dan memeriksa kondisi alat berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat di oprasionalkan dengan baik.	1 Jumlah alat berat yang dipelihara	4 Unit
2	Melakukan survey lapangan atau melakukan pengoprasionalan alat berat sesuai dengan teknik oprasional yang benar agar pekerjaan kontruksi terselesaikan	1 Jumlah lokasi yang disurvei	96 Kali
		2 Jumlah kegiatan alat berat yang dioperasikan	96 Kali

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**



**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Operator Alat Berat,**



**WAZIR LATIF**  
NIP. 19710315 200701 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAFRUDIN

Jabatan : JFU Pengadministrasian Umum Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPTD Peralatan dan**  
**Pengujian Material Konstruksi,**

  
IMELDA, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Operator Alat Berat,**

  
SAFRUDIN  
NIP. 19690416 200701 1 023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Data Kepegawaian UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	1 Terlaksananya realisasi administrasi dan Kearsipan Data Kepegawaian UPTD	50 Dokumen
2	Menyiapkan Bahan dan Dokumen ketatausahaan UPTD Peralatan dan Pengujian Material	1 Terlaksananya realisasi bahan dan Dokumen Tata Usaha Laboratorium	75 Dokumen
3	Menata Arsip Surat dan Dokumen lain sesuai dengan ketentuan prosedur agar tertib administrasi	1 Terlaksananya realisasi Arsip Surat dan Dokumen lain sesuai dengan ketentuan prosedur agar tertib administrasi	50 Dokumen
4	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kasubbag TU	1 Terlaksananya realisasi pelaksanaan tugas kepada kasubbag TU	120 Dokumen
5	melakukan tugas sebagai pengurus bendahara penerimaan	1 Terlaksananya realisasi tugas sebagai pengurus bendahara penerimaan	185 Dokumen

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

  
**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Pengadministrasian Umum,**

  
**SAFRUDIN**  
NIP.19690416 200701 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARTO

Jabatan : JFU Operator Alat Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Berat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPTD Peralatan dan**  
**Pengujian Material Konstruksi,**

  
IMELDA, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Operator Alat Berat,**

  
SUHARTO  
NIP. 19670818 200701 1 030

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pemeliharaan ringan dan memeriksa kondisi alat berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat di oprasionalkan dengan baik.	1 Jumlah alat berat yang dipelihara	4 Buah
2	Melakukan survey lapangan atau melakukan pengoprasionalan alat berat sesuai dengan teknik oprasional yang benar agar pekerjaan kontruksi terselesaikan	1 Jumlah lokasi yang disurvei	96 kali
		2 Jumlah kegiatan alat berat yang dioperasikan	96 kali

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**



**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Operator Alat Berat,**



**SUHARTO**  
NIP. 19670818 200701 1 030



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTAMAT

Jabatan : JFU Operator Alat Berat Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material  
Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material  
Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPTD Peralatan dan**  
**Pengujian Material Konstruksi,**



**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19710815 199702 2 007**

**Operator Alat Berat,**



**SUTAMAT**  
**NIP. 19670302 199703 1 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

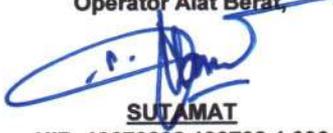
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pemeliharaan ringan dan memeriksa kondisi alat berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat di operasionalkan dengan baik	1 Jumlah Alat Berat Yang di Pelihara	4 Unit
2	Melakukan survey lapangan atau melakukan pengoperasian alat berat sesuai dengan teknik operasional yang benar agar pekerjaan konstruksi terselesaikan	1 Jumlah survey lapangan dan memfasilitasi teknik operasional alat berat dilapangan	48 Kali
3	Melakukan tugas sebagai pembantu pengurus bendahara penerimaan	1 Jumlah laporan realisasi pembantu bendahara penerimaan	12 Laporan

Pelaihari, 2 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,

  
**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

Operator Alat Berat,

  
**SUTAMAT**  
NIP. 19670302 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LASMANSYAH

Jabatan : JFU Pengadministrasian Umum Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPTD Peralatan dan**  
**Pengujian Material Konstruksi,**

  
**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19710815 199702 2 007**

**Operator Alat Berat,**

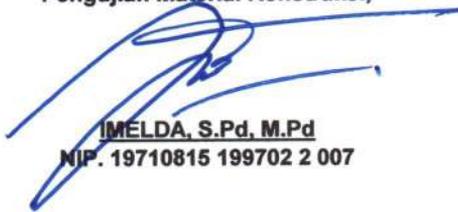
  
**LASMANSYAH**  
**NIP. 19721207 201001 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Memberikan layanan Administrasi dan Kearsipan Data Kepegawaian UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	1	Terlaksananya realisasi administrasi dan Kearsipan Data Kepegawaina UPTD	35 Dokumen
2	Menyiapkan Bahan dan Dokumen Ketatausahaan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	1	Terlaksananya realisasi bahan dan Dokumen Tata Usaha Laboratorium pengujian material	75 Dokumen
3	Menata Arsip Surat dan Dokumen lain sesuai dengan ketentuan prosedur agar tertib administrasi	1	Terlaksananya realisasi Arsip Surat dan Dokumen lain sesuai dengan ketentuan prosedur agar tertib administras	50 Dokumen
4	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kasubbag TU	1	Terlaksananya realisasi pelaksanaan tugas kepada kasubbag TU	120 Dokumen
5	Melakukan tugas sebagai pembantu pengurus bendahara barang	1	Terlaksananya realisasi tugas sebagai pembantu pengurus bendahara barang	60 Dokumen

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**



**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Pengadministrasian Umum,**



**LASMANSYAH**  
NIP.19721207 201001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157  
Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANSYAH  
Jabatan : JFU Operator Alat Berat Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**UPTD Peralatan dan**  
**Pengujian Material Konstruksi,**

  
**IMELDA, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19710815 199702 2 007**

**Operator Alat Berat,**

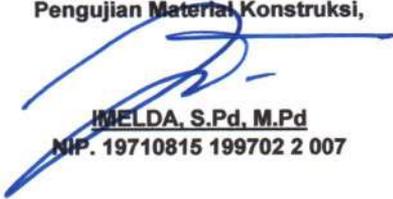
  
**JULIANSYAH**  
**NIP. 19770727 200701 1 018**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pemeliharaan ringan dan memeriksa kondisi alat berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat di oprasionalkan dengan baik.	1 Jumlah alat berat yang dipelihara	4 Unit
2	Melakukan survey lapangan atau melakukan pengoprasionalan alat berat sesuai dengan teknik oprasional yang benar agar pekerjaan kontruksi terselesaikan	1 Jumlah lokasi yang disurvei	48 Kali
		2 Jumlah kegiatan alat berat yang dioperasikan	48 Kali
3	Melakukan tugas sebagai pembantu bendahara Pengeluaran	1 Jumlah laporan realisasi pembantu bendahara pengeluaran	12 Laporan

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

  
**MELDA, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**Operator Alat Berat,**

  
**JULIANSYAH**  
NIP.19770727 200701 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN  
Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Pj. BUPATI TANAH LAUT,**

**KEPALA DINAS,**

**SYAMSIR RAHMAN**

**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
**NIP. 19750412 199603 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

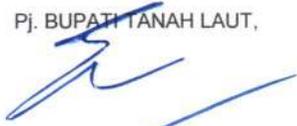
No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur ke PU an	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	85%
		2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	70%
		3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,71%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase penduduk berakses air minum sehat	47,39%
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	54,69%
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	97%
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%
5	Meningkatnya Konsolidasi Tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terkonsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>SEKRETARIAT</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 43,942,846	APBD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,589,257,336	APBD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,651,343,995	APBD
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,766,124,514	APBD
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 231,848,000	APBD
<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>					
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 51,462,796,407	APBD
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37,076,729,099	APBD
<b>BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI</b>					
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49,682,341,902	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota	Rp 4,673,200,000	
5	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,079,061,300	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Memdirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 126,142,920,841	APBD
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	Rp 415,000,000	APBD
<b>BIDANG BINA MARGA</b>					
9	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 216,167,850,106	APBD
<b>BIDANG TATA RUANG</b>					
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 3,517,340,828	APBD
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144,397,809	APBD

<b>BIDANG PERTANAHAN</b>					
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,170,844,401	APBD
12	Program Penatagunaan Tanah	2	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,907,756,359	APBD
<b>UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi</b>					
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Rp 105,222,000	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 74,985,041	APBD
		3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 16,167,480	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 418,857,888	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



**SYAMSIR RAHMAN**

KEPALA DINAS,



**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
**NIP. 19750412 199603 1 002**

Sekretaris,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
**NIP. 19700705 199903 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	1	Nilai SAKIP DPUPRP	80,05 (A)
1	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	1	Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target	100%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 18,999,608	APBD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,108,030,473	APBD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,104,740,955	APBD
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,372,261,864	APBD
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 222,968,000	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,



**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Sekretaris,



**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ARIEF YASIR, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Perencanaan,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

**M. ARIEF YASIR, S.Kom**  
NIP. 19830509 200604 1 004

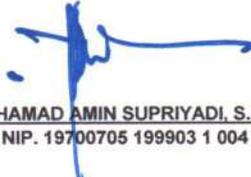
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen
		2	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Laporan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 21,999,264	APBD
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 21,943,582	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Sekretaris,

  
MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos  
NIP. 19700705 199903 1 004

Kepala Sub Bagian Perencanaan,

  
M. ARIEF YASIR, S.Kom  
NIP. 19830509 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHDA FU'ADI, S.I.KOM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
**NIP. 19700705 199903 1 004**

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Sub Bagian**  
**Umum dan Kepegawaian,**

**AHDA FU'ADI, S.I.KOM**  
**NIP. 19821111 200604 1 007**

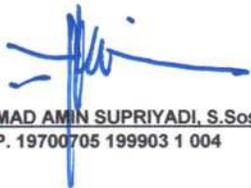
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	1	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Jabatan
		2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	64 Orang PNS, 79 Orang PTT, dan 16 Orang TTK
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10,995,782	APBD
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 732,168,493	APBD
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 57,236,720	APBD
		4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 10,000,000	
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 840,943,000	APBD
		6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 439,048,272	APBD
		7	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Rp 2,327,076,240	APBD
		8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 11,016,000	APBD
		9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp 220,832,000	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Sekretaris,

  
**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  
**AHDA FU'ADI, S.I.KOM**  
NIP. 19821111 200604 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANA MARTIANA, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
**NIP. 19700705 199903 1 004**

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

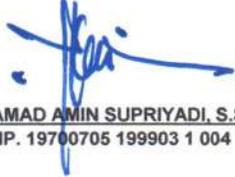
**NANA MARTIANA, ST**  
**NIP. 19860318 200803 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	4 Dokumen

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,559,845,000	APBD
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 29,412,336	APBD

Sekretaris,



**MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**  
NIP. 19700705 199903 1 004

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,



**NANA MARTIANA, ST**  
NIP. 19860318 200803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, S.T  
NIP. 19750412 199603 1 002

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Bina Marga,

  
DWI HADI PUTRA, ST, MT  
NIP. 19740517 200604 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	73%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 216,167,850,106	APBD

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL HADRIANDI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Bina Marga

  
**DWI HADI PUTRA, ST**  
NIP. 19740517 200604 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG PADMARAGA, ST

Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Bina Marga,

  
DWI HADI PUTRA, ST, MT  
NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

  
BAMBANG PADMARAGA, ST  
NIP. 19811106 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	34 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 3,415,900,000	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,

  
**DWI HADI PUTRA, ST**  
NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

  
**BAMBANG PADMARAGA, ST**  
NIP. 19811106 201001 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRFAN ANSHARI, ST

Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

**DWI HADI PUTRA, ST, MT  
NIP. 19740517 200604 1 002**

**Teknik Jalan dan Jembatan Muda,**

**IRFAN ANSHARI, ST  
NIP. 19801016 201702 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standart Bina Marga	1	Jumlah jembatan yang terbangun	621,5 M
		2	Jumlah Panjang Jalan yang terbangun	13,144 Km

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Jalan	Rp 34,702,240,543	APBD
		2	Pembangunan Jembatan	Rp 7,643,828,035	APBD
		3	Penggantian Jembatan	Rp 12,708,118,397	APBD
		4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 8,683,237,224	APBD

Kepala Bidang Bina Marga,

**DWI HADI PUTRA, ST**  
NIP. 19740517 200604 1 002

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

**IRFAN ANSHARI, ST**  
NIP. 19801016 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARID RAHMAN, ST

Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Bina Marga,**

  
**DWI HADI PUTRA, ST, MT**  
NIP. 19740517200604 1 002

**Teknik Jalan dan Jembatan Muda,**

  
**FARID RAHMAN, ST, MT**  
NIP. 19831230 201402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan kabupaten	1	Jumlah panjang jalan yang direhab	66,971 Km

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan /  Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Jalan	Rp 60,799,093,655	APBD
		2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 12,559,874,736	APBD
		3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 1,514,067,409	APBD
		4	Rekontruksi Jalan	Rp 73,666,378,107	APBD
		5	Rehabilitasi Jembatan	Rp 475,092,000	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Bina Marga,

Teknik Jalan dan Jembatan Muda,

  
**DWI HADI PUTRA, ST**  
NIP. 19740517 200604 1 002

  
**FARID RAHMAN, ST**  
NIP. 19831230 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

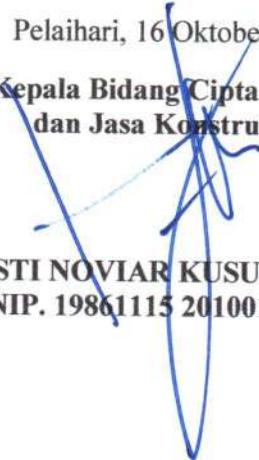
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, S.T  
NIP. 19750412 199603 1 002

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,

  
Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses air bersih	1	Persentase peningkatan rumah tangga dengan air bersih layak	2%
		2	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	22,25%
		3	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses air minum sehat	1,80%
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitas	1	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	0,30%
3	Meningkatnya saluran drainase terbangun	1	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,88%
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya	1	Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	20%
		2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	20%
5	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	1	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	8,70%

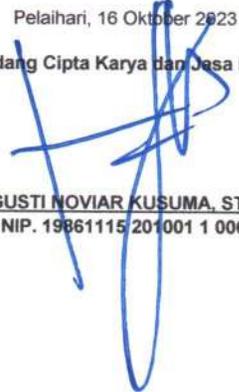
No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49,682,341,902	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota	Rp 4,673,200,000	APBD
3	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,079,061,300	APBD
4	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banunan Gedung	Rp 126,142,920,841	APBD
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 415,000,000	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi,

  
**Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST, MT**  
NIP. 19861115 201001 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYO, SST

Jabatan : Pengawas Tata Bangunan & Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006**

**Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan**

**SETIYO, SST  
NIP. 19840916 200501 1 002**

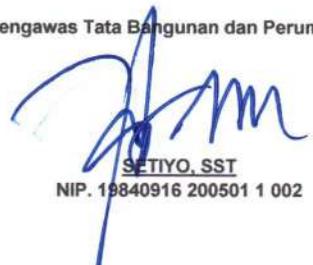
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan, penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran tata bangunan	1	Jumlah RKA APBD Perubahan dan RKA APBD Tahun selanjutnya	2 Kali
2	Membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tata bangunan	1	Jumlah lapran dan data pelaksanaan kegiatan	12 Kali
3	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	Jumlah verifikasi persetujuan bangunan gedung	100 Kali
4	Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik bangunan gedung	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	10 Konstruksi
5	Membantu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan tata bangunan	1	Jumlah laporan dan data pelaksanaan kegiatan	12 Kali
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	100 Kali

<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR TATA BANGUNAN</b>				
1	Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	Jumlah bangunan gedung/rumah negara	45 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penataan Bangunan Gedung/ Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp 126,142,920,841	APBD

  
 Kepala Bidang Citra Karya  
 dan Jasa Konstruksi,  
**Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT**  
 NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 16 Oktober 2023  
 Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan,  
  
**SETIYO, SST**  
 NIP. 19840916 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD HAFANI, ST

Jabatan : Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT**  
**NIP. 19861115 201001 1 006**

**Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana**

**ACHMAD HAFANI, ST**  
**NIP. 19841104 200501 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)		(3)	(4)		
<b>A KINERJA UTAMA</b>						
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	1	Jumlah data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis objek kerja	30 Kali		
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	1	Jumlah mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	6 Kali		
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	1	Jumlah penelitian berdasarkan permasalahan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	6 Kali		
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	1	Jumlah laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	120 Laporan		
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	1	Jumlah saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	12 Kali		
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	1	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	240 Kali		
<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR AIR BERSIH DAN SANITASI</b>						
1	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak	1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	37 Rumah Tangga		
				450 Rumah Tangga (DAK)		
2	Melaksanakan pembangunan saluran drainase	1	Jumlah panjang saluran drainase yang terbangun	21247 Meter		
				2	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	-
3	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air minum	1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	578 SR		
				2	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	500 SR (DAK)
				3	Jumlah peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	6.312 Jiwa

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervis Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Rp 381,818,182	APBD
		2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 6,148,454,547	APBD

		3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 28,152,069,173	APBD
		4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 15,000,000,000	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota	1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 4,637,200,000	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 25,752,533,834	APBD

Pelaihan, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,

Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006

Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana,

ACHMAD HAFANI, ST  
NIP. 19841104 200501 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUDDIN ALWI, S.T

Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,**

**Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006**

**Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda**

**ZAINUDDIN ALWI, S.T  
NIP. 19850926 201402 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil, sertifikat petugas K3 konstruksi, sertifikat penanggung jawab teknis badan usaha	50 orang

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 415,000,000	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Cipta Karya  
dan Jasa Konstruksi,

Ir. GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST. MT  
NIP. 19861115 201001 1 006

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda,

ZAINUDDIN ALWI, ST  
NIP. 19850926 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Dinas,**

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, S.T**  
**NIP. 19750412 199603 1 002**

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

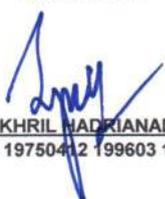
No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luasan area yang dilayani irigasi	17.503 Hektar
		2	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	269.01 Hektar
		3	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	88.91 Hektar

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 51,462,796,407	APBD
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37,076,729	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

  
SYAKHRIL NADRINADI, ST  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
NIP. 19740313 199903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURMINDA WIDIASARI, ST

Jabatan : Teknik Pengairan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
NIP. 19740313 199903 1 005**

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Teknik Pengairan Muda,**

  
**NURMINDA WIDIASARI, ST  
NIP. 19821203 201402 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	1.820 Meter
		2	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	900 Meter
2	Melaksanakan Normalisasi Saluran dan Sungai	1	Panjang sungai dan saluran yang dinormalisasi	30.000 Meter

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp 25,649,938,531	APBD
		2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 6,134,898,385	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 4,949,264,752	APBD

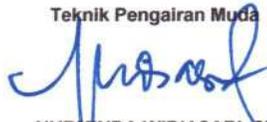
Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,



**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Teknik Pengairan Muda



**NURMINDA WIDIASARI, ST**  
NIP. 19821203 201402 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO SHIOLIHIN, ST. MT

Jabatan : Teknik Pengairan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
**NIP. 19740313 199903 1 005**

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Teknik Pengairan Muda,**

  
**RIDHO SHOLIHIN, ST. MT**  
**NIP. 19820419 201001 1 014**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	4 Dokumen
2	Melakukan Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Bidang Sumber Daya Air dan Analisa Lainnya	2 Dokumen
3	Melaksanakan Proses Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Sumber Daya Air	3	Jumlah Dokumen Detail Engineering Desain Bidang Sumber Daya Air	17 Dokumen
4	Melaksanakan Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur	4	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah	2 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp 1,518,693,289	APBD
		2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp 2,348,196,560	APBD
		3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp 499,098,580	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

Teknik Pengairan Muda,

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

  
**RIDHO SHOLIHIN, ST. MT**  
NIP. 19820419 201001 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST

Jabatan : Analis Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Sumber Daya Air,**

**Analis Sumber Daya Air,**

**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST  
NIP. 19740313 199903 1 005**

**MUHAMMAD GALIH SAPUTRA  
NIP. 19911020 201402 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun/ditingkatkan	800 Meter
		2	Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara	4.900 Meter
		3	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	2.500 Meter
		4	Jumlah bangunan akses pertanian yang dibangun/ditingkatkan	17 Unit
2	Melaksanakan Pertemuan, Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Pengoperasian Irigasi, Petani Pemakai Air, Kelompok Tani/Masyarakat	1	Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA	1 Kali
		2	Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat	20 Kali

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp 13,216,088,484	APBD
		2	Operasi Pemeliharaan Tanggul dan tebing Sungai	Rp 2,524,926,101	APBD
		3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 70,055,057	APBD
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rp 18,998,173,634	APBD
		5	Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan	Rp 11,454,516,810	APBD
		6	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rp 1,175,675,523	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

  
**ORBIT SETIAWAN NURCAHYO, SST**  
NIP. 19740313 199903 1 005

Analis Sumber Daya Air

  
**M. GALIH SAPUTRA, ST**  
NIP. 19911020 201402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, S.T  
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

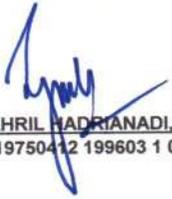
No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	98%

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 3,517,340,828	APBD
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144,397,809	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, ST  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
ULIL AMRI BANTIAR, ST, M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHYIE MULIAWAN, ST.MT

Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST M.P

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Ahli Pertama,**

**ULIL AMRI BAHTIAR, ST. M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011**

**MUHYIE MULIAWAN, ST.MT  
NIP. 19890314 201903 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	13 Dokumen

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Rp 604,660,621	APBD
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Rp 2,912,680,207	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Tata Ruang,

Penata Ruang Ahli Pertama

ULIL AMRI BAHTIAR, ST, M.T  
NIP. 19791213 200604 1 011

MUHYIE MULIAWAN, ST.MT  
NIP. 19890314 201903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T

Jabatan : Penata Ruang Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST M.P

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Bidang Tata Ruang,**

**Penata Ruang Muda,**

  
**ULIL AMRI BAHTIAR, ST. M.P**  
**NIP. 19791213 200604 1 011**

  
**SAIDUL FITRI, S.Tr, M.T**  
**NIP. 19790825 200604 1 015**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang	1	Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat	80 Dokumen
2	Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim FPR	1	Jumlah koordinasi FPR yang di fasilitasi	10 Kali

No	Program / Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp 144,397,809	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Bidang Tata Ruang,

  
ULIL AMRI BAKTIAR, ST, M.P  
NIP. 19791213 200604 1 011

Penata Ruang Muda

  
SAIDUL FITRI S.Tr, M.T  
NIP. 19790825 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO RIFANI, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Pertanahan,

  
SYAKHRIL HADRIANADI, S.T  
NIP. 19750412 199603 1 002

  
RIDHO RIFANI, ST  
NIP. 19850601 201001 1 016

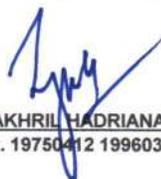
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	TARGET ABT
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Melakukan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	100%
		1	Persentase terkonsolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	100%

No	Program	No	Kegiatan	PAGU ABT	Keterangan
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,170,844,401	APBD
2	Program Penatagunaan Tanah	2	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,907,756,359	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,



**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

Kepala Bidang Pertanahan,



**RIDHO RIFANI, ST**  
NIP. 19850601 201001 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si

Jabatan : Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAKHRIL HADRIANADI, ST

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala Dinas,**

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

**Kepala UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

  
**RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si**  
NIP. 19751001 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan retribusi jasa sewa alat berat dan sewa alat pengujian material konstruksi	1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp 405,000,000
		2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp 95,000,000
2	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana UPTD Peralatan Dan Pengujian Material Kontruksi	1	Jumlah alat berat yang dipenuhi	-
		2	Jumlah alat material kontruksi yang dipenuhi	-

No.	Program	No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 105,222,000	APBD
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 74,985,041	APBD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 16,167,480	APBD
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusabn Pemerintahan Daerah	Rp 418,857,888	APBD

Pelatihan, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi

  
SYAKHRIL HADRIANADI, ST  
 NIP. 19750412 199603 1 002

  
RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si  
 NIP. 19751001 200903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMELDA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si

Jabatan : Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

**Kepala UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

**RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si  
NIP. 19751001 200903 1 004**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Konstruksi,**

**IMELDA, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19710815 199702 2 007**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**  
**DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah
2	Melakukan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
3	Melakukan pelayanan administrasi UPTD Peralatan	1	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	165 Pelayanan
4	Melakukan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia UPTD Peralatan dan Pengujian Material Kontruksi	1	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian material konstruksi	10 Orang

No.	Program / Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 105,222,000	APBD
		2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9,987,312	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4,997,729	APBD
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 60,000,000	APBD
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Rp 16,167,480	APBD
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 136,774,200	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 168,890,328	APBD
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 113,193,360	APBD

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian  
Material Kontruksi

**RAMADHANY SURYANATA, ST, M.Si**  
NIP. 19751001 200903 1 004

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan  
Pengujian Material Kontruksi

**IMELDA, S.Pd M.Pd**  
NIP. 19710815 199702 2 007

**POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2023**

<b>KINERJA UTAMA ESELON II</b>
Meningkatnya Infrastruktur ke PU an
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi
Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW
Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut
Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (CORE BISSIS)</b>
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)
Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Persentase penduduk berakses air minum sehat
Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten
Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan
Persentase terkonolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

<b>KINERJA UTAMA ESELON III (SEKRETARIS)</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Nilai SAKIP DPUPRP
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD
Persentase dokumen keuangan yang disusun sesuai target

<b>KINERJA UTAMA ESELON III (KABID SUMBER DAYA AIR)</b>
Meningkatnya Infrastruktur sumber daya air yang terkelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Persentase panjang sungai dalam kondisi baik
Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat yang daya rusak air

<b>KINERJA UTAMA ESELON III (KABID BINA MARGA)</b>
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)
Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap

<b>KINERJA UTAMA ESELON III (KABID CKJK)</b>
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
Meningkatnya saluran drainase yang terbangun
Meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan
Meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase peningkatan rumah tangga dengan air bersih layak
Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan
Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses air minum sehat
Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak
Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut
Persentase pembangunan gedung/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan
Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota
Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

<b>KINERJA UTAMA ESELON III (KABID TATA RUANG)</b>
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase Capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten

<b>KINERJA UTAMA ESELON III (BIDANG PERTANAHAN)</b>
Meningkatnya inventarisasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan pemberian izin lokasi
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase Penyelesaian Sengketa pertanahan
Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut

<b>KASUBBAG PERENCANAAN</b>
Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan
Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan
<b>KASUBBAG UMUM &amp; KEPENGAWAAN</b>
Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD
Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan
Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR)</b>
Melakukan Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air
Melakukan Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air
Melaksanakan Proses Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Sumber Daya Air
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Dokumen Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air
Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Bidang Sumber Daya Air dan Analisa Lainnya
Jumlah Dokumen Detail Engineering Desain Bidang Sumber Daya Air

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PENGING PEMEL. &amp; PENGAWASAN JALAN &amp; JEMBATAN)</b>
Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi
Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi
Jumlah panjang jalan yang dilebarkan

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR SEKSI TATA BANGUNAN)</b>
Melaksanakan Tercapainya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Melaksanakan Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Bangunan Gedung/Rumah Negara
Jumlah Sosialisasi Program Penanganam/ Pencegahan Daerah Kumuh Sesuai SK Kumuh

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PEMANFAATAN TATA RUANG)</b>
Menyusun dokumen pertimbangan teknis tata ruang
Melakukan fasilitasi dan koordinasi Tim FPR
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah dokumen pertimbangan teknis tata ruang yang dibuat
Jumlah koordinasi FPR yang di fasilitasi

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR ADMINISTRASI PERTANAHAN)</b>
Melaksanakan Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Dokumen Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

<b>KASUBBAG KEUANGAN</b>
Menyusun administrasi keuangan SKPD
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR IRIGASI/SUNGAI,RAWA DAN PANTAI)</b>
Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Melaksanakan Normalisasi Saluran dan Sungai

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN)</b>
Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar Bina Marga
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah panjang jalan yang terbangun
Jumlah jembatan yang terbangun
Jumlah jembatan yang diganti

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PERENCANAAN BINA MARGA)</b>
Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PERENCANAAN TATA RUANG)</b>
Melaksanakan penyusunan perencanaan tata ruang
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR PENGATURAN TANAH PEMERINTAH)</b>
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pemberian Izin Lokasi
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN)</b>
Melaksanakan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air
Melaksanakan Pertemuan, Pembinaan dan Pelatihan Kelemagaan Pengoperasian Irigasi, Petani Pemakai Air, Kelompok Tani/Masyarakat
Melaksanakan Inventarisasi, Laporan Kinerja dan Fungsi Irigasi, serta AKNOP Sumber Daya Air
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah bangunan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara
Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi/dipelihara

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR AIR BERSIH DAN SANITASI)</b>
Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi yang layak
Melaksanakan Pembangunan Saluran Drainase
Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi
Jumlah Panjang Saluran Drainase yang terbangun
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum
Jumlah rumah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan
Jumlah Peningkatan Penduduk dengan Akses Air Minum Sehat

<b>KINERJA TAMBAHAN (SUBKOR BINA JASA KONSTRUKSI)</b>
Melaksanakan Peningkatan Penduduk dengan Akses Air Minum Sehat

Panjang tanggul, sungai dan pantai yang direhabilitasi/dipelihara
Jumlah tampungan air yang direhabilitasi/dipelihara
Jumlah pertemuan dan pembinaan kelembagaan SDA
Jumlah pelatihan kelembagaan SDA
Jumlah pertemuan dan pembinaan P3A dan kelompok tani/masyarakat
Jumlah pelatihan P3A dan kelompok tani/masyarakat
Jumlah dokumen inventarisasi, IKSI atau AKNOP

Melaksanakan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi RUK Nasional yang telah Diterbitkan
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil, Sertifikat Petugas K3 Konstruksi, Sertifikat Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
Jumlah Sosialisasi/FGD/Rapat Pembinaan Jasa Konstruksi
Jumlah Rekomendasi Pemohonan Baru dan Perpanjangan RUK
Jumlah Tersedianya Aplikasi Informasi dan Layanan Jasa Konstruksi

<b>KINERJA UTAMA ESELON IV (KEPALA UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI)</b>
Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi
Melakukan pelayanan administrasi UPTD peralatan dan pengujian material konstruksi
Melakukan peningkatan SDM UPTD peralatan dan pengujian material konstruksi
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi dengan baik
Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik
Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD peralatan dan pengujian material konstruksi
Jumlah SDM UPTD peralatan dan pengujian material konstruksi yang bersertifikat
<b>KASUBBAG TU UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI</b>
Meningkatnya retribusi sewa alat berat dan sewa alat uji material konstruksi
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat
Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi
Jumlah alat berat yang dipenuhi
Jumlah alat uji material konstruksi yang dipenuhi





NO	Indikator Kinerja	2022		2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bidang CKJK</b>						
	Eselon 3/Kabid CKJK						
	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	71,89%	71,89%	1,80%	0%	0%	
	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	43,46%	43,46%	22,23%	0%	0%	
	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	28,44%	28,44%	1,80%	0%	0%	
	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	73,38%	73,38%	0,30%	0,1%	33%	100
	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,22%	5,22%	3,50%	0%	0%	100%
	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	22 Dokumen	24 Dokumen	20%	5,01%	25%	100%
	Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	100%	20%	5,01%	25%	100%
	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	1,61%	8,70%	0%	0%	100%
	<b>Bidang SDA</b>						
	Eselon 3/Kabid SDA						
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,01%	67,01%		69%		90%
	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,94%	89,94%		17%		100%
	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74%	15,74%		17,82%		45%
	Luasan area yang dilayani irigasi			17.503 Hektar	17,503 Hektar	100%	
	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air			15%	15%	100%	
	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air			15%	15%	100%	
	<b>Bidang Tata Ruang</b>						
	<b>Eselon 3/Kabid Tata Ruang</b>						
	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	28%	28%	36,36%	130%	65%
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	97%	98%	36,36%	37%	98%



NO	Indikator Kinerja	2022		2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kasubbag TU UPT Peralatan</b>						
	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	14 buah	2 buah				25 buah
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	118 pelayanan	46 pelayanan				300 pelayanan
	<b>UPTD. Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi</b>						
	<b>Eselon 4</b>						
	<b>Kepala UPTD</b>						
	Jumlah penerimaan Retribusi atas jasa sewa alat material konstruksi			Rp 150,000,000	1,850,000	1%	
	Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat			Rp 650,000,000	11,400,000	2%	
	Jumlah alat berat yang dipenuhi			-	-		
	jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi			-	-		
	<b>Kasubbag TU UPTD</b>						
	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik			71 Buah	-	0%	
	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Unit	-	0%	
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian material konstruksi			180 Pelayanan	11 Dokumen	6%	
	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian maerial konstruksi yang bersertifikat			10 Orang	-	0%	

Pelaihari, 10 April 2023

Kepala Dinas,



**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**

NIP. 19750412 199603 1 002



NO	Indikator Kinerja	2022		2023			Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eselon 4							
	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>							
	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	50%	36 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis
	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	67 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	67 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	50%	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT
	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	50%	2 Jenis Layanan				
	<b>Kasubbag Perencanaan</b>							
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	57%	27 Dokumen
	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	60%	25 Laporan
	<b>Kasubbag Keuangan</b>							
	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	100%	93 Dokumen
	<b>Bidang BM</b>							
	Eselon 3/Kabid BM							
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	78.00%	6.4%				-	84%
	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik	62.68%	9.0%				-	100%
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang (mantap)			85%	0%	0%	0%	85%

NO	Indikator Kinerja	2022		2023				Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Bidang CKJK</b>							
	Eselon 3/Kabid CKJK							
	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	71,89%	71,89%	75%	72%	74.30%	99%	
	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	43,46%	43,46%	50%	43%	48.54%	97%	
	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	28,44%	28,44%	31%	28%	28.44%	92%	
	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	73,38%	73,38%	75%	74%	74.32%	99%	100
	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,22%	5,22%	6%	5%	5.40%	98%	100%
	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	22 Dokumen	24 Dokumen	20%	9%	54.55%	64%	100%
	Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	100%	20%	0%	0.00%	0	100%
	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	1,61%	8,70%	0%	0.00%	0%	100%
	<b>Bidang SDA</b>							
	Eselon 3/Kabid SDA							
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,01%	67,01%		69%			90%
	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,94%	89,94%		17%			100%
	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74%	15,74%		17,82%			45%
	Luasan area yang dilayani irigasi			17.503 Hektar	17,503 Hektar	17,503 Hektar	100%	
	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air			15%	15%	14.25%	93%	
	<b>Bidang Tata Ruang</b>							
	Eselon 3/Kabid Tata Ruang							
	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	28%	28%	36,36%	36.36%	129.87%	65%
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	97%	98%	36,36%	76.67%	78.23%	98%



NO	Indikator Kinerja	2022		2023			Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kasubbag TU UPT Peralatan</b>							
	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	14 buah	2 buah					25 buah
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	118 pelayanan	46 pelayanan					300 pelayanan
	<b>UPTD. Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi</b>							
	<b>Esselon 4</b>							
	<b>Kepala UPTD</b>							
	Jumlah penerimaan Retribusi atas jasa sewa alat material konstruksi			Rp 150,000,000	1,850,000	1,850,000	1.23%	
	Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat			Rp 650,000,000	11,400,000	85,450,000	13.15%	
	Jumlah alat berat yang dipenuhi			-	-			
	Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi			-	-			
	<b>Kasubbag TU UPTD</b>							
	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik			71 Buah	-	60 Buah	85%	
	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Unit	-	-	0%	
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian material konstruksi			180 Pelayanan	11 Dokumen	27 Dokumen	15%	
	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian maerial konstruksi yang bersertifikat			10 Orang	-	-	0%	

Pelaihari, 4 Juli 2023

Kepala Dinas,

  
**SYAKHRIL MADRIYADI, ST**  
 NIP. 19750412 199603 1 002





NO	Indikator Kinerja	2022		2023				Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Reallsasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan III		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bidang CKJK</b>								
	Eselon 3/Kabid CKJK								
	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	71,89%	71,89%	75%	72%	74.30%	74.57%	99%	
	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	43,46%	43,46%	50%	43%	48.54%	50.00%	100%	
	Persentase peningkatan penduduk dengan akses air minum sehat	28,44%	28,44%	31%	28%	28.44%	31.07%	100%	
	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak	73,38%	73,38%	75%	74%	74.32%	75.00%	100%	100
	Persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut	5,22%	5,22%	6%	5%	5.40%	5.45%	99%	100%
	Persentase pembangunan bangunan/bangunan dan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan	22 Dokumen	24 Dokumen	20%	9%	54.55%	81.82%	409%	100%
	Persentase penyelenggaraan penahan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	45%	100%	20%	0%	0.00%	0.00%	0%	100%
	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3,22%	1,61%	9%	0%	0.00%	0.71%	8%	100%
	<b>Bidang SDA</b>								
	Eselon 3/Kabid SDA								
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,01%	67,01%		69%		68.86%	85.65%	90%
	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,94%	89,94%		17%		14.05%	84.07%	100%
	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,74%	15,74%		17,82%		17.50%	84.60%	45%
	Luasan area yang dilayani irigasi			17.503 Hektar	17,503 Hektar	17,503 Hektar	17,503 Hektar	100.00%	
	Persentase kawasan daerah aliran sungai yang terlindungi daya rusak air			15%	15%	14.25%	14.70%	83.92%	
	<b>Bidang Tata Ruang</b>								
	Eselon 3/Kabid Tata Ruang								
	Persentase capaian kecamatan yang sudah memiliki RDTR	28%	28%	28%	36,36%	36.36%	36.36%	129.87%	65%
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	92%	97%	98%	36,36%	76.67%	86.23%	96.94%	98%



NO	Indikator Kinerja	2022		2023					Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan III	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kasubbag TU UPT Peralatan</b>								
	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	14 buah	2 buah						25 buah
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	118 pelayanan	46 pelayanan						300 pelayanan
	<b>UPTD. Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi</b>								
	<b>Eselon 4</b>								
	<b>Kepala UPTD</b>								
	Jumlah penerimaan Retribusi atas jasa uji material konstruksi			Rp 150,000,000	1,850,000	1,850,000	56,250,000	37.50	
	Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat			Rp 650,000,000	11,400,000	85,450,000	190,600,000	29.32	
	Jumlah alat berat yang dipenuhi			-	-				
	jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi			-	-				
	<b>Kasubbag TU UPTD</b>								
	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik			71 Buah	-	60 Buah	71 buah	85%	
	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Unit	-	-		0%	
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian material konstruksi			180 Pelayanan	11 Dokumen	27 Dokumen	90 Dokumen	50%	
	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian maerial konstruksi yang bersertifikat			10 Orang	-	-	9 orang	90%	

Pelaihari, 3 Oktober 2023

Kepala Dinas,



**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**

NIP. 19750412 199603 1 002



NO	Indikator Kinerja	2022		2023					Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan IV		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Eselon 4									
	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>									
	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	35 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 7 Buah Mobil Dinas Operasional dan 1 Jenis Mobil Dinas Jabatan	100%	36 Kendaraan Dinas Operasional, 9 Mobil Operasional dan 2 Jenis
	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	67 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	67 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 11 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	64 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	65 Orang PNS, 79 Orang PTT dan 16 Orang TTK	100%	71 Orang PNS dan 79 Orang PTT
	Jumlah pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	100%	2 Jenis Layanan						
	<b>Kasubbag Perencanaan</b>									
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	100%	27 Dokumen
	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	100%	25 Laporan
	<b>Kasubbag Keuangan</b>									
	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	93 Dokumen
	<b>Bidang BM</b>									
	Eselon 3/Kabid BM									
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	78.00%	6.4%				0%	52.35%	87.25%	84%
	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik	62.68%	9.0%				0%	66.44%	94.91%	100%
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang (mantap)			85%	0%	0%	0%	69.64%	81.93%	85%



NO	Indikator Kinerja	2022		2023					Target Akhir Renstra	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan IV		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>UPT Peralatan</b>									
	<b>Eselon 4</b>									
	<b>Kepala UPT Peralatan</b>									Rp 850,000,000
	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp 299,250,000	Rp 460,938,500							3 alat
	Jumlah alat berat yang dipenuhi	1 alat	0							
	<b>Kasubbag TU UPT Peralatan</b>									
	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi baik dengan perlakuan khusus	14 buah	2 buah							25 buah
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	118 pelayanan	46 pelayanan							300 pelayanan
	<b>UPTD. Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi</b>									
	<b>Eselon 4</b>									
	<b>Kepala UPTD</b>									
	Jumlah penerimaan Retribusi atas jasa uji material konstruksi			Rp 95,000,000	1,850,000	1,850,000	56,250,000	134,345,000	141%	
	Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat			Rp 405,000,000	11,400,000	85,450,000	190,600,000	247,550,000	61%	
	Jumlah alat berat yang dipenuhi			-	-					
	jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi			-	-					
	<b>Kasubbag TU UPTD</b>									
	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik			71 Buah	-	60 Buah	71 buah	0 buah	100%	
	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Unit	-	-		1 Unit	100%	
	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian material konstruksi			180 Pelayanan	11 Dokumen	27 Dokumen	90 Dokumen	50 Pelayanan	110%	
	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan pengujian maerial konstruksi yang bersertifikat			10 Orang	-	-	9 orang	9 orang	90%	

Pelahari, 4 Januari 2024  
Kepala Dinas,

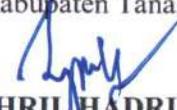
  
**SYAKHRIL HADRI ANADI, ST**  
NIP. 19750411 199603 1 002

MONEV RENSTRA 2019 – 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Realiasi					Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan infrastruktur ke pu an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	%	38	56,51	64	78	85	59	59,61	64,61	73,48	69,64	55,26	100,52	100,95	94,21	81,93
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	%	3,13	3,17	51,96	62,68	70	31,7	48,04	51,96	63,09	66,44	12,77	100,51	100	100,65	94,91
		Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	84	84	67	67,01	69,17	84	84	67	68,077	69,17	100	100	100	101,49	100
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum sehat	%	32,59	38,55	13,88	27,2	31	38,90	38,90	14,46	28,44	31,07	19,36	100,90	104,18	104,56	100
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	%	51,70	51,90	52,29	53,49	75	0,18	52,29	53,28	73,38	75	0,34	100,75	101,89	141,93	100
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	%	70	78	87	92	97	100	78	87	97	94,79	100	100	100	105	96,94
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50	100	100	100
5	Meningkatnya konsolidasi tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pelaihari, 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut,

  
**SYAKHRIL HADRIANADI, ST**  
NIP. 19750412 199603 1 002

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)		
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		17	18	19
																		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an		- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap). - Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap). - Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap). - Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap). - Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	11	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, dan penguasaan jalan dan jembatan kabupaten	- Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi. - Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pelebaran Jalan Menuju Standar Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jembatan Penggantian Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.815.900.000 15.102.315.837 1.514.067.409 83.947.030.187 52.304.126.081 1.999.918.098 7.243.828.035 12.108.118.397 475.062.000 3.583.248.292			
						2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Infrastruktur sumber daya air yang dikelola dengan baik, untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. - Persentase panjang sungai dalam kondisi baik. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat yang daya rusak air		1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat yang daya rusak air	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Pemungup Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lebar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Normalisasi/Restorasi Sungai Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.318.693.289 1.648.196.560 13.216.088.484 25.649.938.531 5.334.940.073 2.124.946.945 70.055.057			
											2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	-Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. - Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawas Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasional Unit Pengelola Irigasi	499.086.306 2.299.931.219 18.199.120.870 8.445.598.339 836.072.193			
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi		- Persentase penduduk berakses air minum sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	- Persentase penduduk berakses air minum sehat. - Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	- Persentase penduduk berakses air minum sehat. - Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak		1	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Setiap Wilayah di Kabupaten Tanah Laut (Meter)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Setiap Wilayah di Kabupaten Tanah Laut (Meter)	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	372.727.273 8.148.454.547 28.627.276.000 15.000.000.000		

